

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

L A P O R A N

# NUSANTARA



FEBRUARI 2021

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

LAPORAN  
NUSANTARA

FEBRUARI 2021

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>BAGIAN I</b> Ringkasan Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah	1
<b>BAGIAN II</b> Perekonomian Sumatera	9
<b>BOKS 1</b> Membangun Kepercayaan dan Beradaptasi dengan Tren Baru: Strategi Perbaikan Kinerja Pariwisata Sumatera	18
<b>BAGIAN III</b> Perekonomian Jawa	21
<b>BOKS 2</b> Strategi Pengembangan Pariwisata Jawa dalam Menghadapi Era Adaptasi Kebiasaan Baru	29
<b>BAGIAN IV</b> Perekonomian Kalimantan	33
<b>BOKS 3</b> Strategi Pengembangan Singkawang Mendukung Perbaikan Sektor Pariwisata	40
<b>BAGIAN V</b> Perekonomian Balinusra	43
<b>BOKS 4</b> Potensi Pengembangan Pariwisata Balinusra Pasca Pandemi COVID-19	50
<b>BAGIAN VI</b> Perekonomian Sulampua	53
<b>BOKS 5</b> Optimalisasi Potensi Wisatawan Nusantara dalam Mendukung Perbaikan Kinerja Pariwisata Sulampua	62
<b>BAGIAN VII</b> Isu Strategis Perbaikan Kinerja Pariwisata: Mendorong Aktivitas Wisatawan Nusantara dengan Tetap Mempersiapkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	65
<b>LAMPIRAN</b>	73



---

# Kata Pengantar

**B**erbagai aspek dalam perekonomian, termasuk dari perspektif kewilayahan, menjadi pertimbangan penting di dalam proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia. Publikasi Laporan Nusantara ini merupakan pandangan Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian dalam perspektif spasial yang disarikan dari hasil pembahasan yang komprehensif antara Dewan Gubernur dengan seluruh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Asesmen perekonomian spasial dalam publikasi ini dibagi menjadi lima wilayah, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

Secara keseluruhan, dinamika perekonomian hingga triwulan IV 2020 menunjukkan berlanjutnya tren perbaikan didukung perbaikan kinerja ekonomi di sebagian besar wilayah. Pertumbuhan ekonomi secara nasional pada triwulan IV 2020 mencatat kontraksi yang lebih kecil yakni -2,19% (yoy), dibandingkan -3,49% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan ini terutama ditopang oleh kontribusi positif kinerja sektor eksternal yang mendorong ekspor barang nonmigas pada triwulan IV 2020 tumbuh positif di sebagian besar wilayah, kecuali Kalimantan. Berbagai komoditas berbasis sumber daya alam menopang perbaikan kinerja ekspor Sumatera, Kalimantan, Balinusra, dan Sulampua. Demikian pula dengan ekspor manufaktur dari Jawa dan Sulampua yang juga mulai membaik untuk beberapa komoditas. Dari sisi domestik, kontraksi konsumsi swasta mulai membaik dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama di wilayah Jawa. Di sisi lain, pemulihan investasi masih berjalan lambat di sebagian besar wilayah karena masih tertahannya konstruksi bangunan. Selain itu, dorongan fiskal daerah kembali menurun setelah melewati puncaknya pada triwulan III pascapelonggaran mekanisme penyaluran TKDD sejak Agustus 2020. Secara keseluruhan, ekonomi di hampir seluruh wilayah mencatat kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020, kecuali Sulampua yang masih mampu tumbuh positif ditopang tetap kuatnya ekspor. Ke depan, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan akselerasi program vaksin nasional oleh Pemerintah.

Di sisi harga, realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di berbagai daerah pada 2020 tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran nasional. Secara nasional, inflasi IHK pada 2020 tercatat 1,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,72% (yoy). Penurunan inflasi terjadi di seluruh wilayah karena penurunan seluruh komponen disagregasi inflasi, yaitu inflasi inti, *administered prices* (AP), dan *volatile food* (VF). Turunnya inflasi inti terjadi di seluruh wilayah akibat permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai sasaran, tekanan harga komoditas global yang minimal, dan stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga sesuai nilai fundamentalnya. Sementara inflasi AP mencatatkan penurunan di hampir seluruh wilayah, kecuali Jawa, sejalan dengan mobilitas masyarakat yang masih terbatas dan upaya Pemerintah menurunkan harga energi guna mendorong daya beli masyarakat. Sementara itu, inflasi kelompok VF terkendali sebesar 3,62% (yoy), didukung permintaan yang belum kuat ditengah pasokan yang memadai, meskipun terdapat tekanan musiman pada akhir tahun. Inflasi pada tahun 2021 diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran 3,0%±1%. Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendali Inflasi (TPI dan TPID), guna mengendalikan inflasi IHK sesuai kisaran targetnya.

---

Publikasi Laporan Nusantara edisi Februari 2021 kali ini mengangkat isu khusus mengenai “Mendorong Aktivitas Wisatawan Nusantara dengan Tetap Mempersiapkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara”. Penurunan kinerja pariwisata yang cukup signifikan dipengaruhi oleh adanya penerapan restriksi perjalanan di berbagai negara dan penutupan sementara akses masuk orang asing ke Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan daerah-daerah yang bergantung pada LU terkait pariwisata mengalami proses pemulihan yang paling lambat dibandingkan daerah-daerah lainnya pada paruh kedua 2020. Untuk mempercepat proses perbaikan kinerja pariwisata ke depan dibutuhkan intervensi dan strategi kebijakan yang diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai peluang untuk mendorong pariwisata, termasuk aktivitas wisatawan nusantara, dengan tetap memastikan kesiapan destinasi pariwisata. Hal ini akan diulas lebih dalam pada Laporan Nusantara edisi kali ini.

Sebagai penutup, kami berharap buku Laporan Nusantara ini dapat memberi manfaat dan masukan bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi daerah, serta menjadi salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati langkah kita bersama untuk berkarya demi nusa dan bangsa, membangun untuk Indonesia Maju.

**Jakarta, 3 Maret 2021**

*Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter*

**Aida S. Budiman**  
Asisten Gubernur

## BAGIAN 1

# Ringkasan Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah

## Perkembangan Terkini Perekonomian Daerah

### *Pertumbuhan Ekonomi*

**Pertumbuhan ekonomi Indonesia melanjutkan tren perbaikan pada triwulan IV 2020 didukung perbaikan kinerja ekonomi di sebagian besar wilayah.** Pertumbuhan ekonomi secara nasional pada triwulan IV 2020 mencatat kontraksi yang lebih kecil yakni -2,19% (yoy), dibandingkan -3,49% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan ini terutama ditopang oleh kontribusi positif kinerja sektor eksternal sejalan dengan membaiknya perekonomian di beberapa negara tujuan ekspor diantaranya Tiongkok dan AS, di tengah masih terbatasnya kinerja impor. Ekspor barang nonmigas pada triwulan IV 2020 tumbuh positif di sebagian besar wilayah, kecuali Kalimantan. Berbagai komoditas berbasis sumber daya alam (SDA) menopang perbaikan kinerja ekspor Sumatera, Kalimantan, Balinusra, dan Sulampua. Demikian pula dengan ekspor manufaktur dari Jawa dan Sulampua yang juga mulai membaik untuk beberapa komoditas.

**Dari sisi domestik, kontraksi konsumsi swasta mulai membaik dibandingkan triwulan sebelumnya.** Perbaikan konsumsi swasta didukung meningkatnya mobilitas masyarakat pascarelaksasi PSBB dan adanya beberapa periode hari libur meskipun dampaknya masih terbatas. Secara spasial, perbaikan terutama ditopang wilayah Jawa, sementara wilayah lainnya masih berjalan lambat. Berbagai kebijakan pembatasan sebagai bentuk mitigasi penyebaran COVID-19 menahan perbaikan kinerja konsumsi lebih lanjut. Selain itu, aktivitas Pilkada serentak kali ini juga berdampak minimal akibat terbatasnya kegiatan pertemuan berskala besar. Sementara itu, pemulihan investasi masih berjalan lambat di sebagian besar wilayah karena masih tertahannya konstruksi bangunan. Meski demikian, perlambatan lebih dalam investasi tertahan investasi non bangunan pada sejumlah proyek di daerah seperti proyek kelistrikan di Sumatera dan Balinusra, proyek migas di Kalimantan, serta investasi beberapa industri di Jawa. Di sisi lain, dorongan fiskal daerah kembali menurun setelah melewati puncaknya pada triwulan III 2020 pascapelonggaran mekanisme penyaluran TKDD sejak Agustus 2020.

**Dari sisi LU, membaiknya permintaan eksternal menopang perbaikan kinerja industri pengolahan dan pertambangan di sebagian besar wilayah.** Perbaikan Industri pengolahan sejalan dengan perbaikan permintaan

ekspor dan domestik. Di Jawa, peningkatan kinerja industri ditopang beberapa industri seperti alat angkut, mamin, barang logam, karet, serta kimia dan farmasi. Sementara di Sumatera, pemulihan industri tidak hanya terjadi pada industri CPO, namun juga didukung industri elektronik di Kepri. Di Kalimantan, pemulihan ekonomi lebih ditopang oleh perbaikan kinerja pertambangan batubara dan migas. Pertumbuhan positif ekonomi Sulampua ditopang kedua LU utamanya, yakni LU Pertambangan dan Industri Pengolahan, khususnya industri logam dasar berorientasi ekspor. Di sisi lain, LU terkait aktivitas pariwisata di Balinusra masih mengalami tekanan yang cukup dalam.

**Secara spasial, tekanan kontraksi melandai di hampir seluruh wilayah, bahkan Sulampua telah mulai tumbuh positif.** Pada triwulan IV 2020 sebanyak 21 provinsi mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan triwulan sebelumnya. Bahkan tiga provinsi di Sulampua dapat mencatat pertumbuhan yang positif, yakni Sulteng, Maluku Utara dan Papua didorong oleh peningkatan kinerja industri pengolahan produk besi baja dan pertambangan tembaga yang keduanya berorientasi ekspor.

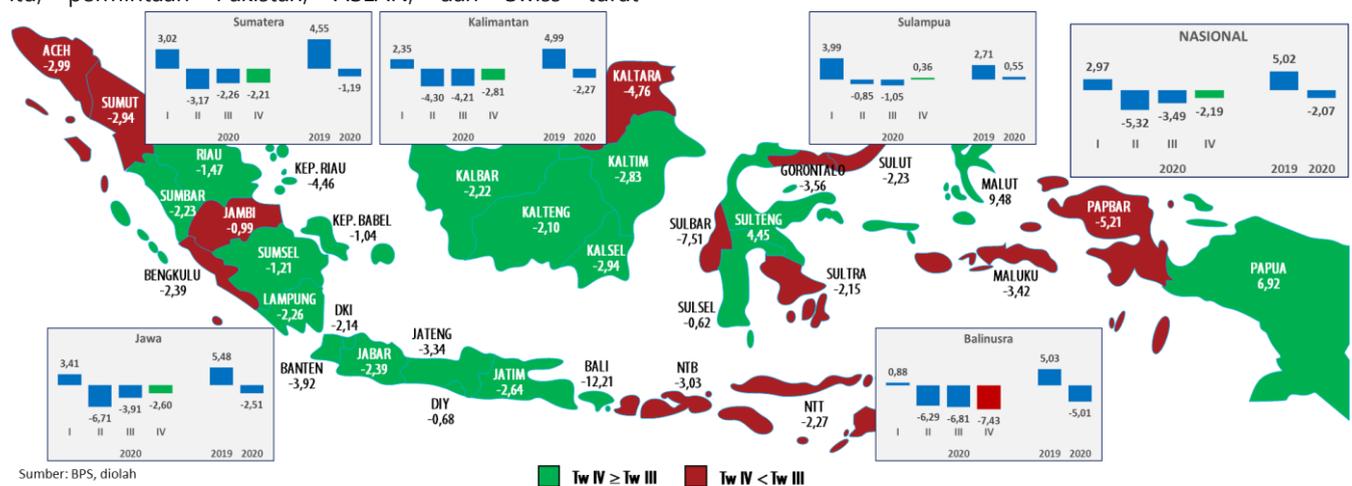
**Dengan perkembangan triwulan IV 2020, ekonomi nasional secara keseluruhan tahun 2020 masih terkontraksi.** Perlambatan lebih dalam ekonomi nasional, tertahan oleh pertumbuhan ekonomi Sulampua yang masih mampu mencatat kinerja positif. Perlambatan ekonomi pada 2020 disebabkan oleh kinerja permintaan domestik yang mengalami tekanan di seluruh wilayah terutama Balinusra. Konsumsi swasta menurun sejalan dengan pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial di seluruh wilayah terutama pada triwulan II 2020, serta sempat terhentinya operasional pusat industri ritel dan perhotelan. Bahkan tekanan konsumsi swasta di Balinusra masih berlanjut hingga akhir tahun akibat kinerja pariwisata yang terus mengalami tekanan. Penurunan permintaan domestik juga dipengaruhi oleh kinerja negatif investasi akibat penundaan atau pergeseran sejumlah rencana investasi Pemerintah maupun swasta, serta gangguan logistik dan pergerakan tenaga kerja pada periode triwulan II 2020. Di sisi lain, sumber penerimaan fiskal daerah yang menurun, baik transfer dari Pemerintah Pusat maupun pendapatan daerah, mengakibatkan ruang gerak stimulus fiskal daerah menjadi terbatas sepanjang 2020, sehingga dorongan konsumsi Pemerintah sangat bergantung pada stimulus dari Pemerintah Pusat.

**Sejalan dengan permintaan domestik yang lemah,**

**kontraksi impor lebih dalam dibandingkan kontraksi ekspor sehingga net-ekspor pada 2020 berkontribusi positif.** Penurunan impor terutama dipengaruhi oleh kebutuhan domestik, baik barang konsumsi, bahan baku, maupun barang modal. Dari sisi ekspor, kinerja ekspor jasa berkontraksi akibat penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, sementara nilai ekspor barang non migas di daerah masih tumbuh positif terutama didukung peningkatan permintaan Tiongkok, khususnya untuk komoditas industri logam dasar serta mineral Sulampua, Balinusra, serta Jawa. Puluhan permintaan AS sejak triwulan III 2020 juga mendorong perbaikan ekspor alas kaki dan furnitur Jawa, serta karet Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, permintaan Pakistan, ASEAN, dan Swiss turut

mendukung peningkatan ekspor berbagai daerah.

**Penurunan kinerja perekonomian sepanjang 2020 juga tercermin dari pembiayaan kredit perbankan yang juga menurun.** Penyaluran kredit berkontraksi di sebagian besar wilayah, akibat belum pulihnya permintaan domestik, meski kualitas kredit tetap terjaga. Kredit tumbuh melambat dari tahun sebelumnya di hampir seluruh daerah. Perlambatan kredit terjadi di semua LU Utama, meski dengan risiko kredit yang secara umum tetap terjaga (NPL < 5%) dan cenderung stabil di semua wilayah. Meski demikian, kenaikan NPL beberapa sektor utama di daerah (>5%) menjadi perhatian, antara lain pertambangan di Sumatera dan Jawa, serta industri pengolahan di Sulampua.



Sumber: BPS, diolah

Gambar I.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan IV 2020 (% yoy)

**Perekonomian Sulampua mulai tumbuh positif pada triwulan IV 2020, terutama didorong net ekspor.** Peningkatan kinerja net ekspor ditopang oleh ekspor konsentrat seiring naiknya produksi tambang bawah tanah Papua terutama ke Jepang untuk mendukung investasi terkait *information and communication technology* (ICT), dan ekspor berbagai komoditas besi baja terutama ke Tiongkok sejalan dengan kebutuhan investasi infrastruktur. Meski demikian, perbaikan konsumsi swasta di wilayah ini masih terbatas sehingga menahan perbaikan ekonomi Sulampua lebih lanjut. Dorongan konsumsi selama periode HBKN Natal dan libur akhir tahun berdampak minimal seiring diberlakukannya kebijakan pembatasan mobilitas untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19 yang masih terus meningkat. Konsumsi Pemerintah juga melemah karena sebagian besar Pemda telah mengoptimalkan penyerapan anggaran pada triwulan III 2020. Sementara dorongan dari investasi juga minimal pascaberoperasinya sejumlah smelter baru di Sulawesi Tengah. Kinerja investasi wilayah ini ditopang pembangunan investasi industri baja yang sedang berlangsung di Maluku Utara. Dari sisi LU, membaiknya kinerja ekspor berdampak positif pada kinerja LU Pertambangan dan LU Industri Pengolahan. Dengan

perkembangan tersebut, maka secara keseluruhan tahun 2020, perekonomian Sulampua masih dapat tumbuh positif, ditopang oleh net ekspor, terutama ekspor produk besi baja dan konsentrat tembaga. Kebijakan pemulihan ekonomi dengan mendorong investasi yang dilakukan Tiongkok menjadi pendorong utama permintaan ekspor besi baja Sulampua. Hal tersebut juga didukung kapasitas produksi yang meningkat pascainvestasi yang besar selama 2019. Kinerja ekspor yang solid berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Sulampua yang tetap positif, ditengah pelemahan permintaan domestik yang terjadi sepanjang 2020.

**Perekonomian Jawa pada triwulan IV 2020 terus melanjutkan tren perbaikan didorong net ekspor dan permintaan domestik.** Ekspor non migas mulai kembali tumbuh positif setelah mengalami kontraksi pada dua triwulan sebelumnya, didukung beberapa produk utama antara lain otomotif dan alas kaki. Perbaikan kinerja ekspor luar negeri lebih lanjut masih tertahan ekspor jasa karena masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Dari sisi domestik, konsumsi swasta melanjutkan tren perbaikan meski masih berkontraksi sejalan dengan pelonggaran pembatasan aktivitas sosial.

Sementara itu, proses pemulihan investasi berjalan lambat dipengaruhi oleh pergeseran penyelesaian investasi bangunan Pemerintah ke tahun 2021. Perlambatan lebih dalam tertahan oleh perbaikan investasi non bangunan meski belum mampu mengompensasi penurunan investasi bangunan. Kontraksi permintaan domestik tertahan oleh konsumsi pemerintah yang masih tumbuh positif meskipun melambat karena penyerapan belanja fiskal daerah telah dioptimalkan pada triwulan sebelumnya. Dari sisi LU, pelonggaran PSBB dan pembukaan kembali sektor prioritas mendorong perbaikan kinerja LU Industri Pengolahan, Perdagangan, Transportasi serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, meski masih berkontraksi. Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan tahun 2020 ekonomi Jawa berkontraksi akibat pelemahan konsumsi swasta. Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan pergeseran sejumlah rencana investasi infrastruktur Pemerintah dan swasta. Namun, perlambatan lebih dalam tertahan oleh konsumsi pemerintah sejalan dengan stimulus fiskal APBN untuk pemulihan ekonomi. Penurunan aktivitas ekonomi domestik mengakibatkan penurunan impor yang lebih dalam dari ekspor, sehingga net ekspor masih berkontribusi positif pada 2020.

**Perekonomian Sumatera juga melanjutkan tren perbaikan pada triwulan IV 2020 terutama didorong oleh net ekspor.** Kontribusi positif net ekspor semakin kuat di tengah perbaikan permintaan domestik yang masih tertahan. Perbaikan net ekspor terutama didorong oleh peningkatan nilai ekspor luar negeri untuk produk CPO ke India dan Pakistan. Selain itu, beberapa produk seperti elektronik juga masih mencatat pertumbuhan positif. Selain ekspor luar negeri, keberlanjutan program biodiesel (B30) juga menopang pertumbuhan ekspor antardaerah di Sumatera sejalan dengan peningkatan kuota produksi B30 pada 2020. Dari sisi domestik, perbaikan konsumsi swasta tertahan sejalan dengan penambahan kasus positif COVID-19 selama periode akhir tahun sehingga berdampak pada penurunan aktivitas masyarakat di luar rumah. Kinerja investasi juga belum optimal terutama dengan penurunan pagu belanja modal Pemerintah Daerah, pengerjaan beberapa proyek yang telah memasuki tahap akhir, serta pergeseran rencana konstruksi ke 2021. Dari sisi LU, perbaikan ekonomi pada triwulan IV 2020 terutama ditopang oleh perbaikan kinerja LU Pertanian, LU Industri Pengolahan, dan LU Perdagangan. Dengan perkembangan tersebut, ekonomi Sumatera pada 2020 mencatat kontraksi pertumbuhan. Hal ini terutama dipengaruhi tekanan pada permintaan domestik akibat kinerja konsumsi swasta yang melemah. Selain itu, kinerja investasi juga berkontraksi antara lain karena *refocusing* anggaran Pemerintah untuk penanganan COVID-19 yang berdampak pada penyesuaian target penyelesaian sejumlah proyek, diantaranya proyek

Jalan Tol Trans Sumatera. Penurunan permintaan domestik tersebut mengakibatkan penurunan impor yang lebih dalam, sehingga net ekspor masih dapat memberikan kontribusi positif. Bahkan nilai ekspor barang non migas Sumatera pada 2020 justru tumbuh meningkat dibandingkan 2019, terutama didorong kenaikan ekspor CPO ke India dan Pakistan. Kinerja positif juga ditopang oleh ekspor antardaerah sejalan dengan kelanjutan program B30.

**Perbaikan net ekspor juga menopang perbaikan ekonomi Kalimantan pada triwulan IV 2020 terutama didorong ekspor batubara meski masih tumbuh negatif.**

Perbaikan ekspor batubara terutama untuk tujuan Tiongkok seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangkit listrik di negara tersebut di tengah terbatasnya ketersediaan Batubara domestik. Selain itu, kondisi geopolitik antara Tiongkok dan Australia juga turut berdampak pada pasokan batu bara Tiongkok. Perbaikan kontraksi juga didukung ekspor komoditas CPO terutama ke India. Namun, perbaikan dari sisi eksternal ini belum diikuti membaiknya permintaan domestik. Kinerja investasi masih lemah, meski penurunan lebih dalam tertahan oleh masih berlangsungnya pembangunan investasi migas di Kalimantan Timur – walaupun dengan realisasi yang juga dibawah target. Konsumsi swasta kembali melemah sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat yang tertahan, sehingga permintaan akhir tahun 2020 tidak sebesar pola historis. Demikian halnya dengan peran konsumsi Pemerintah yang menurun karena pagu belanja yang lebih rendah dibandingkan 2019 terkait *refocusing* penanganan COVID-19. Dari sisi LU, perbaikan kinerja eksternal mendukung membaiknya kinerja LU utama, khususnya LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Pertanian. Dengan perkembangan triwulan IV, maka ekonomi Kalimantan untuk keseluruhan tahun 2020 tercatat tumbuh negatif. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kinerja net ekspor yang mengalami tekanan sejak triwulan II 2020 ditengah permintaan domestik yang juga menurun.

**Tekanan ekonomi Balinusra pada triwulan IV 2020, masih berlanjut akibat ekspor jasa yang masih lemah.**

Meski net ekspor masih berkontribusi positif, namun kontraksi yang cukup signifikan pada kinerja ekspor jasa mengakibatkan tekanan yang besar bagi sumber utama penerimaan utama wilayah ini. Jumlah kunjungan wisman belum pulih hingga akhir tahun akibat masih diterapkannya *travel restriction*. Di sisi lain, peningkatan kinerja ekspor barang luar negeri untuk komoditas konsentrat tembaga ke Tiongkok tidak mampu mengompensasi kontraksi yang terjadi pada ekspor jasa. Hal tersebut mengakibatkan tekanan pada sisi domestik, terutama konsumsi rumah tangga yang masih terus berlanjut hingga triwulan IV 2020. Namun, kontraksi permintaan domestik di Balinusra pada

triwulan membaik karena ditopang konsumsi Pemerintah dan investasi. Perbaikan konsumsi Pemerintah terutama didorong oleh realisasi bantuan sosial dan dana hibah pariwisata, sementara perbaikan investasi ditopang oleh penambahan kapasitas produksi di LU Pertambangan. Sementara itu, kontraksi pertumbuhan pada seluruh LU pendukung aktivitas pariwisata masih berlanjut sehingga menekan kinerja ekonomi Balinusra secara keseluruhan. Dengan perkembangan tersebut, maka secara keseluruhan tahun 2020 perekonomian Balinusra mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan wilayah lainnya. Tekanan kinerja pariwisata yang dimulai sejak paruh pertama 2020 dan terus berlanjut hingga akhir tahun mengakibatkan tekanan yang cukup besar pada seluruh LU pendukungnya. Upaya untuk mendorong pemulihan melalui pergerakan wisatawan nusantara juga masih tertahan akibat kasus COVID-19 yang masih meningkat.

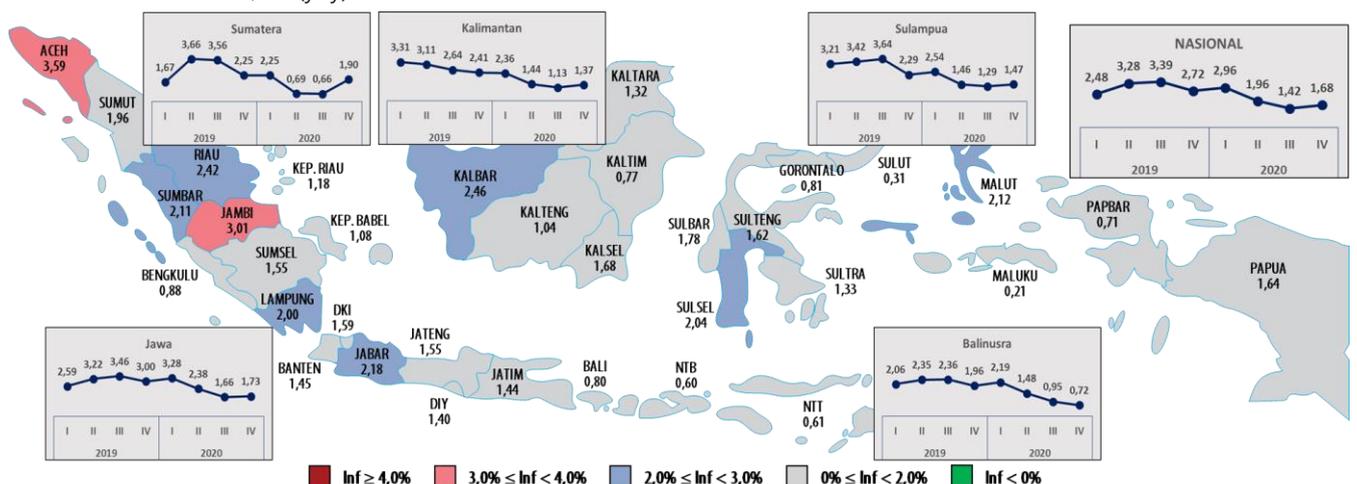
## Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

**Pandemi COVID-19 telah mendorong perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital.** Akseptasi ekonomi dan keuangan digital terus meningkat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan nominal dan volume transaksi *e-commerce*, *digital banking*, dan *fintech lending* pada triwulan IV 2020. Transaksi *e-commerce* tercatat tumbuh 49,5% (yoy) secara nominal dan 104,9% (yoy) secara volume, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. *Digital banking* juga terus menjadi preferensi masyarakat untuk bertransaksi di masa pandemi COVID-19, tercermin dari transaksi yang tumbuh kuat, yaitu sebesar 12,5% (yoy) secara nominal dan 41,9% (yoy) secara volume. Bersamaan

dengan itu, nominal *fintech lending* juga tercatat tumbuh 16,4% (yoy). Sementara dari sisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SP-PUR), transaksi ekonomi membaik meski masih terbatas. Volume transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tumbuh 7,2% (yoy) didukung transaksi pemerintah yang tumbuh tinggi dan transaksi *e-channel* yang mendominasi preferensi masyarakat, meski secara nominal terkontraksi 2,4% (yoy). Sementara nominal Real Time Gross Settlement (RTGS) tumbuh 37,5% (yoy), meski secara volume terkontraksi 12,0% (yoy). Sementara itu, nominal uang yang diedarkan tumbuh sebesar 13,2% (yoy).

## Perkembangan Inflasi

**Inflasi di seluruh wilayah pada tahun 2020 tercatat rendah dan berada di bawah rentang sasaran nasional 3,0%±1%.** Secara nasional, inflasi IHK pada 2020 tercatat 1,68% (yoy), lebih rendah dari 2,72% (yoy) pada tahun sebelumnya<sup>1</sup>. Penurunan inflasi terjadi di seluruh wilayah karena penurunan seluruh komponen disagregasi inflasi, yaitu inflasi inti, *administered prices* (AP), dan *volatile food* (VF). Turunnya inflasi inti terjadi di seluruh wilayah akibat permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai sasaran, tekanan harga komoditas global yang minimal, dan stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga sesuai nilai fundamentalnya. Sementara inflasi AP mencatatkan penurunan di hampir seluruh wilayah, kecuali Jawa, seiring dengan lemahnya daya beli dan pembatasan aktivitas masyarakat yang menyebabkan rendahnya inflasi aneka rokok dan deflasi tarif berbagai jenis angkutan.



Sumber: BPS, diolah

Gambar I.2. Peta Inflasi Daerah, Triwulan IV 2020 (yoy)

<sup>1</sup> Pengukuran inflasi tahun 2019 menggunakan SBH 2012, sementara pengukuran inflasi tahun 2020 menggunakan SBH 2018.

Di samping itu, kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga energi juga memengaruhi penurunan inflasi AP. Bersamaan dengan itu, inflasi VF juga tercatat menurun di sebagian besar wilayah dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan penurunan permintaan, khususnya dari sektor hotel, restoran, dan katering (horeka), di tengah tercukupinya pasokan berbagai bahan makanan.

## Prospek Perekonomian Daerah

### *Prospek Pertumbuhan Ekonomi*

**Momentum perbaikan ekonomi diperkirakan berlanjut pada 2021.** Proses perbaikan ekonomi dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi global dan akselerasi program vaksin oleh Pemerintah. Pemulihan ekonomi global yang terutama akan ditopang AS dan Tiongkok akan mendorong kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas. Hal tersebut selanjutnya akan mendorong perbaikan kinerja ekspor daerah, seperti CPO, batu bara dan besi baja, serta sejumlah produk manufaktur seperti kendaraan bermotor dan alas kaki. Dari sisi domestik, program vaksinasi yang telah dimulai sejak triwulan I 2021 dan pelonggaran aktivitas sosial di seluruh daerah akan mendukung pemulihan keyakinan masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, dorongan dari sisi domestik juga bersumber dari peningkatan investasi Pemerintah dan kelanjutan investasi swasta, termasuk investasi relokasi yang dilakukan oleh korporasi global, terutama di Jawa. Bersamaan dengan hal tersebut, peningkatan investasi juga didukung oleh komitmen Pemerintah untuk terus melakukan reformasi struktural dengan memperbaiki iklim investasi melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Konsumsi pemerintah juga diperkirakan menguat didorong oleh berlanjutnya stimulus fiskal pada 2021 dan peningkatan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Sejalan dengan prakiraan tersebut, maka prospek LU *tradable* yakni Pertanian, LU Pertambangan, dan LU Industri Pengolahan diperkirakan membaik merespons perbaikan permintaan domestik dan eksternal sesuai karakteristik di masing-masing wilayah. Kinerja LU Konstruksi juga diperkirakan membaik seiring berlanjutnya proyek Pemerintah dan swasta yang sempat tertunda pada 2020. Secara spasial, perbaikan permintaan domestik dan kinerja eksternal diperkirakan terjadi di seluruh wilayah.

**Perbaikan ekonomi Sumatera pada 2021 akan ditopang oleh permintaan domestik dan sektor eksternal.** Program vaksinasi, peningkatan pendapatan, serta berlanjutnya program bantuan sosial diperkirakan menjadi faktor pendorong kinerja konsumsi swasta ke depan. Belanja Pemerintah juga diperkirakan meningkat seiring naiknya pagu APBD pada 2021. Dari sisi investasi, berbagai proyek infrastruktur Pemerintah, terutama JTTS, serta proyek

investasi swasta seperti pembangkit listrik, *smelter*, dan pabrik baru, akan menjadi pendorong utama seiring pulihnya kondisi ekonomi. Dari sisi ekspor, kinerja berbagai komoditas SDA seperti migas, karet, CPO, batu bara, timah, serta manufaktur seperti *pulp and paper* dan elektronik akan meningkat seiring naiknya permintaan global. Peningkatan kinerja dari sisi produksi terutama ditopang LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan terkait perbaikan ekspor CPO dan permintaan domestik termasuk biodiesel, serta LU Pertambangan khususnya batu bara dan timah. LU Konstruksi juga diperkirakan membaik sejalan dengan perbaikan investasi bangunan yang ditopang oleh Pemerintah dan swasta.

### **Prospek perbaikan ekonomi Jawa pada 2021 terutama didorong oleh naiknya kinerja permintaan domestik.**

Pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas serta berjalannya program vaksinasi diperkirakan mendukung perbaikan kinerja konsumsi swasta. Investasi diperkirakan turut meningkat didorong berlanjutnya investasi Pemerintah dan swasta, termasuk relokasi korporasi multinasional ke berbagai kawasan industri di Jawa. Kinerja sektor eksternal akan didorong ekspor komoditas manufaktur utama seperti otomotif, alas kaki, dan garmen diperkirakan naik secara gradual didukung perbaikan kondisi ekonomi mitra dagang utama. Impor juga diperkirakan tumbuh membaik untuk mendukung naiknya permintaan domestik, khususnya investasi. Dari sisi LU, kinerja industri pengolahan dan perdagangan diperkirakan menjadi penopang perbaikan pertumbuhan untuk memenuhi permintaan domestik dan eksternal untuk berbagai komoditas manufaktur Jawa. Kinerja LU konstruksi juga diperkirakan naik ditopang berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional dan proyek swasta yang sempat tertunda pada 2020.

### **Perekonomian Kalimantan diperkirakan membaik pada 2021, terutama didorong oleh kinerja sektor eksternal.**

Ekspor batu bara yang berkontraksi cukup dalam pada 2020 diperkirakan membaik seiring prospek permintaan Tiongkok yang meningkat. Selain itu, kinerja ekspor CPO diperkirakan turut melanjutkan perbaikan sejak akhir tahun 2020. Sementara itu dari sisi permintaan domestik, program vaksinasi akan meningkatkan ekspektasi konsumen dan mendorong konsumsi swasta ke depan. Proyek Pemerintah seperti jalan, jembatan, pelabuhan, kilang minyak, *food estate*, proyek kelistrikan, hingga infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara Baru (IKNB) diperkirakan turut menjadi penopang utama perbaikan investasi pada 2021. Sejalan dengan perbaikan kinerja ekspor dan permintaan domestik, kinerja LU Pertanian dan Industri Pengolahan turut meningkat terutama didukung ekspor CPO dan program B30. Sementara kinerja LU Pertambangan diperkirakan

didorong oleh prospek ekspor batu bara dan pemenuhan kebutuhan pembangkit listrik domestik. Selain itu, proyek hilirisasi batu bara yang sedang berlangsung juga diperkirakan mendorong kinerja LU Industri Pengolahan. Demikian halnya dengan proyek hilirisasi batu bara yang diperkirakan turut berkontribusi positif bagi kinerja LU Industri Pengolahan pada 2021. Berbagai proyek investasi Pemerintah juga diperkirakan turut mendorong kinerja LU Konstruksi ke depan.

**Permintaan domestik diperkirakan menopang perbaikan ekonomi Balinusra pada 2021 di tengah pemulihan kinerja sektor eksternal yang berlangsung secara gradual.** Vaksinasi diperkirakan mendorong optimisme masyarakat, meski perbaikan dari sisi pendapatan diperkirakan berjalan secara bertahap sejalan dengan pemulihan LU terkait pariwisata. Sementara itu, investasi diperkirakan membaik didukung berlanjutnya pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata serta proyek hilirisasi tembaga. Kinerja sektor eksternal diperkirakan berangsur-angsur pulih, terutama pada paruh kedua 2021 setelah pembukaan akses wisatawan mancanegara. Ekspor konsentrat tembaga terutama ke Tiongkok juga diperkirakan turut mendukung kinerja sektor eksternal pada 2021. Dari sisi produksi, LU terkait pariwisata khususnya Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum diperkirakan berangsur membaik seiring peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Sementara itu, kinerja LU Pertambangan, khususnya konsentrat tembaga diperkirakan tetap tumbuh positif didorong permintaan eksternal.

**Perekonomian Sulampua diperkirakan tumbuh tinggi dan turut menopang prospek pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021.** Perbaikan kinerja permintaan domestik serta kinerja sektor eksternal yang tetap kuat diperkirakan menopang kinerja pertumbuhan ekonomi Sulampua. Kinerja konsumsi swasta diperkirakan membaik sejalan dengan *progress* vaksinasi di wilayah tersebut. Investasi juga diperkirakan meningkat terutama didorong pembangunan proyek hilirisasi nikel lanjutan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara, serta pengembangan lebih lanjut tambang bawah tanah Papua. Kinerja ekspor besi baja diperkirakan tetap kuat sepanjang 2021, meskipun sedikit melambat karena *base effect* tingginya tambahan kapasitas produksi baru pada 2020. Sementara itu, impor juga diperkirakan meningkat terutama untuk mendukung investasi. Perbaikan produksi konsentrat tembaga sejak 2020 juga diperkirakan mendukung kuatnya ekspor pada 2021. Dari sisi LU, tingginya pertumbuhan ekonomi terutama didorong LU Industri Pengolahan dan Pertambangan. Masih berlangsung penambahan kapasitas produksi *existing* dibarengi kuatnya permintaan Tiongkok,

akan mendorong kinerja LU tersebut pada 2021. Lebih lanjut, perbaikan produksi dan pengembangan tambang bawah tanah konsentrat tembaga akan mendorong kinerja LU Pertambangan.

**Tekanan pada kinerja LU terkait pariwisata selama pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya intervensi kebijakan pemulihan pariwisata pada 2021 dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.** Pada tahun 2020, kinerja LU terkait pariwisata, terutama LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami tekanan yang sangat besar, sehingga turut berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kinerja konsumsi rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan daerah yang bergantung pada LU tersebut, terutama Bali, mengalami proses pemulihan yang paling lambat dibandingkan daerah-daerah lainnya pada paruh kedua 2020. Untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi daerah-daerah tersebut, dibutuhkan intervensi kebijakan dalam mendorong kinerja LU terkait pariwisata, termasuk melalui mendorong pariwisata dalam negeri. Upaya-upaya pemulihan pariwisata nasional akan diulas lebih lanjut pada bagian akhir publikasi Laporan Nusantara kali ini sebagai isu strategis, yakni "*Mendorong Pemulihan Pariwisata di Era Adaptasi Kebiasaan Baru*".

### *Prospek Inflasi 2021*

**Inflasi IHK pada 2021 diperkirakan meningkat kembali dalam rentang sasaran inflasi 3,0%±1% di seluruh wilayah.** Inflasi inti pada 2021 diperkirakan tetap terkendali sejalan dengan ekspektasi yang tetap terjangkau dalam rentang sasaran, meskipun akan meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan peningkatan mobilitas didukung program vaksinasi oleh pemerintah. Tekanan inflasi pada tahun 2021 juga diperkirakan turut dipengaruhi penyesuaian harga yang akan dilakukan oleh pelaku usaha pasca pemberlakuan berbagai pembatasan aktivitas ekonomi pada tahun sebelumnya, di tengah tekanan eksternal yang terjaga seiring nilai tukar yang sesuai dengan fundamentalnya. Inflasi VF diperkirakan tetap terkendali didukung oleh kondisi cuaca yang kondusif untuk produksi sehingga akan mendukung kesinambungan pasokan pangan, meski risiko kenaikan pada pertengahan hingga akhir tahun perlu tetap diwaspadai. Sementara prospek inflasi AP juga diperkirakan meningkat sejalan perbaikan mobilitas yang akan mendorong kenaikan tarif angkutan.

**Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah.** Sinergi kebijakan melalui TPIP di tingkat pusat dan TPID di tingkat daerah akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi IHK sesuai kisaran targetnya, guna mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan berjalannya proses transisi pemulihan

ekonomi. Strategi pengendalian inflasi, khususnya inflasi VF, akan berfokus pada berbagai upaya mengatasi isu struktural untuk meningkatkan kesinambungan pasokan sepanjang waktu (disparitas antarwaktu), kelancaran distribusi antar daerah (disparitas antardaerah), serta efisiensi rantai distribusi. Upaya dimaksud antara lain dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi di sisi produksi dan pemasaran serta penguatan/perluasan kerja sama antardaerah.

*"Halaman ini sengaja dikosongkan"*

## BAGIAN 2

### Perekonomian Sumatera

*Perekonomian Sumatera pada triwulan IV 2020 kembali melanjutkan pola perbaikan dari triwulan sebelumnya meski masih mengalami kontraksi. Perbaikan kinerja eksternal menjadi penopang utama proses pemulihan ekonomi, ditandai dengan kontribusi positif net ekspor yang semakin kuat, sementara perbaikan permintaan domestik masih tertahan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), proses perbaikan ekonomi ditopang oleh LU Pertanian, LU Industri Pengolahan, dan LU Perdagangan. Dengan capaian kinerja triwulan IV 2020 tersebut, secara keseluruhan tahun ekonomi Sumatera mengalami kontraksi 1,19% dibandingkan 2019.*

*Tekanan inflasi Sumatera pada triwulan IV 2020 mulai mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama disebabkan oleh gangguan pasokan pangan akibat kondisi cuaca yang kurang baik sesuai pola historisnya. Namun, secara keseluruhan tekanan inflasi sepanjang 2020 masih rendah sejalan dengan terbatasnya tekanan permintaan domestik akibat mobilitas masyarakat yang menurun. Di sisi lain, kondisi pasokan secara umum pada 2020 relatif terjaga dengan baik. Selain itu, sejumlah kebijakan Pemerintah untuk menurunkan biaya energi pada 2020 turut berkontribusi pada rendahnya inflasi wilayah ini.*

*Ke depan, proses perbaikan ekonomi Sumatera pada 2021 akan berlanjut secara bertahap. Dari sisi eksternal, perbaikan kinerja ekspor produk utama yang telah terjadi sejak paruh kedua 2020 akan terus berlanjut, sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia yang akan mendorong kenaikan permintaan negara mitra dagang. Sementara dari sisi domestik, perbaikan konsumsi akan semakin kuat pascaprogram vaksinasi Pemerintah dilakukan secara masif kepada masyarakat luas. Selain itu, perbaikan permintaan domestik juga akan ditopang investasi Pemerintah melalui berbagai proyek infrastruktur dan rencana investasi korporasi yang bergeser ke 2021 sebagai dampak pandemi. Demikian halnya dengan konsumsi Pemerintah yang diperkirakan juga membaik. Perbaikan permintaan domestik tersebut akan mendorong kenaikan inflasi pada 2021, meski akan tetap terjaga dalam kisaran sasaran. Dalam rangka memastikan inflasi tetap berada dalam sasarnya, TPID di seluruh daerah akan terus memperkuat sinergi kebijakan dan telah merumuskan berbagai program strategis selama 2021.*

**Perekonomian Sumatera membaik pada triwulan IV 2020 meski masih mengalami kontraksi, terutama ditopang oleh kinerja net ekspor (Tabel II.1)<sup>2</sup>.** Peningkatan ekspor luar negeri didukung oleh kenaikan permintaan dari negara mitra dagang untuk berbagai komoditas ekspor utama seperti CPO, karet, kopi, kertas, serta batu bara. Selain ekspor luar negeri, keberlanjutan program biodiesel (B30) juga menopang pertumbuhan ekspor antardaerah di Sumatera. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih tertahan sejalan dengan penambahan kasus positif COVID-19 selama periode akhir tahun. Hal ini menyebabkan aktivitas masyarakat di luar rumah menjadi tertahan, terutama pada periode liburan akhir tahun. Investasi juga belum optimal karena turunnya pagu anggaran belanja modal Pemerintah Daerah dan pengerjaan beberapa proyek yang telah memasuki tahap penyelesaian akhir.

**Dari sisi LU, perbaikan ekonomi pada triwulan IV 2020 terutama ditopang oleh perbaikan kinerja LU Pertanian,**

**LU Industri Pengolahan, dan LU Perdagangan.** LU Pertanian tumbuh lebih baik didorong oleh panen raya komoditas tanaman bahan makanan seperti di Sumbar, Jambi, Sumsel, dan Babel. LU Industri Pengolahan juga mulai tumbuh positif terutama karena meningkatnya permintaan dari eksternal untuk produk industri CPO dan turunannya (Sumut, Sumbar, Lampung). Sementara itu, LU Perdagangan mengalami perbaikan kinerja, meski masih terkontraksi, seiring dengan perbaikan aktivitas perdagangan barang untuk ekspor dan impor.

**Pola perbaikan ekonomi selama semester II 2020, menahan kontraksi lebih dalam ekonomi Sumatera untuk keseluruhan tahun 2020.** Penurunan kinerja perekonomian sepanjang 2020, terutama dipengaruhi oleh tekanan pada permintaan domestik akibat kinerja konsumsi yang melemah karena mobilitas masyarakat yang terbatas. Kinerja investasi juga terkontraksi akibat dilakukannya penyesuaian target penyelesaian sejumlah proyek, termasuk pada proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang tidak setinggi

<sup>2</sup> Cakupan asesmen wilayah Sumatera terdiri dari 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Kepulauan Riau (Kepri), Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dan Lampung.

tahun 2019. Hal ini terutama dipengaruhi upaya *refocusing* anggaran Pemerintah untuk penanganan COVID-19. Penurunan permintaan domestik tersebut mengakibatkan impor turun lebih dalam, sehingga net ekspor masih dapat memberikan kontribusi positif. Sejalan dengan perlambatan net ekspor, kinerja LU *tradable* Sumatera mengalami tekanan, khususnya pada LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan. Sementara LU Perdagangan dan LU Konstruksi juga berkontraksi sejalan dengan penurunan konsumsi dan investasi.

**Tabel II.1.** Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Sumatera (% yoy)

Provinsi	2018	2019				2019	2020				2020
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Aceh	4,61	3,84	3,65	3,71	5,33	4,14	3,45	-1,60	-0,10	-2,99	-0,37
Sumatera Utara	5,18	5,31	5,25	5,11	5,21	5,22	4,25	-2,77	-2,60	-2,94	-1,07
Sumatera Barat	5,14	4,81	5,00	5,13	5,09	5,01	3,89	-4,92	-2,91	-2,23	-1,60
Riau	2,35	2,98	2,84	2,77	2,66	2,81	2,11	-3,32	-1,74	-1,47	-1,12
Kep. Riau	4,47	4,77	4,63	4,92	5,02	4,84	2,02	-6,81	-5,81	-4,46	-3,80
Bengkulu	4,97	5,04	5,01	4,98	4,73	4,94	3,65	-0,74	-0,46	-2,39	-0,02
Jambi	4,69	4,56	5,06	4,48	3,41	4,37	1,97	-1,91	-0,85	-0,99	-0,46
Sumatera Selatan	6,01	5,67	5,79	5,66	5,65	5,69	4,01	-1,58	-1,43	-1,21	-0,11
Kep. Bangka Belitung	4,45	2,84	3,43	3,01	3,98	3,32	1,36	-4,95	-4,37	-1,04	-2,30
Lampung	5,23	5,19	5,60	5,14	5,11	5,26	1,74	-3,58	-2,41	-2,26	-1,67
<b>Sumatera</b>	<b>4,52</b>	<b>4,57</b>	<b>4,63</b>	<b>4,50</b>	<b>4,53</b>	<b>4,55</b>	<b>3,02</b>	<b>-3,17</b>	<b>-2,26</b>	<b>-2,21</b>	<b>-1,19</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

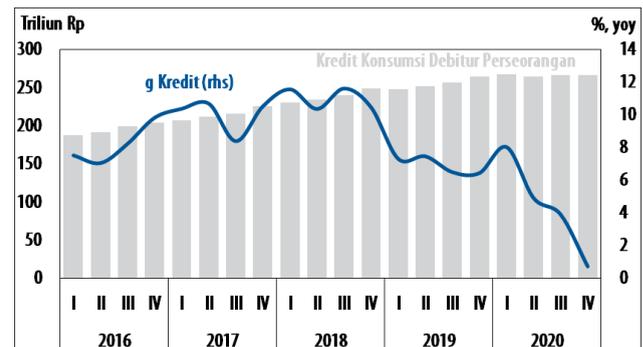
## Kinerja Sisi Penggunaan

### Konsumsi Swasta

**Pemulihan konsumsi swasta pada triwulan IV 2020 kembali tertahan seiring masih terbatasnya aktivitas masyarakat di berbagai daerah.** Perkembangan kasus COVID-19 yang masih meningkat menahan perbaikan mobilitas yang berdampak pada tertahannya pemulihan konsumsi. Selain itu dorongan konsumsi pada periode libur akhir tahun tidak sebesar pola historis akibat kebijakan pembatasan untuk mitigasi penyebaran COVID-19, termasuk larangan untuk melakukan acara pergantian tahun. Perlambatan lebih dalam konsumsi swasta tertahan oleh konsumsi lembaga nonprofit sejalan dengan peningkatan aktivitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di sejumlah daerah. Tekanan konsumsi swasta, khususnya rumah tangga tercermin dari kontraksi kredit konsumsi untuk debitur perseorangan (Grafik II.1), dan indeks keyakinan konsumen berdasarkan survei Bank Indonesia (Grafik II.2).

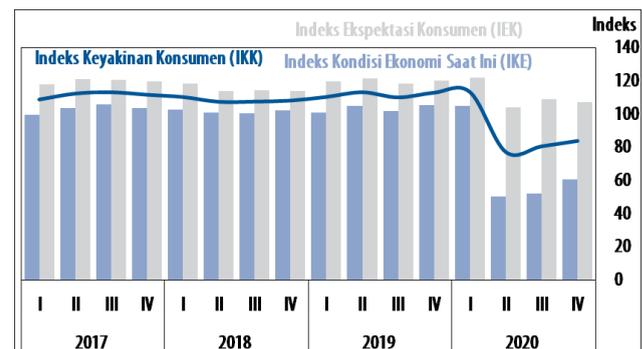
**Secara keseluruhan 2020, konsumsi swasta mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebagai dampak dari pandemi COVID-19.** Berbagai upaya untuk mitigasi penyebaran COVID-19 terutama melalui pembatasan mobilitas dan operasional kegiatan usaha, mengakibatkan penurunan permintaan yang cukup signifikan pada sektor ritel. Hal ini kemudian memberikan dampak lanjutan pada berkurangnya jumlah orang bekerja dan pendapatan masyarakat. Beberapa pelaku usaha terpaksa mengambil kebijakan *unpaid leave*, PHK, serta

penyesuaian jumlah gaji, tunjangan, dan insentif terhadap para karyawan untuk mengurangi beban biaya operasional. Dengan kondisi ini, pendapatan dan daya beli masyarakat menurun sehingga permintaan konsumsi mencatat kontraksi sepanjang tahun 2020. Selain itu, kebijakan untuk meminimalkan pergerakan orang selama periode libur, seperti saat perayaan Idul Fitri maupun liburan sekolah juga semakin menekan kinerja konsumsi. Secara spasial, penurunan konsumsi swasta terjadi di seluruh provinsi, dengan yang terdalam terjadi di Sumut, diikuti Riau, Sumsel, dan Lampung.



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), diolah

**Grafik II.1.** Kredit Perseorangan untuk Keperluan Konsumsi



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

**Grafik II.2.** Indeks Keyakinan Konsumen

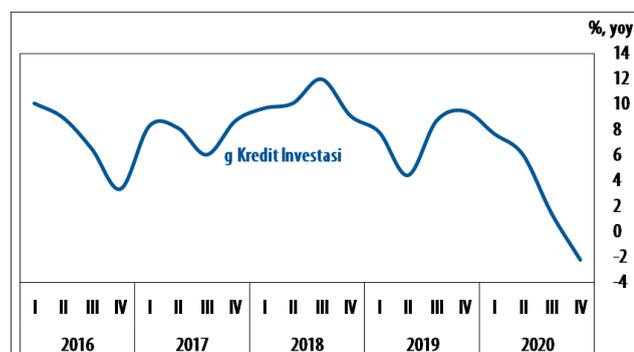
### Konsumsi Pemerintah

**Konsumsi pemerintah juga kembali tertekan pada triwulan IV 2020 sehingga berkontraksi lebih dalam.** Kontraksi yang terjadi ini dipengaruhi upaya percepatan realisasi untuk penanganan COVID-19 yang terutama telah dilakukan pada triwulan sebelumnya. Selain itu, sumber penerimaan fiskal daerah pada 2020 juga tidak setinggi tahun sebelumnya karena *refocusing* dan relokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan pada Tw II 2020. Meski demikian, beberapa daerah tercatat masih mengalami perbaikan konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2020 karena peningkatan realisasi belanja bansos serta belanja hibah yang baru dilakukan triwulan terakhir 2020, seperti di Sumut, Riau dan Bengkulu. Dengan perkembangan pada triwulan IV tersebut, maka peran konsumsi pemerintah secara kumulatif pada 2020 terbatas. Sumber penerimaan fiskal daerah yang menurun baik

transfer dari Pemerintah Pusat maupun pendapatan daerah, mengakibatkan ruang gerak stimulus fiskal daerah menjadi terbatas sepanjang 2020. Dampaknya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 menjadi lebih rendah, antara lain pada komponen belanja pegawai dan belanja barang.

### Investasi

**Kinerja investasi masih mengalami tekanan hingga triwulan IV 2020, terutama dipengaruhi kinerja investasi bangunan pemerintah.** Meski pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tetap berjalan, target nilai investasi JTTS pada 2020 turun hingga sekitar -40% dibanding target awal. Penurunan pagu belanja modal Pemda di seluruh daerah juga menyebabkan realisasi proyek fisik pada triwulan IV relatif lebih rendah dari pola normal. Selain itu, terdapat sejumlah proyek yang memang telah memasuki tahap penyelesaian akhir. Dari sisi swasta, investasi tertahan karena belum optimalnya kinerja penjualan dan *cash flow* perusahaan. Namun, perlambatan investasi lebih dalam tertahan oleh masih berlangsungnya beberapa proyek pembangkit antara lain di Sumsel dan Bintan, serta Riau. Penurunan investasi terkonfirmasi dari perkembangan kredit investasi yang masih cenderung menurun (Grafik II.3). Secara keseluruhan tahun, kinerja investasi pada 2020 menurun akibat penundaan sejumlah rencana investasi Pemerintah maupun swasta. Selain itu, proses pembangunan berbagai proyek juga sempat terkendala dari sisi logistik maupun mobilitas tenaga kerja terutama pada awal periode mulai terjadinya pandemi.



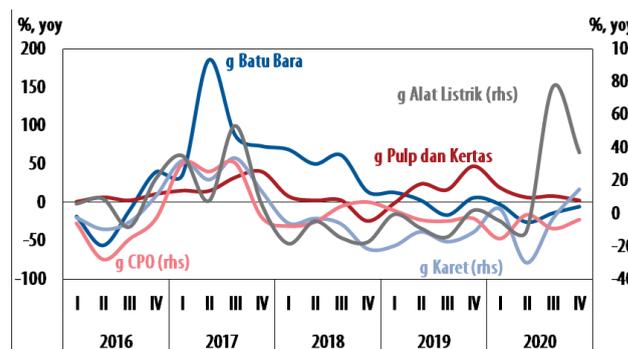
Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), diolah

Grafik II.3. Kredit Investasi

### Net Ekspor Barang dan Jasa<sup>3</sup>

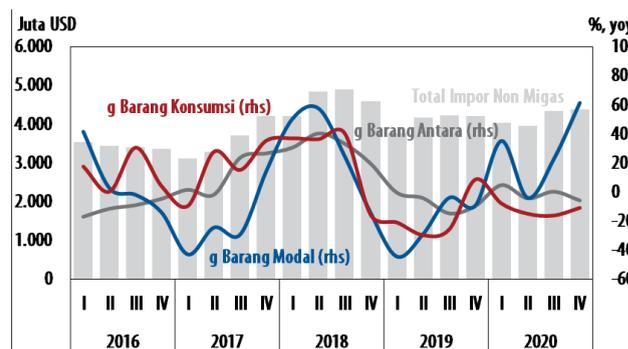
**Kontribusi net ekspor pada triwulan IV 2020 menjadi penopang utama perbaikan ekonomi, didorong oleh perbaikan ekspor yang lebih tinggi dari impor.** Beberapa ekspor komoditas utama Sumatera mencatat perbaikan pada akhir tahun seiring menguatnya permintaan dari negara mitra dagang (Grafik II.4). Ekspor CPO dan karet dari

Sumbang, Riau, Sumsel, Lampung membaik didukung harga yang berada dalam tren meningkat dan menguatnya permintaan Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Jepang. Ekspor kopi dari Aceh dan Lampung serta produk turunan CPO di Riau juga mengalami akselerasi seiring naiknya permintaan importir luar negeri. Selain ekspor luar negeri, ekspor antardaerah juga tetap berkinerja baik seiring dengan kelanjutan dari program biodiesel. Di sisi lain, impor luar negeri secara perlahan dalam tren meningkat meski relatif lambat (Grafik II.5).



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik II.4. Volume Ekspor Non-Migas Komoditas Utama



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik II.5. Nominal Impor Non-Migas Menurut Kategori

**Secara keseluruhan tahun 2020, kontribusi net ekspor relatif stabil dan masih positif.** Penurunan permintaan domestik mengakibatkan kebutuhan impor yang lebih rendah sepanjang 2020. Di sisi lain, nilai ekspor barang non migas Sumatera pada 2020 justru tumbuh positif dibandingkan 2019, terutama didorong kenaikan ekspor CPO ke India dan Pakistan sejalan dengan kenaikan harga dan ketegangan hubungan Malaysia – India yang sempat terjadi sehingga mengakibatkan realokasi order ke Indonesia pada awal 2020. Ekspor Sumatera pada 2020 juga didorong oleh produk alat telekomunikasi ke AS meski cenderung menurun pada triwulan terakhir. Selain ekspor luar negeri, kontribusi positif juga bersumber dari implementasi program B30 sehingga menopang kinerja ekspor antardaerah. Namun, kinerja ekspor Sumatera pada

<sup>3</sup> Wilayah Sumatera memiliki nominal net ekspor (total ekspor dikurangi impor) yang positif pada triwulan IV 2020.

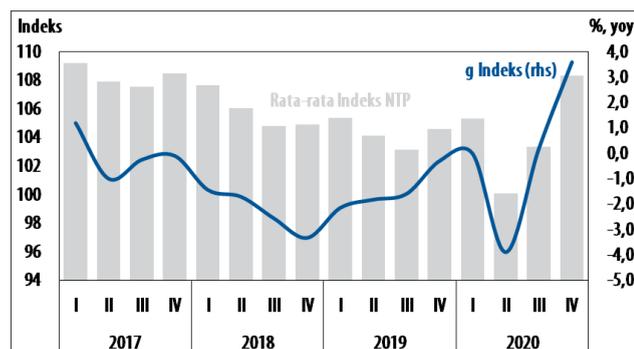
2020 tertahan oleh kontraksi ekspor jasa dari pariwisata *cross border* yang menurun drastis.

## Kinerja Lapangan Usaha

### Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

**LU Pertanian tumbuh lebih tinggi pada triwulan IV 2020, terutama didorong perbaikan produktivitas tanaman perkebunan dan tanaman bahan makanan (tabama).**

Peningkatan produktivitas didukung cuaca yang kondusif serta panen raya di beberapa daerah. Produksi sawit dan karet mengalami akselerasi antara lain di Jambi, Sumsel, Babel, karena dampak kemarau basah serta rendahnya kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2020 dibanding akhir 2019. Membaiknya kinerja LU pertanian juga didukung berlangsungnya musim panen tabama, khususnya padi di beberapa daerah sentra produksi seperti di Sumbar, Jambi, dan Sumsel. Akselerasi LU Pertanian tersebut tercermin dari indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang tumbuh meningkat pada periode triwulan laporan (Grafik II.6). Dari sisi korporasi, kinerja keuangan korporasi pertanian (publik) pada triwulan IV 2020 tetap kuat, ditopang perbaikan kinerja korporasi sawit seiring berlanjutnya tren apresiasi harga CPO. Hal ini tercermin dari *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) yang meningkat secara positif (Grafik II.8). Perbaikan profitabilitas berdampak pada meningkatnya kemampuan membayar utang sejalan dengan kenaikan *debt service coverage ratio* (DSCR) serta *interest coverage ratio* (ICR) yang berada di atas *threshold* 1,50. Meski demikian, pertumbuhan belanja modal masih terkontraksi cukup dalam dipengaruhi ekspektasi korporasi terhadap ketidakpastian ekonomi yang masih tinggi.

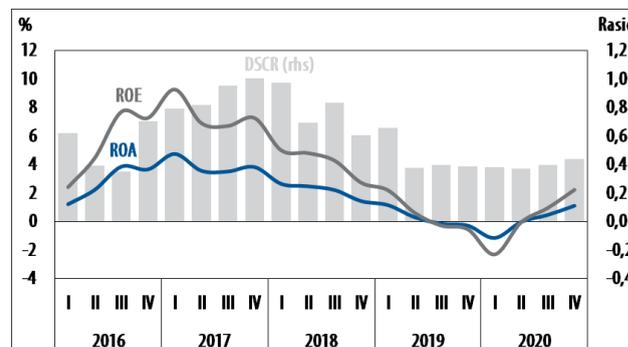


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik II.6. Nilai Tukar Petani

**Secara keseluruhan tahun 2020, LU Pertanian masih tumbuh positif meski tidak setinggi 2019.** Melambatnya pertumbuhan LU pertanian, terutama akibat produktivitas hasil perkebunan (TBS dan karet) yang menurun akibat dampak kebakaran lahan dan kemarau panjang 2019, terutama di Riau, Jambi, serta Sumsel. Selain itu,

menurunnya produktivitas juga merupakan dampak dari tidak optimalnya perawatan tanaman dan keterbatasan pemupukan akibat harga komoditas yang rendah pada tahun sebelumnya (Jambi, Sumut). Penurunan aktivitas industri hilir di luar negeri juga menekan permintaan komoditas karet. Lebih lanjut melemahnya permintaan domestik juga mengakibatkan produksi hortikultura, peternakan, dan perikanan tidak optimal sejalan dengan terbatasnya produksi industri makanan.



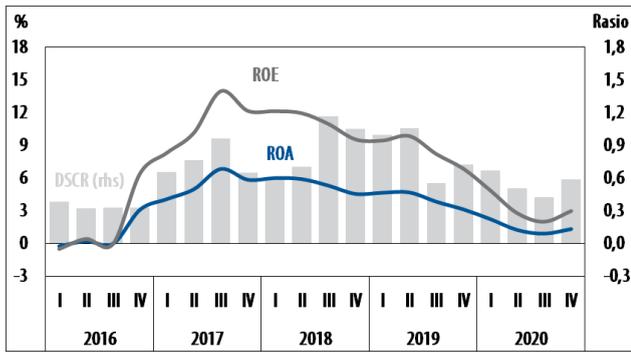
Sumber: Bloomberg (data sementara), diolah

Grafik II.7. Rasio Keuangan Korporasi Publik Usaha Pertanian di Sumatera

### Pertambangan dan Pengalihan

**LU Pertambangan masih mengalami tekanan hingga triwulan IV 2020.** Kinerja pertambangan yang menurun ini terutama dipengaruhi tekanan pada pertambangan batubara dan migas. Penurunan konsumsi listrik domestik berdampak pada permintaan batubara untuk memasok pembangkit tidak setinggi pola historis. Kontraksi juga terjadi akibat rendahnya capaian *lifting* minyak dan gas bumi (migas)<sup>4</sup> yang disertai penurunan harga minyak dan *liquefied natural gas* (LNG). Lebih lanjut, penurunan LU pertambangan juga disebabkan oleh aktivitas konstruksi proyek fisik di berbagai daerah yang rendah sehingga menekan kinerja tambang bahan galian mineral lainnya (Sumsel) maupun galian pasir (Lampung). Dengan perkembangan triwulan IV tersebut, maka secara keseluruhan 2020, LU Pertambangan mengalami kontraksi. Hal ini tercermin dari kinerja korporasi pertambangan yang cenderung melemah, meski terdapat indikasi perbaikan di akhir periode 2020. Meskipun rasio profitabilitas korporasi tambang pada triwulan IV 2020 mulai membaik, kemampuan membayar utang dan beban keuangan (DSCR dan ICR) secara umum berada di bawah *threshold* (1,50) (Grafik II.8). Rendahnya harga komoditas tambang dan terbatasnya permintaan mengakibatkan korporasi mengurangi porsi utangnya (*deleveraging*) sehingga total utang korporasi mengalami kontraksi.

<sup>4</sup> Sumber: data SKK Migas (data dari empat titik *lifting* di Riau)

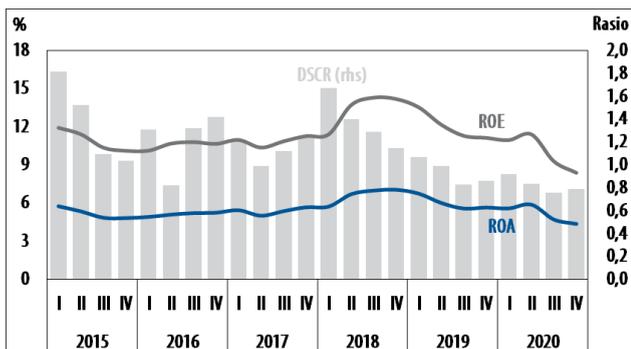


Sumber: Bloomberg (data sementara), diolah

**Grafik II.8.** Rasio Keuangan Korporasi Publik Usaha Pertambangan di Sumatera

## Industri Pengolahan

**Kinerja LU Industri Pengolahan terus membaik pada triwulan IV 2020 dan mulai tumbuh positif.** Perbaikan ditopang oleh peningkatan produksi CPO dan turunannya, sejalan dengan peningkatan permintaan dari beberapa negara mitra dagang utama (Sumut, Sumbar, Lampung). Program B30 yang juga terus berlanjut juga menjadi salah satu penopang pertumbuhan LU Industri Pengolahan. Sementara itu, permintaan terhadap berbagai produk elektronik (Kepri), khususnya *parts* komputer, dan logam timah (Babel) juga membaik seiring dengan peningkatan aktivitas manufaktur di negara tujuan ekspor. Perbaikan tersebut sejalan dengan terjaganya kinerja keuangan korporasi industri. Dari sisi korporasi, likuiditas jangka pendek serta kemampuan bayar korporasi industri pada triwulan IV 2020 membaik dan tetap terjaga. Meskipun demikian, indikator profitabilitas (ROA dan ROE) cenderung sedikit melambat (Grafik II.9).



Sumber: Bloomberg (data sementara), diolah

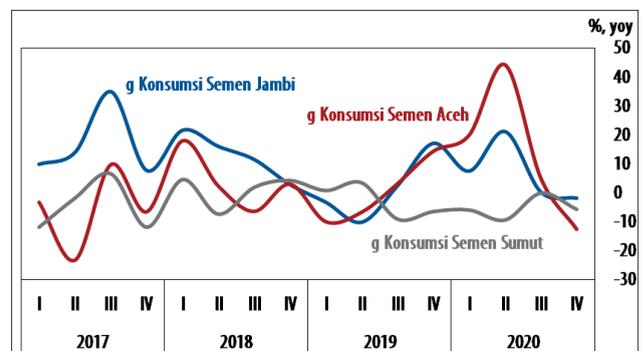
**Grafik II.9.** Rasio Keuangan Korporasi Publik Usaha Industri Pengolahan di Sumatera

**Secara keseluruhan tahun, LU Industri Pengolahan masih dapat tumbuh positif meski melambat dibandingkan 2019.** Permintaan domestik yang secara umum melemah di seluruh daerah dan pengurangan aktivitas operasional juga membuat kinerja industri mengalami perlambatan, terutama pada industri makanan dan minuman serta barang rumah tangga. Selain itu permintaan eksternal terhadap produk *pulp* dan *waste paper*

juga mengalami tekanan. Namun, perlambatan lebih dalam tertahan oleh kinerja industri turunan sawit di Riau, seiring tetap kuatnya permintaan eksternal terutama dari India dan Pakistan, dan permintaan domestik terkait program B30. Selain itu, industri komponen elektronik di Kepri juga konsisten mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2020.

## Konstruksi

**LU Konstruksi masih mengalami tekanan, seiring aktivitas investasi bangunan yang masih lemah.** Hal ini tercermin dari target konstruksi JTTS yang mengalami penurunan seiring realokasi anggaran dan kendala operasional yang terjadi selama pandemi. Selain itu, proyek non-prioritas yang bersumber dari APBD di seluruh provinsi juga tertunda akibat *refocusing* anggaran. Di sisi swasta, pelaku usaha masih cenderung *wait and see* akibat ketidakpastian kondisi perekonomian. Pembangunan properti residensial serta bangunan terkait pariwisata (hotel dan pusat perbelanjaan) mengalami penundaan selama tahun 2020 (Sumut, Kepri). Pandemi COVID-19 juga menyebabkan realisasi beberapa proyek *multiyears* swasta seperti *smelter* (Sumut, Babel) dan pembangkit listrik (Sumsel) tidak optimal. Perkembangan kinerja LU konstruksi yang masih tertekan terindikasi dari konsumsi semen di beberapa daerah yang belum menunjukkan perbaikan pada triwulan laporan (Grafik II.10). Dengan perkembangan tersebut, maka kinerja LU Konstruksi untuk keseluruhan tahun 2020 mengalami kontraksi.



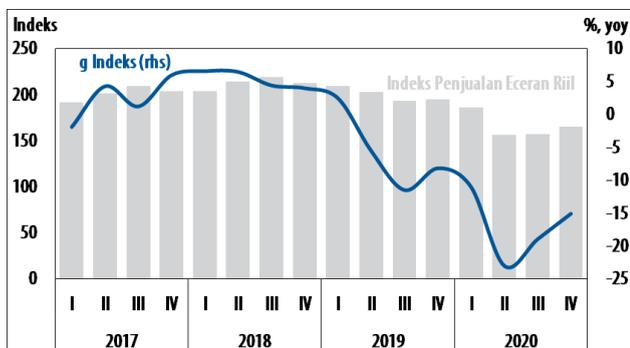
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

**Grafik II.10.** Konsumsi Semen

## Perdagangan

**Tekanan kinerja LU Perdagangan membaik pada triwulan IV 2020 sejalan dengan kinerja ekspor.** Pendorong utama perbaikan LU perdagangan terutama karena meningkatnya kegiatan perdagangan besar di berbagai daerah untuk barang yang berorientasi ekspor (CPO dan turunannya, karet, kopi, kertas, batu bara). Selain itu, Pilkada serentak yang diadakan pada akhir tahun juga turut mendorong belanja barang tekstil dan berbahan kertas untuk kebutuhan kampanye. Di sisi lain, dorongan momen perayaan Natal, Maulid Nabi (khusus di Aceh), serta tahun baru terhadap kinerja LU perdagangan tidak sekuat

historisnya. Perbaikan LU Perdagangan tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia (Grafik II.11). Secara keseluruhan tahun 2020, LU Perdagangan mengalami kontraksi seiring melemahnya permintaan domestik di seluruh provinsi, termasuk aktivitas pariwisata, terutama pada periode triwulan II 2020.



Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (Kota Medan)

Grafik II.11. Indeks Penjualan Eceran Riil

## Fiskal Daerah

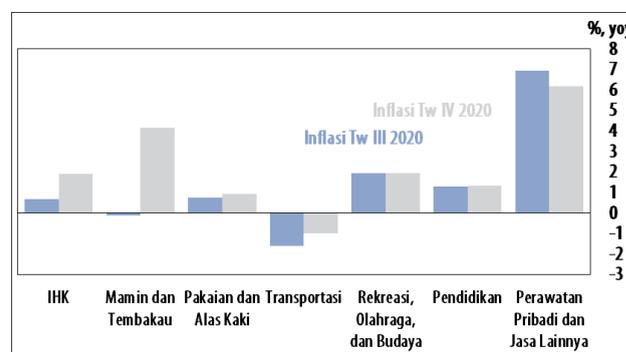
**Peran fiskal daerah terbatas selama 2020 dipengaruhi penurunan sumber penerimaan, baik dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah.** Realisasi TKDD di Sumatera hingga Desember 2020 mencapai Rp204,36 triliun atau turun sebesar 6,41% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta Dana Bagi Hasil (DBH). Secara umum, penurunan terjadi karena revisi pagu TKDD seiring *refocusing* dan realokasi untuk penanganan COVID-19 yang tersentralisasi. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga triwulan IV 2020 juga lebih rendah dari capaian 2019. Realisasi PAD di Sumatera tercatat Rp43,21 triliun atau turun 11,45% dibanding tahun 2019 (Rp48,80 triliun). Menurut komponennya, penurunan PAD paling dalam terjadi pada penerimaan pajak daerah, terutama realisasi pajak dan retribusi dari usaha pariwisata (hotel, restoran, dan hiburan), serta realisasi Pajak Kendaraan Baru (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKBN) akibat turunnya pembelian kendaraan bermotor.

**Sejalan dengan menurunnya pendapatan, realisasi belanja APBD Sumatera hingga akhir tahun 2020 tercatat menurun dibandingkan dengan 2019.** Realisasi belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp246,50 triliun, turun 15,06% dari Rp290,21 triliun pada 2019. Penurunan realisasi belanja APBD terdapat di Bengkulu, diikuti Kepri, Sumut, Sumsel, dan Aceh. Dengan penurunan pendapatan, maka Pemda di berbagai daerah melakukan berbagai penyesuaian belanja, termasuk penundaan proyek non-prioritas dari komponen belanja modal serta pemangkasan belanja barang dan jasa, pemotongan gaji dan pembatasan dinas pada komponen belanja pegawai yang dialihkan

untuk penanganan pandemi. Dampaknya penyerapan realisasi belanja daerah keseluruhan tahun 2020 tercatat 92,94%, lebih rendah dari 96,02% pada 2019.

## Perkembangan Inflasi Daerah

**Realisasi inflasi di Sumatera pada triwulan IV 2020 meningkat akibat kenaikan harga beberapa komoditas pangan.** Inflasi pada akhir triwulan IV tercatat 1,90% (yoy), meningkat dari 0,66% (yoy) pada triwulan III 2019. Kenaikan inflasi tersebut terutama didorong naiknya tekanan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau (Grafik II.12), khususnya komoditas hortikultura di Aceh, Kepri, Babel, dan Lampung. Hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan akibat La Nina yang mengganggu produksi dan pemenuhan pasokan ditengah permintaan yang relatif mengalami peningkatan pada periode HBKN akhir tahun.



Sumber: BPS (tahun dasar 2018 = 100), diolah

Grafik II.12. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Tabel II.2. Inflasi Daerah di Sumatera (% yoy)

Provinsi	2018				2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Aceh	3,90	3,94	2,33	1,84	1,82	2,73	2,51	1,69	3,85	1,36	1,89	3,59
Sumatera Utara	3,91	3,36	1,63	1,22	1,05	5,87	4,47	2,33	1,81	-0,09	0,31	1,96
Sumatera Barat	2,33	3,17	2,69	2,60	1,94	3,61	3,53	1,67	2,09	0,18	0,16	2,11
Riau	3,62	3,32	2,46	2,45	1,30	3,41	4,02	2,36	2,01	1,14	1,14	2,42
Kep. Riau	5,05	4,06	3,18	3,47	2,71	3,16	2,82	2,03	1,09	0,25	0,09	1,18
Bengkulu	3,18	3,77	2,87	2,35	1,65	2,69	3,40	2,91	2,42	0,87	0,45	0,88
Jambi	4,17	4,23	3,34	2,97	1,89	2,60	3,11	1,40	2,61	0,47	0,99	3,01
Sumatera Selatan	3,35	2,93	2,60	2,74	1,66	2,14	2,74	2,06	3,15	1,72	1,01	1,55
Kep. Bangka Belitung	3,01	2,55	3,46	3,19	2,72	3,69	4,26	2,62	1,82	0,20	-0,36	1,08
Lampung	3,23	2,80	2,87	2,73	1,49	2,76	3,59	3,44	3,22	1,42	1,35	2,00
<b>Sumatera</b>	<b>3,70</b>	<b>3,38</b>	<b>2,52</b>	<b>2,40</b>	<b>1,67</b>	<b>3,66</b>	<b>3,56</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>0,69</b>	<b>0,66</b>	<b>1,90</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Secara keseluruhan tahun, realisasi inflasi Sumatera pada 2020 tercatat rendah dan berada dibawah rentang sasaran inflasi.** Rendahnya inflasi dipengaruhi oleh penurunan kinerja ekonomi domestik akibat permintaan yang menurun selama pandemi COVID-19. Lebih lanjut, penurunan inflasi pada 2020 juga dipengaruhi kebijakan penyesuaian tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat dan penurunan harga tiket pesawat. Secara spasial, penurunan inflasi terjadi pada hampir seluruh provinsi, kecuali Aceh. Lebih tingginya inflasi di Aceh terutama karena tekanan kenaikan inflasi VF yang lebih tinggi, dipicu harga komoditas ikan akibat tingginya gelombang laut yang menyebabkan pasokan terganggu (Tabel II.2).

## Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

### Sistem Pembayaran Non-tunai

Sejalan dengan kondisi ekonomi yang mulai membaik, kontraksi volume transaksi nontunai melalui kliring juga membaik. Volume transaksi kliring masih mengalami kontraksi sebesar -8,85% (yoy) pada triwulan laporan, lebih baik dari kontraksi sebesar -11,06% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik II.13). Secara spasial, perbaikan transaksi tersebut terjadi di hampir seluruh provinsi, terutama di Sumut, Riau, Kepri, Sumsel, dan Lampung. Di sisi lain, perbaikan transaksi kliring secara nominal relatif masih tertahan dengan kontraksi sebesar -7,39% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dari -5,45% (yoy) pada triwulan sebelumnya.



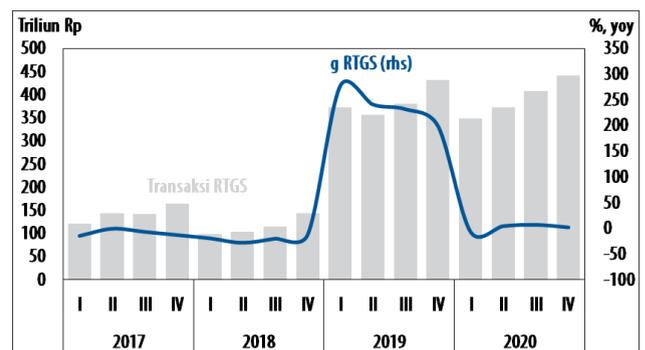
Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.13. Nominal Transaksi Kliring Sumatera

Sejalan dengan transaksi kliring, volume transaksi **Real Time Gross Settlement (RTGS)** juga membaik pada triwulan IV 2020. Transaksi RTGS secara nominal selama triwulan IV 2020 tercatat tumbuh 31,06% (yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,84% (yoy) (Grafik II.14). Secara spasial, peningkatan pertumbuhan terjadi terutama di Sumut, Riau, Kepri, Jambi, dan Babel. Perkembangan positif dari sisi transaksi bernilai besar ini turut mengkonfirmasi arah perbaikan ekonomi Sumatera pada periode akhir tahun. Meski volume transaksi meningkat, nominal transaksi RTGS masih tumbuh melambat menjadi 2,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan 7,31 (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Perkembangan aktivitas transaksi nontunai juga tercermin dari transaksi melalui kartu kredit oleh masyarakat. Sejalan dengan konsumsi yang masih lemah, transaksi kartu kredit juga masih mengalami tekanan. Penggunaan kartu kredit (*outstanding*) membukukan kontraksi sebesar -16,76% (yoy), lebih dalam dari -6,77% (yoy) pada triwulan III 2020 (Grafik II.15). Berbeda dengan pola siklikalnya yang cenderung meningkat tinggi pada akhir tahun, *outstanding* kartu kredit justru menurun pada triwulan IV 2020. Penurunan ini sejalan dengan perbaikan

konsumsi yang masih tertahan meski selama periode liburan akhir tahun.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.14. Nominal Transaksi RTGS Sumatera



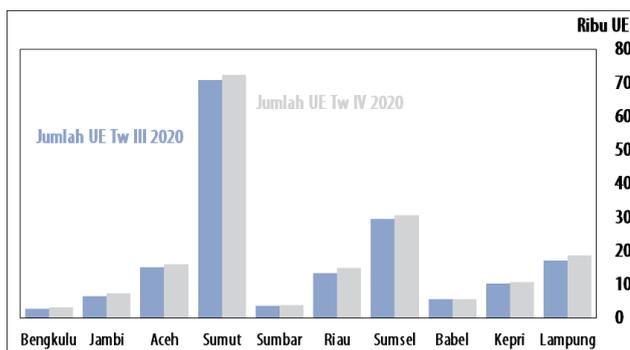
Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), diolah

Grafik II.15. Outstanding Nominal Kartu Kredit

Di sisi lain, penggunaan instrumen pembayaran non tunai dengan uang elektronik (UE) selama masa pandemi masih meningkat. Total transaksi UE pada agen Layanan Keuangan Digital (LKD) selama triwulan IV 2020 mencapai Rp466,54 miliar, lebih tinggi dari Rp443,42 miliar pada triwulan sebelumnya. Peningkatan transaksi terjadi di seluruh provinsi. Secara spasial, peningkatan utamanya disumbang oleh transaksi di Sumut, Sumsel, dan Lampung. Selanjutnya, dari segi pengguna, jumlah masyarakat pengguna UE juga terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah rekening UE. Pada triwulan laporan, jumlah rekening UE tercatat meningkat dari sekitar 174,80 ribu pada triwulan III 2020 menjadi 183,72 ribu rekening (Grafik II.16).

Penyaluran bansos nontunai pada triwulan IV 2020 meningkat terutama dari sisi jumlah penerima manfaat. Penyaluran Program Sembako di Sumatera tercatat sebesar Rp2,03 triliun, lebih tinggi dari Rp1,94 triliun pada triwulan III 2020. Perluasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako menjadi faktor pendorong peningkatan realisasi penyaluran bantuan. Jumlah KPM Program Sembako tercatat meningkat dari sekitar 3,11 juta pada triwulan sebelumnya menjadi 3,38 juta pada triwulan IV 2020. Sementara itu, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahap IV tercatat sebesar Rp1,70 triliun, sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahap III (Rp1,76 triliun).

Meski demikian, terjadi peningkatan dari sisi jumlah KPM yang menjadi 2,03 juta pada tahap IV setelah sebelumnya tercatat sebanyak 2,02 juta pada tahap III.



Sumber: Bank Indonesia

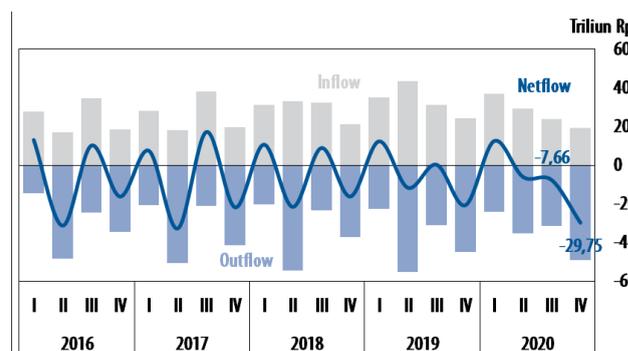
Grafik II.16. Perkembangan Jumlah UE

**Implementasi elektronifikasi transaksi Pemda (ETP) dan elektronifikasi pada sektor transportasi di Sumatera sampai dengan triwulan IV 2020 juga mengalami kemajuan.** Tingkat ETP untuk penerimaan maupun belanja daerah pada triwulan IV 2020 masing-masing tercatat sebesar 83%<sup>5</sup> dan 95%. Dari sisi penerimaan, seluruh Pemda level provinsi di Sumatera telah melakukan elektronifikasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Dari sisi belanja, elektronifikasi telah dilakukan pada sebagian besar komponen belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Kualitas jenis kanal yang digunakan juga semakin baik. Saat ini, Pemda telah menggunakan kanal teknologi menengah (*cash management system* atau *mobile banking*) serta level *advanced* (QRIS, *fintech*, dan *e-commerce*). Elektronifikasi pada sektor transportasi juga meningkat dibanding tahun 2019. Pengembangan terus berlanjut pada tahun 2020 untuk sistem perparkiran bandara, *ticketing* (bus, kapal, dan kereta), parkir pinggir jalan, dan objek wisata di sebagian besar provinsi. Ke depan, Bank Indonesia bersama stakeholders terkait di daerah akan terus berupaya mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah dengan ekosistem pembayaran yang inklusif dan efisien. Bank Indonesia di seluruh provinsi di Sumatera akan melakukan upaya perluasan elektronifikasi dan penggunaan *merchant QRIS (QR Code Indonesian Standard)*. Sejumlah daerah telah berencana untuk memperkuat elektronifikasi transportasi di pelabuhan, bandara, maupun layanan transportasi darat.

### Pengelolaan Uang Rupiah

**Sesuai pola historisnya, pada triwulan IV 2020 terjadi peningkatan kebutuhan uang kartal.** Secara keseluruhan, total net *outflow* Sumatera tercatat Rp29,76 triliun, atau lebih tinggi dari net *outflow* triwulan sebelumnya yang

sebesar Rp7,66 triliun (Grafik II.17). Net *outflow* tertinggi terjadi di provinsi Sumut, Riau, dan Sumsel yang merupakan daerah dengan pangsa ekonomi yang besar di Sumatera. Berkenaan dengan meningkatnya kebutuhan uang tunai tersebut, Bank Indonesia tetap memberikan layanan prima dalam mendistribusi uang layak edar (ULE) kepada masyarakat dan perbankan. Dalam pelaksanaannya, baik melalui layanan loket maupun kas titipan, Bank Indonesia senantiasa mengedepankan implementasi protokol kesehatan dan mitigasi risiko penyebaran COVID-19.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.17. Aliran Uang Kartal

### Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

**Pada triwulan IV 2020, aktivitas transaksi jual beli valuta asing (valas) dari pelaku usaha bukan bank tercatat tumbuh meningkat<sup>6</sup>.** Transaksi jual valas tumbuh meningkat menjadi 65,03% (yoy) pada triwulan laporan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 35,20% (yoy). Sementara itu, transaksi beli tumbuh meningkat dari 30,75% (yoy) menjadi 61,79% (yoy). Peningkatan pertumbuhan tersebut disinyalir sebagai bentuk penguatan optimisme masyarakat terkait perbaikan ekonomi yang terus berlanjut di berbagai daerah. Akselerasi transaksi penukaran terutama terjadi di Lampung, Kepri, dan Sumut yang merupakan daerah pusat ekonomi maupun pariwisata di Sumatera.

### Prospek Perekonomian

#### Prospek Pertumbuhan Ekonomi

**Perbaikan ekonomi Sumatera diperkirakan berlanjut pada 2021.** Dari sisi domestik, konsumsi rumah tangga diperkirakan menguat terutama didorong oleh dimulainya program vaksinasi di seluruh provinsi di Sumatera secara bertahap. Pelaksanaan program ini diperkirakan dapat mendukung pemulihan keyakinan masyarakat, mendorong perbaikan mobilitas, serta secara bertahap akan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang pada gilirannya berdampak positif pada perbaikan pendapatan.

<sup>5</sup> Transaksi yang dilakukan minimal melalui ATM atau *teller*.

<sup>6</sup> Data transaksi bersifat dinamis dan akan mengalami penyesuaian mengikuti ketersediaan laporan dari KUPVA BB.

Selain itu, berlanjutnya program bansos juga turut menjaga tingkat pendapatan masyarakat kelas bawah. Konsumsi pemerintah juga akan tumbuh positif sejalan dengan peningkatan pagu belanja APBD 2021.

**Perbaikan ekonomi domestik juga diperkirakan didukung membaiknya kinerja investasi.** Investasi bangunan Pemerintah diperkirakan membaik sejalan dengan peningkatan pagu belanja modal Pemerintah, terutama terkait proyek infrastruktur prioritas, seperti peningkatan target realisasi investasi JTTS pasca terkendalanya beberapa ruas selama 2020, dan beberapa pembangunan jalan dan fasilitas umum antara lain di Sumut dan Riau. Selain itu, investasi swasta diantaranya berupa mesin dan peralatan industri diperkirakan meningkat sejalan dengan membaiknya harga komoditas ekspor, serta berlanjutnya proyek *multiyears* pembangkit listrik, pembangunan *smelter*, serta proyek properti yang sempat tertunda. Optimisme investasi juga didukung kelanjutan reformasi struktural dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Dari sisi eksternal, kontribusi positif net ekspor akan meningkat sejalan dengan kinerja ekspor yang lebih baik. Ekspor CPO diperkirakan masih positif terutama ditopang permintaan Tiongkok, India, dan Eropa. Ekspor batu bara juga diperkirakan membaik ditopang permintaan India dan Tiongkok. Demikian pula untuk ekspor *pulp and waste paper*, dan elektronik.

**Dorongan permintaan domestik dan eksternal pada 2021 akan mendukung proses pemulihan LU utama di Sumatera.** Kinerja LU Pertanian diperkirakan meningkat seiring dengan kenaikan produksi perkebunan yang merupakan hasil dari *replanting* periode sebelumnya, kenaikan luas lahan perkebunan, serta minimalnya kebakaran lahan tahun 2020. Kinerja LU Pertambangan juga diperkirakan membaik sejalan dengan peningkatan kebutuhan batu bara domestik serta eksternal, khususnya dari Tiongkok dan India. Lebih lanjut, permintaan produk LU Industri Pengolahan diperkirakan terus meningkat pada 2021 seiring membaiknya kinerja ekonomi dunia. LU Konstruksi diperkirakan juga membaik karena meningkatnya investasi bangunan pemerintah (jalan tol, konektivitas, fasilitas publik) maupun swasta (pembangkit listrik, pabrik, *smelter*) setelah mengalami penurunan pada tahun 2020. Membaiknya permintaan konsumsi dan ekspor secara keseluruhan akan mendorong kinerja LU Perdagangan. Optimisme perbaikan pada tahun 2021 juga didukung oleh kegiatan pariwisata domestik pada era adaptasi kebiasaan baru (lihat Boks II).

## Prospek Inflasi

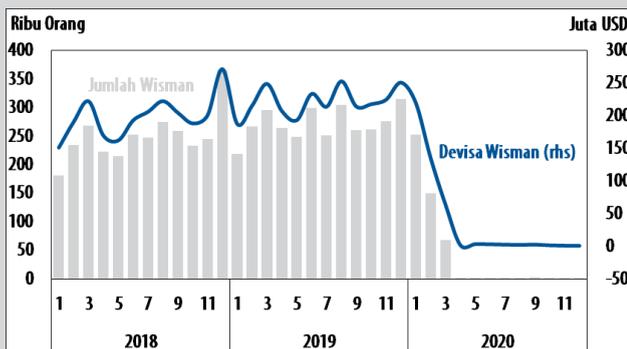
**Inflasi Sumatera pada tahun 2021 diperkirakan kembali meningkat dalam rentang sasaran seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian.** Peningkatan ini didorong meningkatnya mobilitas masyarakat, permintaan domestik, dan harga komoditas global. Peningkatan mobilitas diperkirakan juga akan diikuti kenaikan tarif transportasi, khususnya pada periode *peak season* liburan. Sementara itu, kenaikan permintaan terhadap komoditas pangan diperkirakan baik dari rumah tangga maupun dari pelaku usaha horeka (hotel, restoran, dan kafe). Daya beli yang menguat juga diperkirakan mendorong inflasi pada barang dan jasa terkait pakaian, alas kaki, kebutuhan rumah tangga, serta rekreasi. Peningkatan cukai rokok dan potensi berakhirnya insentif tarif listrik juga menjadi beberapa faktor yang akan mendorong inflasi sepanjang tahun 2021. Meski demikian, inflasi Sumatera akan tetap terkendali dan berada di dalam rentang sasaran inflasi nasional.

**Upaya pengendalian inflasi di berbagai daerah akan terus diperkuat pada aspek "4K" untuk memastikan pencapaian target inflasi tahun 2021<sup>7</sup>.** Dari aspek K1, TPID akan memperkuat pelaksanaan operasi pasar komoditas pangan strategis (khususnya menjelang HBKN), dan program stabilisasi harga, serta memperluas program kemandirian pangan. Untuk K2, antara lain akan mencakup penyediaan bantuan teknis dan penyuluhan bagi petani, optimalisasi peran BUMD dan instansi terkait dalam mendorong penyediaan pangan termasuk melalui perdagangan antardaerah, serta pemanfaatan teknologi pertanian sisi produksi maupun pasca panen. Terkait K3, akan dilakukan dengan peningkatan peran jasa transportasi *online* yang terhubung dengan *marketplace*, serta prioritas pengangkutan komoditas bahan pangan pokok terutama pada saat HBKN. Sementara itu, terkait K4, penguatan sinergi antara pemangku kepentingan melalui koordinasi secara berkala akan terus dilakukan serta meningkatkan kualitas data bahan pangan untuk memastikan pengambilan kebijakan dilakukan dengan tepat dan akurat.

<sup>7</sup> K1: Keterjangkauan Harga, K2: Ketersediaan Pasokan, K3: Kelancaran Distribusi, K4: Komunikasi Efektif

## Membangun Kepercayaan dan Beradaptasi dengan Tren Baru: Strategi Perbaikan Kinerja Pariwisata Sumatera

**Pandemi COVID-19 telah meluluhlantakan kinerja pariwisata Sumatera pada tahun 2020.** Penerapan kebijakan pembatasan aktivitas di berbagai negara dan penutupan perjalanan internasional, menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) menurun signifikan dari 3,26 juta orang pada 2019 menjadi 484,0 ribu orang 2020, terkontraksi 85,2% (yoy) (Grafik II.18). Sejalan dengan kondisi tersebut, devisa pariwisata juga tercatat menurun dari US\$2,7 miliar 2019 menjadi US\$434,6 juta pada tahun 2020, terkontraksi 83,6% (yoy). Penurunan kunjungan juga terjadi oleh wisatawan nusantara (wisnus) sebagai dampak dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah kota besar Indonesia, sehingga jumlah kunjungan turut terkontraksi 48,0% (yoy) dibandingkan 2019 (Grafik II.19).



Sumber: BPS, diolah

**Grafik II.18.** Perkembangan Kunjungan dan Devisa Wisman Sumatera

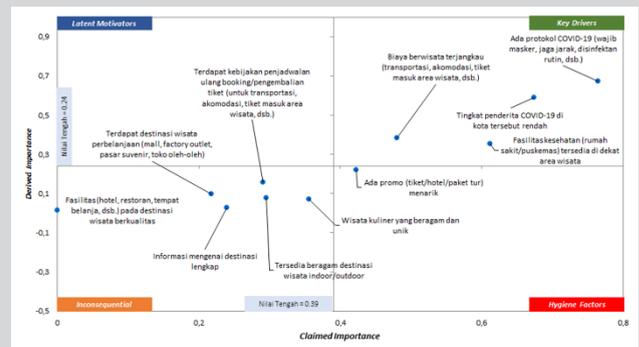


Sumber: BPS, diolah

**Grafik II.19.** Perkembangan Kunjungan Wisnus ke Sumatera

**Terdapat peluang perbaikan kinerja pariwisata pada tahun 2021, yang bersumber dari pergerakan wisnus.**

Melihat perkembangan 2020, aktivitas wisnus secara gradual menunjukkan tren perbaikan sejak akhir semester I, terlihat dari kedatangan penumpang domestik dan tingkat penghunian kamar (TPK) yang terus meningkat. Dalam jangka pendek, wisnus berpotensi menjadi penopang pariwisata, namun memerlukan strategi yang aman dan insentif yang menarik. Di sisi lain, perbaikan kinerja wisman akan berjalan lebih lambat dan belum dapat diharapkan pada 2021. Berbagai analisis memprakirakan bahwa pergerakan wisman baru akan terjadi pada 2022 dan berangsur pulih mencapai ke level sebelum COVID-19 pada tahun 2024.



Sumber: Survei Preferensi Wisnus, diolah

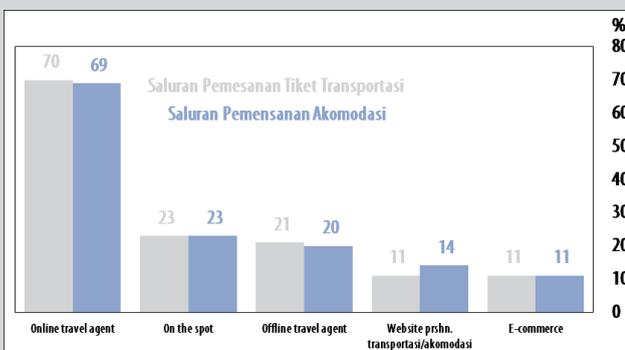
**Grafik II.20.** Key Driver Memilih Destinasi Wisata Paska COVID-19

**Dengan program vaksinasi massal yang membutuhkan waktu minimal setahun untuk mencapai herd immunity, maka membangun kepercayaan untuk kembali berwisata melalui protokol kesehatan yang ketat, menjadi solusi jangka pendek.** Strategi ini sejalan dengan hasil survei preferensi wisnus yang dilakukan<sup>8</sup>, yaitu mayoritas menyatakan bahwa kepatuhan protokol dan rendahnya penderita COVID-19 menjadi faktor berpengaruh dalam memilih destinasi wisata (Grafik II.20). Menjawab tantangan ini, kebijakan sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*) perlu diperluas penyebarannya dan diperkuat sosialisasinya. Saat ini realisasi sertifikasi CHSE telah mencapai 88,6%, namun belum terintegrasi untuk seluruh sektor usaha serta masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Sementara sosialisasi CHSE juga terindikasi masih rendah, terkonfirmasi dari hasil survei yang sama, yaitu

<sup>8</sup> Survei dilakukan oleh KPwBI Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Markplus kepada 450 responden pada Februari 2021.

mayoritas responden menyatakan belum mengetahui program sertifikasi CHSE, meskipun menilai hal tersebut penting untuk dimiliki destinasi wisata.

**Strategi jangka pendek lain yang dapat dilakukan adalah promosi secara intensif.** Terkait hal ini, Pemerintah telah mencanangkan program *Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)*, yang disinergikan dengan program *Bangga Buatan Indonesia (BBI)*, untuk mendorong rasa bangga akan destinasi dalam negeri. Di Sumatera, gerakan tersebut dimulai di Sumatera Utara melalui **program Beli Kreatif Danau Toba**, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi pada 20 Februari 2021 yang lalu. Dalam acara ini, Bank Indonesia berkontribusi melalui enam kegiatan utama, yaitu (1) pendampingan kurasi UMKM, (2) program *mastering* UMKM, (3) fasilitasi UMKM dalam BKDT Fair di *Summarecon Mall Serpong*, (4) program Inkubasi *Desain Mode dan Produksi Baju Siap Pakai*, (5) edukasi dan fasilitasi QRIS, serta (6) *showcasing* UMKM di Bandara *Kualanamu* dan Bandara *Silangit*. Selain Danau Toba, beberapa destinasi wisata lain di Sumatera yang relatif siap untuk program BBWI adalah Kepulauan Riau. Pemda di wilayah tersebut telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong pergerakan *wisnus* secara aman, yaitu menerapkan protokol kesehatan secara ketat di bandara dan tempat wisata serta mempercepat pemberian sertifikat penerapan protokol kesehatan secara mandiri kepada pelaku usaha.



Sumber: Survei Preferensi *Wisnus*, diolah

**Grafik II.21.** Preferensi Saluran Pemesanan Tiket Transportasi dan Akomodasi

**Upaya lain mendorong permintaan akan berwisata dapat dilakukan melalui pemberian insentif.** Sejak pertengahan tahun lalu, pemerintah telah menyalurkan sejumlah stimulus untuk mendukung pemulihan pariwisata yang mencakup hibah, pembiayaan UMKM pariwisata dan

subsidi *airport tax*. Namun stimulus tersebut lebih berfokus pada pemulihan kondisi pelaku usaha dan belum mampu mengakselerasi sisi permintaan. Berkaca pada kebijakan sejumlah negara tetangga, perluasan stimulus seperti diskon atau subsidi pada tiket masuk atraksi, biaya akomodasi dan biaya perjalanan, menjadi kunci penting untuk mendorong permintaan khususnya pada tahap awal pemulihan.

**Sementara itu, pandemi COVID-19 telah mengakselerasi penerapan digitalisasi di segala aspek.** Berdasarkan hasil survei, *online travel agent (OTA)* menjadi pilihan utama wisatawan ketika membeli tiket transportasi dan akomodasi. Dari promosi, selain rekomendasi teman atau keluarga, media sosial telah menjadi alat pemasaran destinasi yang kuat, khususnya *Youtube* dan *Instagram*. Oleh karena itu, sejalan dengan pergeseran preferensi wisatawan, membangun digitalisasi produk dan layanan pariwisata menjadi penting dalam pengembangan destinasi wisata. Kolaborasi seperti layanan penjualan tiket oleh OTA melalui media sosial, dapat menjadi strategi untuk menarik pasar.

**Pergeseran preferensi juga berdampak pada kebutuhan infrastruktur pembayaran.** Survei yang sama menunjukkan bahwa pembayaran menggunakan *e-wallet* sudah mulai menjadi salah satu pilihan utama pembayaran, di samping penggunaan *automated teller machine (ATM)* dan pembayaran secara tunai yang merupakan cara konvensional. Sejalan dengan kebutuhan ini, Bank Indonesia terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran nontunai dengan memanfaatkan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* di destinasi wisata dan aktivitas pariwisata selama tahun 2020. Sebagai contoh, di Danau Toba, penggunaan sistem pembayaran nontunai telah diperluas ke transportasi penyeberangan rute *Ajibata – Ambarita* yang menggunakan *Toba Smart Card (TSC)*<sup>9</sup> dan rute *Tigaras – Simanindo* yang menggunakan QRIS. Di tahun 2021, Bank Indonesia, bekerjasama dengan stakeholders terkait, akan terus mendorong digitalisasi UMKM melalui perluasan akuisisi *merchant* QRIS serta melakukan integrasi pembayaran retribusi pariwisata secara nontunai di kawasan Danau Toba.

**Perbaikan kinerja wisman, yang diperkirakan pulih lebih lambat dari *wisnus*, dapat diakselerasi lebih cepat melalui strategi *travel bubble*.** Di Sumatera, *travel bubble* berpotensi diterapkan di Kepulauan Riau yang memiliki

<sup>9</sup> TSC merupakan alat pembayaran non tunai berbasis chip di kartu multi issuer yang dapat digunakan untuk pembayaran di moda transportasi, merchant dan lokasi pariwisata di kawasan Danau Toba. TSC juga dapat digunakan sebagai media sosialisasi dan promosi pariwisata karena terhubung dengan situs pariwisata Danau Toba melalui QR Code

kawasan Bintan. Kedekatan wilayah dan keamatan hubungan ekonomi dengan Singapura serta kemampuan untuk mengontrol perbatasan (cenderung lebih mudah untuk daerah kepulauan), menjadi keunggulan Bintan sebagai *pilot project travel bubble*. Saat ini pengajuan *travel bubble* Bintan-Singapura telah dilakukan, namun diperlukan kesepakatan *G-to-G* untuk prosedur imigrasi dan standarisasi protokol kesehatan antar kedua negara.

**Ke depan, keberhasilan strategi ini akan membuka potensi lanjutan terkait pengembangan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*).** Dengan keunggulan lokasi strategis dan beragamnya keberadaan hotel dan resort, kegiatan MICE secara *hybrid* berpeluang untuk dikembangkan di Bintan dengan dukungan penerapan pemanfaatan teknologi nirsentuh terkini dan pengembangan integrasi aktivitas MICE dengan wisata. Sementara itu, dukungan domestik dalam jangka pendek dapat dilakukan melalui pelaksanaan MICE di lingkungan Kementerian/Lembaga, untuk mendorong promosi, sekaligus meningkatkan kapabilitas pelaksana *event* di tengah era adaptasi baru. Strategi mendorong pergerakan wisnus melalui kegiatan MICE, juga dapat dilakukan di Medan dan Palembang yang memiliki keunggulan ragam hotel dengan fasilitas penyelenggaraan MICE yang representatif.

## BAGIAN 3

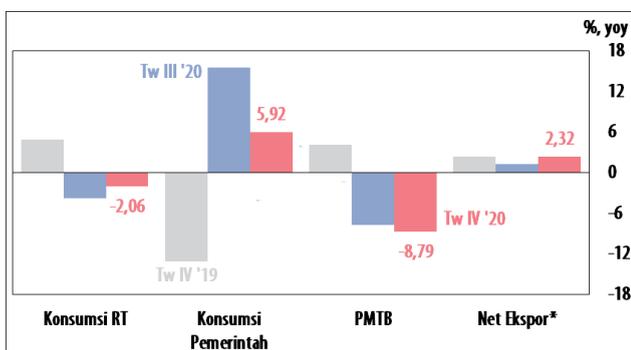
### Perekonomian Jawa

**Ekonomi Jawa melanjutkan proses perbaikan perekonomian meskipun masih mengalami kontraksi. Perbaikan ekonomi pada triwulan IV 2021 ditopang oleh mulai berkurangnya tekanan pada permintaan domestik dan meningkatnya kontribusi positif net ekspor. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perbaikan kinerja terjadi pada hampir seluruh LU utama di Jawa diantaranya LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. Dengan perkembangan tersebut, maka secara keseluruhan tahun 2020, ekonomi Jawa berkontraksi 2,51%.**

**Tekanan inflasi Jawa mulai meningkat pada triwulan IV 2020 meski tetap di bawah kisaran sasaran, seiring kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura sebagaimana pola historis akhir tahun. Rendahnya inflasi pada 2020 dipengaruhi oleh permintaan domestik yang mengalami tekanan sebagai dampak pandemi Covid-19 di tengah pasokan yang memadai pada sejumlah sentra produksi di wilayah Jawa. Selain itu, kebijakan Pemerintah terkait harga energi untuk menjaga daya beli masyarakat juga berdampak pada penurunan harga energi pada 2020.**

**Ke depan, proses perbaikan ekonomi yang terjadi selama triwulan IV 2020 diperkirakan berlanjut secara gradual pada 2021. Dari sisi eksternal, perbaikan ekonomi negara mitra dagang akan mendorong peningkatan permintaan sejumlah produk ekspor utama Jawa. Sementara dari sisi domestik, dimulainya program vaksin akan mendorong perbaikan mobilitas dan keyakinan masyarakat secara bertahap. Selain itu peningkatan investasi Pemerintah dan swasta, serta konsumsi Pemerintah juga akan menjadi penopang perbaikan permintaan domestik pada 2021. Inflasi di Jawa diperkirakan kembali meningkat dalam rentang sasaran inflasi, sejalan dengan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik.**

**Meski masih mengalami kontraksi 2,6% (yoy), ekonomi Jawa membaik pada triwulan IV 2020.** Pelonggaran aktivitas masyarakat di tengah tetap berlakunya protokol COVID-19 menjadi penopang perbaikan konsumsi, terutama pada libur Natal dan Tahun Baru. Lebih lanjut, akselerasi belanja Pemerintah dalam rangka stimulus perekonomian, juga turut menopang perbaikan ekonomi Jawa (Grafik III.1). Dari sisi eksternal, nilai ekspor non migas Jawa telah mencatatkan pertumbuhan positif didorong oleh peningkatan permintaan pasca kebijakan pelonggaran, di sebagian besar negara mitra dagang sehingga mendorong perbaikan kontribusi positif net ekspor Jawa.



\*kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa  
Sumber: BPS, diolah

**Grafik III.1.** Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan

Secara sektoral, pelonggaran PSBB dan pembukaan kembali sektor prioritas mendorong perbaikan kinerja sebagian besar Lapangan Usaha (LU) di Jawa. Kinerja LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Transportasi, serta LU

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum melanjutkan tren perbaikan, meski masih kontraksi. Secara spasial, perbaikan ekonomi terjadi di seluruh provinsi.

**Tabel III.1.** Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa (yoy)

Provinsi	2018	2019				2019	2020				2020
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
DKI Jakarta	6,11	6,15	5,40	5,82	5,91	5,82	5,04	-8,33	-3,89	-2,14	-2,36
Jawa Barat	5,65	5,39	5,64	5,14	4,12	5,07	2,77	-5,91	-4,01	-2,39	-2,44
Banten	5,77	5,27	5,23	5,05	5,62	5,29	3,18	-7,27	-5,32	-3,92	-3,38
Jawa Tengah	5,30	5,12	5,52	5,63	5,33	5,40	2,65	-5,91	-3,79	-3,34	-2,65
DI Yogyakarta	6,20	7,51	6,77	6,01	6,15	6,59	-0,31	-6,88	-2,98	-0,68	-2,69
Jawa Timur	5,47	5,56	5,78	5,33	5,42	5,52	2,92	-5,98	-3,61	-2,64	-2,39
<b>Jawa</b>	<b>5,70</b>	<b>5,63</b>	<b>5,58</b>	<b>5,46</b>	<b>5,28</b>	<b>5,48</b>	<b>3,41</b>	<b>-6,71</b>	<b>-3,91</b>	<b>-2,60</b>	<b>-2,51</b>

Sumber: BPS, diolah

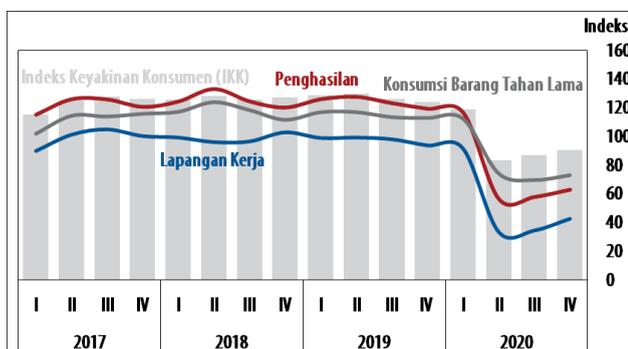
**Proses perbaikan yang terus berlangsung sepanjang paruh kedua, menahan tekanan kontraksi lebih dalam untuk keseluruhan 2020.** Perekonomian Jawa berkontraksi 2,51% (yoy) pada 2020 terutama akibat penurunan permintaan domestik selama pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan mobilitas dan aktivitas konsumsi. Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan pergeseran sejumlah rencana investasi infrastruktur Pemerintah akibat *refocusing* dan realokasi anggaran, maupun rencana investasi korporasi. Di sisi eksternal, peningkatan permintaan Tiongkok karena perbaikan ekonomi yang lebih cepat tetap tidak mampu mengompensasi penurunan ekspor ke negara lain. Namun penurunan aktivitas ekonomi domestik di wilayah Jawa, mengakibatkan penurunan impor yang lebih dalam dari ekspor, sehingga net ekspor masih berkontribusi positif.

Dari sisi sektoral, perlambatan ekonomi Jawa pada 2020 terjadi di hampir seluruh LU, kecuali LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Kesehatan dan LU Pertanian. Secara spasial, seluruh provinsi mencatat kontraksi pertumbuhan, dengan yang terdalam di DKI Jakarta sejalan dengan jumlah kasus COVID-19 yang tertinggi sepanjang 2020. (Tabel III.1).

## Sisi Penggunaan

### Konsumsi Rumah Tangga

**Konsumsi rumah tangga melanjutkan perbaikan, walau belum kembali level sebelum COVID-19.** Pada triwulan IV 2020, konsumsi rumah tangga masih terkontraksi 2,06% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -3,82% (yoy). Pelonggaran PSBB di berbagai wilayah Jawa, yang diiringi pembukaan pusat pembelanjaan, tempat wisata dan beroperasinya angkutan udara dengan tetap menerapkan protocol COVID-19, mendorong perbaikan aktivitas konsumsi masyarakat. Selain itu, akselerasi penyaluran stimulus Pemerintah, seperti bansos, kartu pra kerja, bantuan subsidi gaji, dan program padat karya tunai, serta kembali bekerjanya sebagian pegawai yang dirumahkan selama PSBB pada awal pandemi, mendorong perbaikan daya beli masyarakat meski masih terbatas. Hal ini juga tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, yang menunjukkan perbaikan indeks keyakinan konsumen, indeks penghasilan dan indeks ketersediaan lapangan kerja serta konsumsi barang tahan lama pada triwulan IV 2020 (Grafik III.2).



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik III.2. Perkembangan Indikator Konsumsi RT

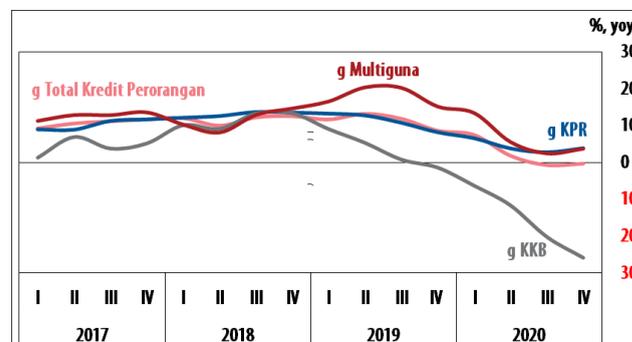
**Penurunan aktivitas konsumsi juga tercermin dari penurunan permintaan terhadap pembiayaan oleh sektor rumah tangga.** Penurunan kredit rumah tangga terutama terjadi pada jenis Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), sementara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Multiguna tumbuh melambat (Grafik III.3). Perlambatan kredit tersebut mengindikasikan masih rendahnya *appetite* masyarakat untuk melakukan konsumsi. Meskipun melambat, kualitas kredit kepada sektor rumah tangga tetap terjaga dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) masih di bawah 5% hingga akhir triwulan IV 2020. Meski demikian, memasuki triwulan

IV 2020 perbaikan konsumsi terindikasi dari mulai membaiknya arah pertumbuhan kredit perorangan. Sejalan dengan hal tersebut, kecenderungan penurunan konsumsi rumah tangga juga tercermin dari peningkatan DPK perseorangan di perbankan wilayah Jawa pada seluruh jenis simpanan yaitu Giro, Tabungan, dan Deposito. Kondisi tersebut mengindikasikan sebagian masyarakat menengah-atas yang belum melakukan aktivitas konsumsi sesuai pola normalnya akibat pemberlakuan protokol COVID-19 selama pandemi.

**Secara keseluruhan tahun 2020, kinerja konsumsi di wilayah Jawa tumbuh negatif.** Konsumsi rumah tangga menurun sejalan dampak kebijakan PSBB yang mengurangi aktivitas ekonomi. Berbagai pembatasan aktivitas ekonomi juga mengakibatkan penurunan pendapatan dan ketersediaan lapangan kerja baru pada 2020, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah, meski sejumlah program *social safety net* oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda menjadi penahan tekanan pendapatan lebih dalam. Sementara keterbatasan mobilitas menyebabkan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah-atas cenderung menahan konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier.

### Konsumsi Pemerintah

**Konsumsi pemerintah masih tumbuh positif, meski melambat pasca percepatan realisasi pada triwulan sebelumnya.** Konsumsi pemerintah tumbuh 5,92% (yoy) pada triwulan IV 2020, atau melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,54% (yoy). Hal ini terutama dipengaruhi oleh *front loading* penyaluran stimulus fiskal telah dilakukan pada triwulan III 2020, khususnya untuk penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, termasuk penyaluran Bansos dan belanja barang dan jasa. Secara keseluruhan tahun 2020, konsumsi Pemerintah merupakan satu-satunya komponen yang tumbuh positif terutama didorong kenaikan alokasi belanja Pemerintah Pusat.



Sumber: Bank Indonesia

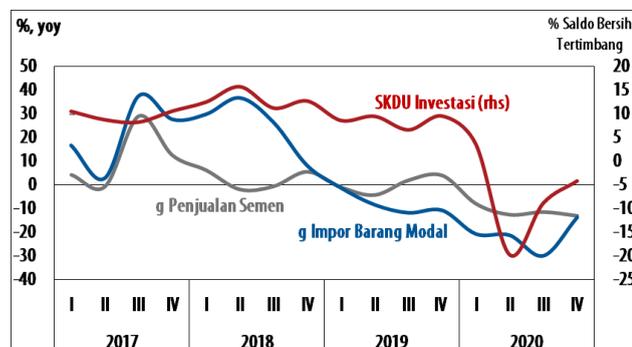
Grafik III.3. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga

**Konsumsi pemerintah pada 2020 didorong oleh alokasi dan realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) di daerah yang meningkat.** Alokasi belanja K/L di wilayah

Jawa tahun 2020 meningkat 28,4% dibanding tahun 2019, dengan realisasi mencapai 94,8%, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 93,2%. Peningkatan realisasi terjadi di hampir seluruh provinsi di wilayah Jawa, dengan capaian realisasi tertinggi terjadi di DKI Jakarta, yakni 95%. Peningkatan realisasi belanja K/L terutama didorong oleh meningkatnya realisasi belanja bansos yang mencapai 99,97%. Secara nominal, alokasi belanja bansos juga naik 79,9% (yoy) dibanding 2019, seiring dengan peningkatan dana perlindungan sosial untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin akibat pandemi COVID-19.

## Investasi

**Perbaikan investasi masih berjalan lambat hingga triwulan IV 2020.** Investasi pada triwulan ini berkontraksi 8,79% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 7,75% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kinerja investasi yang menurun terutama dipengaruhi oleh investasi bangunan yang masih tertahan seiring dengan terbatasnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan akan bergeser ke tahun berikutnya. Investasi bangunan yang menurun ini juga tercermin dari konsumsi semen di Jawa yang juga turun -16,62% pada triwulan IV 2020. Sementara itu, investasi non bangunan mulai terindikasi membaik meski tidak mampu mengompensasi penurunan investasi bangunan. Membaiknya investasi non bangunan terutama terindikasi dari membaiknya kinerja impor barang modal, dari kontraksi 29,85% (yoy) di triwulan III 2020 menjadi kontraksi 13,68% (yoy). Dengan capaian triwulan IV 2020 tersebut, kinerja investasi secara keseluruhan tahun 2020 melambat dibandingkan tahun 2019. Meski demikian, perlambatan kinerja investasi Jawa yang lebih dalam tertahan berlanjutnya pembangunan pabrik kendaraan listrik oleh produsen otomotif dari Korea Selatan, relokasi sejumlah korporasi global ke wilayah Jawa, serta beberapa proyek pengembangan Kawasan ekonomi, seperti Kawasan Industri Terpadu di Batang Jawa Tengah, kawasan Metropolitan Rebana di Jawa Barat.



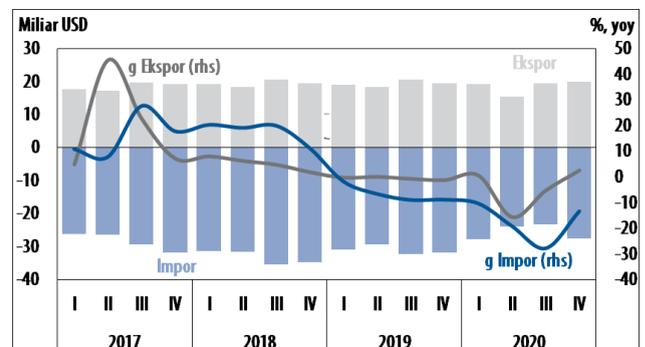
Sumber: Bank Indonesia dan Dirjen Bea Cukai, diolah

Grafik III.4. Perkembangan Indikator Investasi

## Kinerja Ekspor-Impor

### Kontribusi positif net ekspor pada triwulan IV 2020 terus membaik, sejalan dengan peningkatan kinerja ekspor.

Ekspor non migas mulai kembali positif sebesar 2,66% (yoy), setelah mengalami kontraksi pada dua triwulan sebelumnya (Grafik III.5). Perbaikan ekspor nonmigas didukung oleh perbaikan ekspor dari LU unggulan wilayah Jawa, antara lain otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT), furnitur dan kimia. Perbaikan permintaan ekspor tersebut juga mendorong peningkatan kebutuhan impor bahan baku, meski masih mengalami kontraksi. Perbaikan impor non migas di Jawa, tidak hanya terjadi pada bahan baku, namun juga barang modal. Namun, perbaikan kinerja ekspor luar negeri lebih lanjut masih tertahan ekspor jasa karena masih rendahnya jumlah kunjungan wisman akibat berlanjutnya pemberlakuan kebijakan pembatasan perjalanan dari luar negeri sejak paruh pertama 2020. Dengan perkembangan capaian triwulan IV 2020 tersebut, maka kontribusi net ekspor untuk keseluruhan tahun 2020 masih tercatat positif akibat penurunan impor untuk kebutuhan domestik yang lebih dalam dibandingkan penurunan ekspor akibat tekanan permintaan seiring penerapan *lockdown* di negara mitra dagang utama. Sebagian produk ekspor Jawa bahkan masih dapat mencatat pertumbuhan positif, seperti alas kaki yang tumbuh 9,39% (yoy), tembaga olahan 86% (yoy), serta kertas dan produk kertas 133% (yoy), terutama tujuan ke Tiongkok.



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik III.5. Perkembangan Ekspor dan Impor Non Migas Wilayah Jawa

## Sisi Lapangan Usaha

### Pertanian

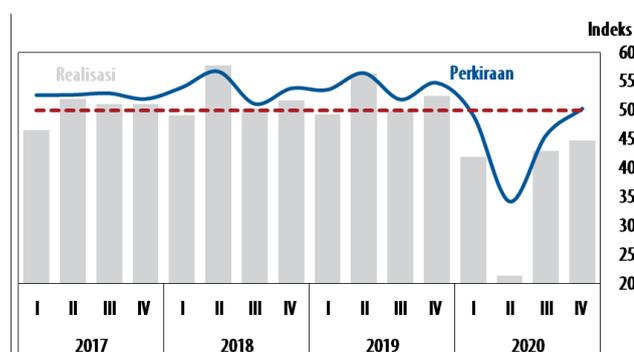
**Kinerja LU Pertanian masih melanjutkan tren pertumbuhan positif pada triwulan IV 2020, meski melambat.** Perlambatan lebih dipengaruhi oleh pola musiman karena berlangsungnya masa tanam padi. Selain itu, fenomena La Nina dengan curah hujan tinggi cukup mengganggu produksi pangan di sejumlah daerah sentra. Tingginya curah hujan telah mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas panen hortikultura, khususnya aneka cabai dan bawang, seperti di Malang dan Probolinggo. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan, kinerja LU

Pertanian untuk keseluruhan tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019. Peningkatan kinerja LU Pertanian ini antara lain didorong oleh kenaikan produksi padi di sentra produksi di Jawa Timur dan beberapa daerah sentra lain di Jawa Barat seiring meningkatnya luas panen.

### Industri Pengolahan

#### Kinerja LU Industri Pengolahan mulai membaik kendati masih mengalami kontraksi pada triwulan IV 2020.

Perbaikan industri pengolahan didorong oleh kenaikan permintaan eksternal dan domestik pasca pelonggaran PSBB. Peningkatan aktivitas industri terutama ditopang oleh permintaan ekspor antara lain pada produksi industri besar, seperti otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki. Sementara itu, produksi dan penjualan industri otomotif terus mengalami tren perbaikan sejak Juni 2020 hingga akhir triwulan IV 2020, setelah sempat mencapai titik terendahnya pada Mei 2020. Dukungan kebijakan Pemerintah melalui penerbitan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) kepada 18.101 perusahaan<sup>10</sup> memberikan kepastian operasional bagi LU Industri Pengolahan sehingga mendukung proses perbaikan kinerja pada triwulan IV 2020. Perbaikan LU Industri Pengolahan juga tercermin pada peningkatan *Purchasing Manager Index* Jawa yang telah memasuki fase ekspansi (Grafik III.6). Namun, secara keseluruhan tahun, LU Industri Pengolahan tetap mengalami tekanan akibat penurunan permintaan domestik dan pelemahan permintaan eksternal terutama pada triwulan II 2020.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.6. Perkembangan Indikator *Purchasing Manager Index* Jawa

### Konstruksi

#### LU Konstruksi kembali mengalami perlambatan sejalan dengan kinerja investasi bangunan.

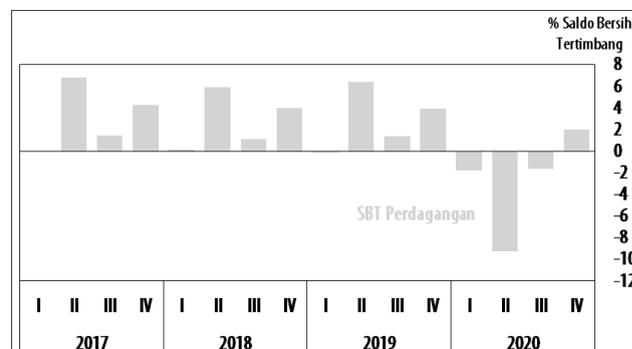
LU Konstruksi terkontraksi 8,85% (yoy), turun lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,66% (yoy). Menurunnya kinerja konstruksi pada triwulan ini terutama akibat penundaan ataupun pergeseran jadwal penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur, termasuk Proyek Strategis

Nasional (PSN), seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung, proyek MRT fase II, LRT fase II, dan proyek jalan tol. Selain itu, pemberlakuan *physical distancing* pada kegiatan konstruksi baik proyek pemerintah maupun swasta berdampak pada kurang optimalnya progres pembangunan beberapa proyek. Dengan perkembangan pada triwulan IV 2020, maka secara keseluruhan tahun 2020, LU Konstruksi terkontraksi 4,81% (yoy) seiring dengan lebih lambatnya penyelesaian berbagai proyek infrastruktur terutama karena pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan penundaan investasi korporasi.

### Perdagangan

#### Sejalan dengan membaiknya konsumsi, kinerja LU Perdagangan mengalami perbaikan meski masih mengalami kontraksi.

Perbaikan aktivitas perdagangan pada triwulan IV 2020 ditopang oleh pelonggaran aturan pembatasan masyarakat yang mulai mendorong mobilitas sehingga meningkatkan aktivitas konsumsi. Penerapan adaptasi kebiasaan baru dan sertifikasi CHSE di pusat perbelanjaan, restoran, maupun lokasi wisata menjadi penopang proses perbaikan kinerja LU Perdagangan meski dengan kapasitas yang terbatas. Selain itu, perbaikan LU Perdagangan juga didorong oleh penjualan transaksi secara *online* melalui *e-commerce*, terutama penjualan perlengkapan olahraga, makanan dan minuman, serta perlengkapan rumah tangga dan kantor. Perbaikan kinerja perdagangan tercermin pada hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan saldo bersih tertimbang (SBT) pada LU Perdagangan (Grafik III.7). Meski demikian, secara keseluruhan pada 2020 LU Perdagangan mengalami kontraksi yang cukup dalam yakni sebesar 6,14% (yoy), akibat kebijakan pembatasan aktivitas sosial sejak awal tahun dengan disertai penutupan pusat perbelanjaan, restoran, maupun tempat wisata, terutama saat awal implementasi PSBB.



Sumber: SKDU Bank Indonesia

Grafik III.7. Perkembangan Indikator LU Perdagangan

<sup>10</sup> Per 20 September 2020

## Fiskal Daerah

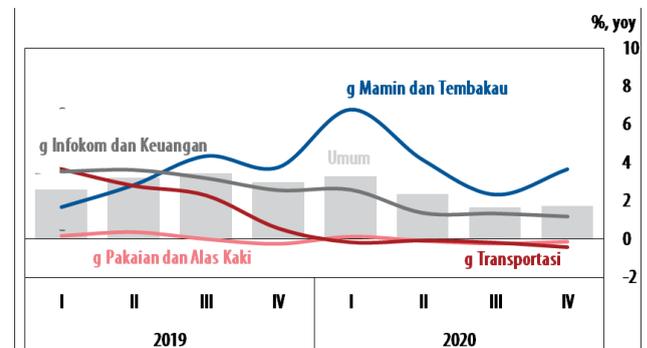
**Dorongan fiskal daerah terbatas selama 2020 seiring *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19.** Dari sisi penerimaan, realisasi transfer dari pemerintah pusat pada triwulan IV 2020 mencapai 98,80%, meski dengan pagu alokasi yang lebih rendah dibandingkan periode tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan penerimaan asli daerah yang secara nominal juga tercatat lebih rendah. Penurunan sumber penerimaan, mengakibatkan kemampuan belanja Pemda juga menjadi terbatas. Secara agregat, nilai realisasi belanja APBD di Jawa lebih rendah 10% dibandingkan 2019 seiring dengan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan sebelumnya. Persentase realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota di Jawa pada tahun 2020 tercatat 94,6%, sedikit lebih rendah bila dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 95,7%. Meski demikian, persentase realisasi belanja daerah di tingkat kabupaten/kota tercatat lebih baik yakni 97,3%, bila dibandingkan tingkat provinsi yang sebesar 90,4%.

## Perkembangan Inflasi

**Tekanan inflasi di Jawa mulai meningkat pada triwulan IV 2020, terutama akibat kenaikan beberapa harga komoditas pangan.** Inflasi Jawa pada triwulan IV 2020 tercatat 1,73% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2020 yang sebesar 1,66% (yoy) - (Grafik III.8). Kenaikan inflasi terutama dicipu oleh naiknya harga aneka cabai akibat terganggunya produksi karena tingginya curah hujan. Selain itu, komoditas telur ayam dan daging ayam juga turut berkontribusi pada kenaikan inflasi Jawa. Peningkatan harga pangan juga terjadi karena pengaruh kenaikan harga komoditas global seperti harga *Crude Palm Oil* (CPO) yang memengaruhi kenaikan harga minyak goreng domestik. Beberapa komoditas lainnya juga menjadi penyumbang inflasi, seperti emas dan aneka rokok seiring implementasi kebijakan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) rata-rata sebesar 35% di 2020.

**Untuk keseluruhan tahun, inflasi IHK Jawa pada 2020 tercatat rendah dan berada di bawah batas bawah sasaran inflasi.** Inflasi Jawa pada akhir tahun 2020 tercatat 1,73% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 3,00% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi utamanya disebabkan oleh perlambatan pada kelompok transportasi seiring tertahannya mobilitas masyarakat karena kebijakan pembatasan aktivitas sosial pada masa pandemi yang memengaruhi permintaan pada kelompok ini, antara lain penurunan harga tiket pesawat selama 2020. Selain itu, penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di awal tahun 2020 seiring tren penurunan harga minyak dunia pada triwulan II 2020 juga menjadi faktor menurunnya tekanan

inflasi bensin. Deflasi juga terjadi pada tarif listrik sejalan dengan penurunan tarif listrik pada Oktober 2020 serta implementasi kebijakan Pemerintah terkait diskon tarif listrik untuk pelanggan listrik kapasitas 450 VA dan 900 VA sebagai salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Secara spasial, inflasi tahun 2020 di seluruh provinsi di Jawa lebih rendah dibandingkan tahun 2019 (Tabel III.2).



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.8. Perkembangan Inflasi

Tabel III.2 Perkembangan Inflasi Spasial

Provinsi	2018				2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
DKI Jakarta	3,23	3,31	2,88	3,27	3,01	3,49	3,72	3,23	3,22	2,18	1,75	1,59
Jawa Barat	3,91	3,09	3,17	3,54	2,42	3,48	3,85	3,21	3,94	2,76	1,77	2,18
Banten	3,55	3,00	3,42	3,42	2,97	3,72	3,64	3,30	2,99	2,50	1,63	1,45
Jawa Tengah	3,39	2,72	2,79	2,82	1,82	2,52	3,12	2,80	3,25	2,48	1,46	1,56
DI Yogyakarta	3,29	2,69	2,77	2,66	2,61	3,11	2,99	2,77	2,95	1,95	1,65	1,40
Jawa Timur	3,17	2,67	2,76	2,86	2,35	2,40	2,45	2,12	2,28	2,04	1,29	1,44
<b>Jawa</b>	<b>3,47</b>	<b>3,04</b>	<b>2,98</b>	<b>3,24</b>	<b>2,59</b>	<b>3,22</b>	<b>3,46</b>	<b>3,00</b>	<b>3,28</b>	<b>2,38</b>	<b>1,66</b>	<b>1,73</b>

Sumber: BPS, diolah

## Sistem Pembayaran

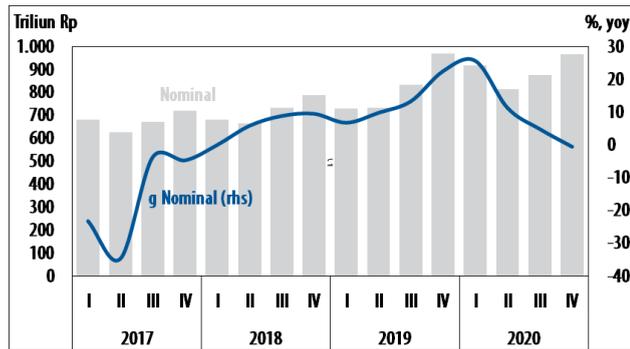
### Sistem Pembayaran Nontunai

**Pertumbuhan nominal transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan IV 2020 mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya.**

Pada triwulan IV 2020, nominal transaksi SKNBI di Jawa tumbuh -0,38% (yoy) dengan nominal mencapai Rp966,37triliun dan volume transaksi sebanyak 43,07 juta transaksi (Grafik III.9). Secara spasial, transaksi SKNBI didominasi oleh DKI Jakarta yang mencapai 89,8% terhadap total nominal transaksi SKNBI di Jawa. Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan nominal transaksi SKNBI sebesar 27,35% (yoy). Sementara itu Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi yang mengalami pertumbuhan transaksi SKNBI paling rendah pada triwulan IV 2020 sebesar 5,99% (yoy).

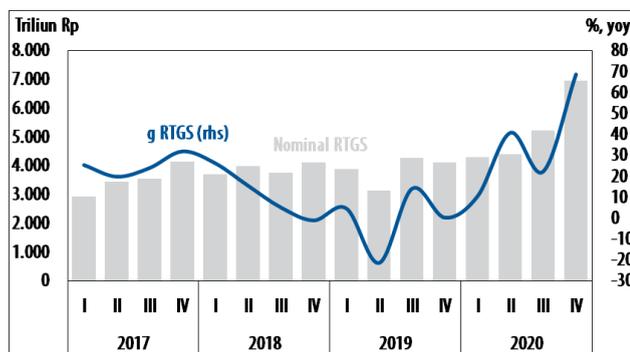
**Transaksi melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) pada triwulan IV 2020 secara nominal tumbuh meningkat.** Nominal transaksi RTGS pada triwulan IV 2020 sebesar Rp 6.962 triliun atau tumbuh 69% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik III.10). Transaksi RTGS di Jawa juga didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta, yang mencapai hingga 86% dari total transaksi RTGS di Jawa. Meningkatnya transaksi non-tunai retail melalui RTGS

diperkirakan dipengaruhi oleh kenaikan *transfer* bantuan sosial pemerintah dan akselerasi pembayaran proyek pemerintah kepada sektor swasta di akhir tahun.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.9. Nominal Transaksi SKNBI



Sumber: Bank Indonesia

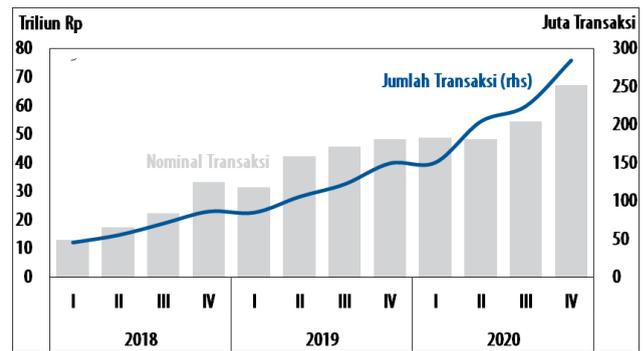
Grafik III.10. Nominal Transaksi RTGS

**Selama pandemi COVID-19, aktivitas ekonomi dan keuangan digital di wilayah Jawa tetap tumbuh positif.**

Pembatasan operasional pusat perbelanjaan mendorong kenaikan penggunaan belanja secara daring (*e-commerce*). Pada triwulan IV 2020, belanja melalui *e-commerce* di Jawa tercatat Rp67,3 triliun atau tumbuh 24% (yoy) - (Grafik III.11). Kenaikan tersebut terutama didominasi transaksi pembelian produk *fashion*. Transaksi penggunaan kartu kredit juga mulai menunjukkan perbaikan dengan berlanjutnya kenaikan nominal secara kuartalan, walaupun secara tahunan masih mengalami kontraksi -31,89% (yoy). Demikian pula dengan nominal belanja yang menggunakan uang elektronik. Pada triwulan IV 2020, penggunaan belanja menggunakan uang elektronik di Jawa tercatat sebesar Rp50,92 triliun atau tumbuh sebesar 19,67% (yoy).

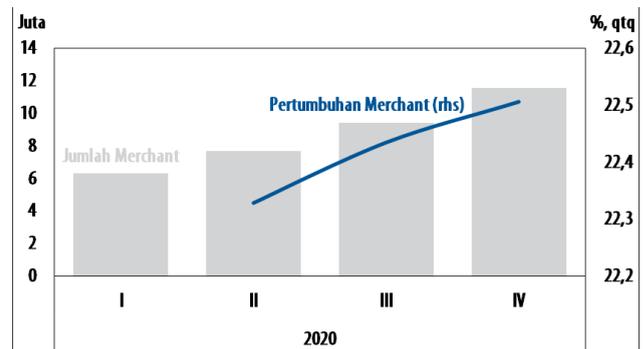
**Jumlah merchant yang menggunakan QRIS terus mengalami peningkatan pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19.** Jumlah merchant QRIS pada triwulan IV 2020 mampu tumbuh 22,5% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2020 yang tumbuh sebesar 22,4% (yoy). Hal ini tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia dalam memperluas implementasi QRIS. Implementasi QRIS di berbagai sektor untuk transaksi pembayaran bermanfaat tidak hanya untuk transaksi perdagangan ritel di pasar tradisional maupun modern dan universitas, namun QRIS

juga telah digunakan untuk *e-ticketing* pariwisata, parkir, e-retribusi Pemda, donasi sosial dan keagamaan.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.11. Perkembangan Transaksi *e-commerce*

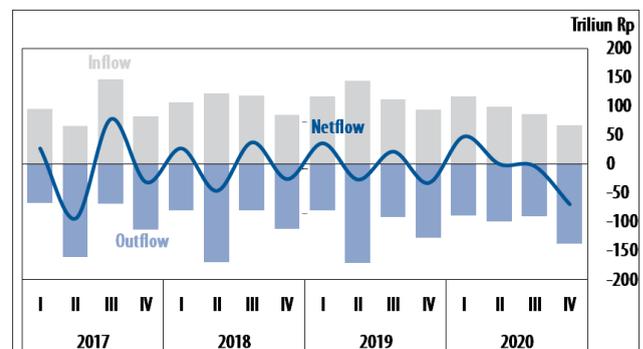


Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.12. Perkembangan QRIS

## Pengelolaan Uang Rupiah

**Pada triwulan IV 2020, arus uang Rupiah di Jawa mengalami net outflow.** *Net outflow* uang Rupiah di Jawa tercatat sebesar Rp69,9 triliun (Grafik III.13). Tingginya *outflow* pada triwulan IV-2020 sejalan dengan meningkatnya jumlah Uang Yang Diedarkan (UYD) antara lain untuk kebutuhan penyaluran bantuan sosial tunai. Dalam kaitan tersebut, selama masa pandemi Bank Indonesia tetap memberikan layanan untuk mendistribusi uang layak edar (ULE) kepada masyarakat dan perbankan baik melalui layanan loket maupun kas titipan, dengan tetap mengedepankan implementasi protokol kesehatan dan mitigasi risiko penyebaran COVID-19.

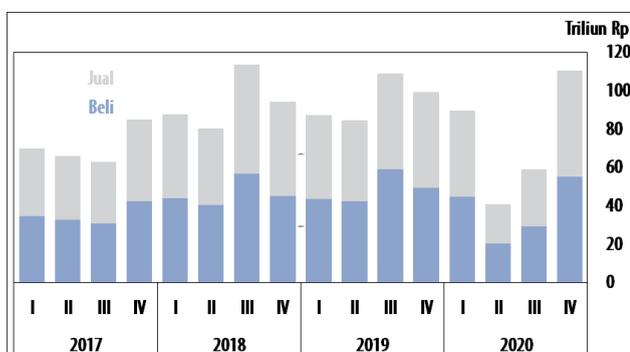


Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.13. Perkembangan *Inflow* dan *Outflow*

## Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Pada triwulan IV 2020, transaksi jual-beli Uang Kertas Asing (UKA) melalui KUPVA BB berizin di Jawa mengalami kenaikan dibandingkan triwulan III 2020 (Grafik III.14). Total transaksi KUPVA BB selama triwulan IV 2020 tercatat sebesar Rp 110,4 triliun, atau meningkat 11,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2020 yang berkontraksi 45,72% (yoy). Transaksi jual UKA sebesar Rp55,36 triliun atau meningkat 11,36% (yoy) dan transaksi beli UKA tercatat Rp55,17 triliun atau meningkat 11,10% (yoy). Mata uang yang mendominasi transaksi jual beli di Jawa adalah dolar AS dan dolar Singapura, masing-masing dengan porsi 28% dan 24%. Peningkatan pertumbuhan tersebut disinyalir sebagai bentuk penguatan optimisme masyarakat terkait perbaikan ekonomi yang terus berlanjut di berbagai daerah.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.14. Perkembangan Transaksi Jual Beli Valas KUPVA BB

## Prospek Perekonomian

### Prospek Pertumbuhan Ekonomi

**Perbaikan ekonomi Jawa 2021 diperkirakan berlanjut pada 2021, terutama ditopang peningkatan permintaan domestik.** Dari sisi domestik, perbaikan konsumsi rumah tangga akan menjadi pendorong utama, seiring dengan pelaksanaan program vaksinasi yang telah dimulai sejak triwulan I 2021. Akselerasi konsumsi rumah tangga diperkirakan semakin tinggi pada paruh kedua 2021 seiring mulai pulihnya keyakinan konsumen pasca vaksinasi dilakukan secara luas kepada masyarakat umum. Perbaikan konsumsi juga didukung oleh kebijakan stimulus pemerintah yang memberikan diskon PPhBM untuk pembelian kendaraan bermotor baru di bawah 1500 cc, serta sejalan dengan ekspektasi pelaku industri ritel yang memprakirakan akan terjadi peningkatan omset penjualan pada 2021. Perbaikan konsumsi pada 2021 sekaligus akan mulai menghidupkan kembali aktivitas pariwisata domestik, yang akan didukung dengan sejumlah strategi kebijakan Pemerintah (Lihat Boks: Strategi Pengembangan Pariwisata di Jawa dalam Menghadapi Era Adaptasi Kebiasaan Baru).

Selain konsumsi rumah tangga, dorongan dari sisi domestik juga didukung perbaikan investasi. Hal ini sejalan dengan peningkatan alokasi belanja modal Pemerintah, antara lain belanja infrastruktur jalan dan kelanjutan relokasi perusahaan global ke wilayah Jawa. Selain itu sejumlah upaya Pemerintah untuk melakukan reformasi struktural seperti mempermudah proses perijinan dan penyediaan lokasi, antara lain pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah dan kawasan metropolitan Rebana di Jawa Barat, juga akan mendukung perbaikan investasi ke depan. Lebih lanjut, peran stimulus fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi diperkirakan meningkat seiring kenaikan pagu belanja APBD Provinsi di Jawa sebesar 12,72%. Selain dari belanja Pemerintah Daerah, percepatan realisasi belanja K/L pada 2021 juga akan mendukung kelanjutan proses pemulihan ekonomi domestik, seperti penyerahan DIPA lebih awal pada 25 November 2020, percepatan pelaksanaan DAK Fisik, serta percepatan realisasi bansos.

**Sejalan dengan membaiknya permintaan domestik, net ekspor akan berkontribusi negatif akibat kenaikan impor.** Peningkatan impor diperkirakan terjadi pada seluruh komponen, baik barang konsumsi, bahan baku produksi, serta barang modal untuk mendukung aktivitas investasi. Selain untuk memenuhi permintaan domestik, kenaikan impor juga akan didorong peningkatan bahan baku produksi guna memenuhi permintaan ekspor. Di sisi lain, permintaan ekspor untuk beberapa produk utama seperti TPT dan otomotif pada 2021 diperkirakan juga meningkat. Beberapa industri mengindikasikan sejumlah order baru pada 2021. Beroperasinya Pelabuhan Patimban juga diperkirakan mendukung perbaikan efisiensi logistik untuk kegiatan ekspor-impor, terutama pada industri otomotif.

**Perbaikan aktivitas konsumsi, investasi dan ekspor pada 2021, diperkirakan mendorong proses pemulihan kinerja LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi.** Penjualan domestik industri makanan minuman pada tahun 2021 akan berangsur pulih seiring dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga. Perbaikan kinerja industri makan minum juga didukung oleh model bisnis berbasis digital, yakni pemesanan dan pengantaran melalui berbagai aplikasi dan *e-commerce*. Peningkatan konsumsi dan investasi pada 2021 juga akan mendorong peningkatan aktivitas industri kemasan dan bahan baku plastik, otomotif, TPT, dan serta industri terkait material bangunan. Pemulihan kinerja LU Industri di Jawa juga diperkirakan turut didorong oleh mulai beroperasinya industri otomotif baru pada semester II 2021 di Jawa Barat. Sementara perbaikan kinerja konstruksi diperkirakan didukung dari PSN dan investasi swasta yang tertunda realisasinya di tahun 2020, serta rencana relokasi beberapa perusahaan dari luar negeri ke

beberapa daerah di Jawa.

### *Prospek Inflasi*

**Inflasi 2021 diperkirakan kembali meningkat, meski tetap dalam kisaran sasaran, seiring berlanjutnya proses perbaikan ekonomi domestik.** Peningkatan permintaan diperkirakan terjadi secara gradual, akibat masih berlakunya kebijakan PPKM pada awal tahun. Dorongan perbaikan permintaan didorong oleh indikasi perbaikan pendapatan meski relatif terbatas, seiring kenaikan Upah Minimum Provinsi di beberapa daerah di Jawa. Di sisi pasokan, kondisi cuaca diperkirakan mendukung produksi pangan, meski pada awal tahun curah hujan masih tinggi. Namun, masih terdapat risiko terganggunya produksi beberapa komoditas pangan akibat La Nina.

**Dalam rangka memitigasi risiko kenaikan harga bahan pangan strategis, TPID wilayah Jawa akan terus melakukan berbagai upaya strategis pengendalian inflasi.** Upaya pengendalian inflasi mengacu pada *roadmap* pengendalian inflasi melalui program 4K<sup>11</sup>. Beberapa program utama yang akan dilakukan antara lain berupa penguatan kelembagaan petani dan pemanfaatan *digital farming*, peningkatan efektivitas kegiatan operasi pasar dan pasar murah, peningkatan kelancaran distribusi pangan melalui pemanfaatan *digital platform* dan transportasi *online*, serta pengembangan sistem informasi penyedia pasokan dan harga terintegrasi. Disamping itu, upaya penguatan koordinasi pusat dan daerah secara berkelanjutan melalui pelaksanaan *high level meeting* dan rapat koordinasi pengendalian inflasi Jawa, juga akan tetap dilakukan secara intensif.

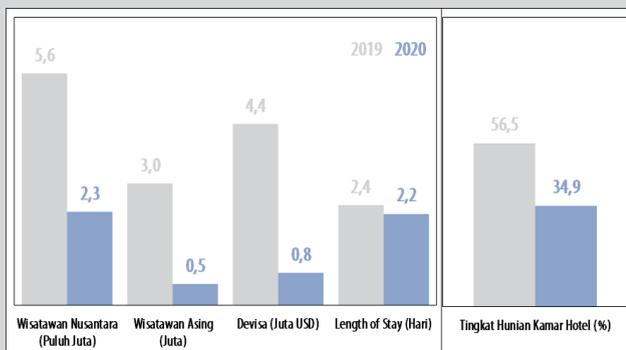
---

<sup>11</sup>4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif

## Strategi Pengembangan Pariwisata Jawa dalam Menghadapi Era Adaptasi Kebiasaan Baru

### Kinerja Pariwisata Jawa di 2020

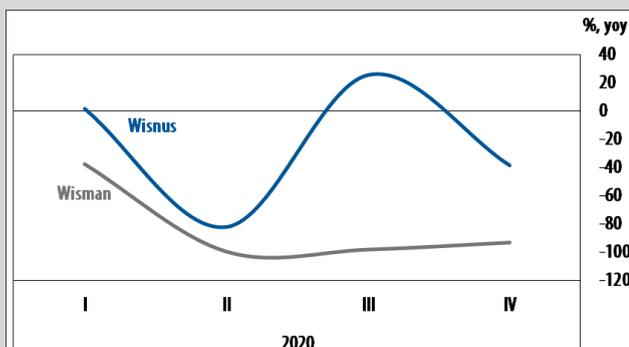
Kinerja pariwisata Jawa mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari terkontraksinya kinerja wisatawan domestik Jawa sebesar 59,62% (yoy) dan wisatawan mancanegara sebesar 82,78% (yoy). Penurunan kinerja pariwisata tahun 2020 juga tercermin dari penurunan devisa, *length of stay*, dan tingkat hunian kamar hotel (Grafik III.15).



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.15. Kinerja Pariwisata Jawa

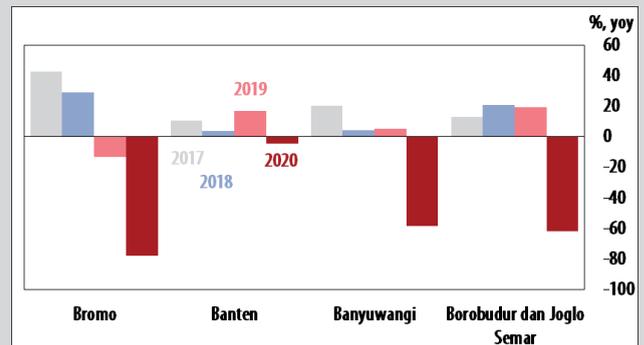
Penurunan kinerja pariwisata Jawa tertahan dengan membaiknya kunjungan wisatawan domestik seiring adanya pelanggaran mobilitas masyarakat pada triwulan III 2020. Hal ini terindikasi oleh tren wisatawan nusantara yang membaik pada triwulan III dibandingkan triwulan II 2020, meskipun kembali menurun pada triwulan IV 2020, akibat pembatalan cuti bersama pada bulan Desember 2020 (Grafik III.16). Sementara itu, kunjungan wisman belum memperlihatkan tanda perbaikan hingga akhir tahun 2020.



Sumber: BPS, diolah

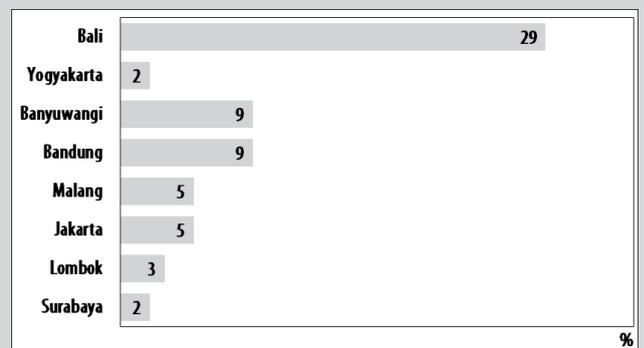
Grafik III.16. Pertumbuhan wisnus dan wisman Wilayah Jawa

Pergeseran preferensi masyarakat dalam berwisata turut berperan dalam perbaikan kinerja pariwisata di Jawa. Sebagaimana hasil survei yang dilaksanakan Bank Indonesia, wisatawan pada era pandemi lebih didominasi oleh wisnus, dengan tujuan destinasi wisata berupa *outdoor*/alam mengingat risiko penularan COVID-19 yang lebih rendah. Selain itu, masyarakat juga lebih memilih berwisata untuk jarak tempuh yang dekat, menggunakan kendaraan pribadi serta menghindari terjadinya kontak langsung dalam layanan wisata. Tanjung Lesung dan Banyuwangi menjadi dua destinasi wisata di Jawa yang berhasil mempertahankan kinerjanya selama pandemi COVID-19. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisnus di Banten hanya terkontraksi sebesar 4,37% (yoy), tidak sedalam penurunan yang dialami Bromo Tengger Semeru dan kawasan Borobudur (Grafik III.17).



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.17. Pertumbuhan Wisatawan Nusantara



Sumber: Survei Online Travel Agent, diolah

Grafik III.18. Tingkat Preferensi Destinasi Wisatawan Nusantara

Sementara itu, Banyuwangi justru mampu meningkatkan ketertarikan calon wisatawan, terindikasi oleh peningkatan peringkat ketertarikan wisatawan, berdasarkan hasil survei preferensi destinasi wisatawan domestik, yaitu dari

peringkat 6 pada tahun 2019 menjadi peringkat 3 pada tahun 2020 (Grafik III.18). Capaian ini didukung oleh beberapa faktor, meliputi: (1) lokasi kedua destinasi tersebut yang relatif dekat dengan sumber wisatawan domestik, (2) menawarkan wisata alam/*outdoor*, (3) adanya upaya inovatif dan kreatif seperti pembuatan aplikasi destinasi yang terintegrasi dan (4) penguatan promosi digital yang telah dilaksanakan secara optimal pada tahun 2020.

## Strategi Mendorong Wisnus di era Pandemi COVID-19

**Disamping upaya percepatan vaksinasi, konsistensi penerapan CHSE menjadi strategi utama untuk meningkatkan *confidence* wisatawan.** Dengan penyebaran COVID-19 yang masih relatif tinggi, pemulihan *confidence* masyarakat untuk berwisata di era adaptasi kebiasaan baru membutuhkan waktu dan terutama bergantung pada kelancaran program vaksinasi. Dalam jangka pendek dan simultan dengan upaya vaksinasi, pelaku usaha pariwisata dapat menerapkan sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability*) dalam menjaga *confidence* wisatawan. Berdasarkan data Kemenparekraf, total sertifikasi CHSE yang telah diterbitkan di Jawa sejumlah 2.809 sertifikat (data 24 Januari 2021). Di sisi lain, berdasarkan hasil *quick survey* kepada pelaku usaha pariwisata, tingkat literasi masyarakat yang sudah mengetahui CHSE cukup tinggi. Lebih lanjut, masyarakat pengguna jasa pariwisata juga lebih memilih unit usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE dibandingkan dengan yang belum tersertifikasi. Hal ini mengindikasikan implementasi CHSE dapat diterima dengan baik oleh wisatawan maupun pelaku usaha wisata, sehingga diharapkan mampu mendukung pemulihan pariwisata di Jawa.

**Penguatan atraksi melalui promosi yang inovatif untuk memaksimalkan potensi wisatawan nusantara.** Dari sisi atraksi, Jawa memiliki berbagai destinasi wisata yang cukup beragam, yaitu *natural tourism* (Bromo-Tengger-Semeru, Tanjung Lesung, Banyuwangi), *cultural tourism* (Borobudur, Joglosemar, Greater Jawa Barat), dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), terutama di DKI Jakarta. Desa wisata yang mampu mengintegrasikan *natural tourism* dan *cultural tourism* menjadi prioritas utama pengembangan wisata di Jawa. Selain itu aktivitas MICE juga kembali didorong dan diintegrasikan dengan konsep inovatif, seperti wisata *staycation* atau *work from hotel* seiring dengan era kebiasaan baru.

**Perbaikan akses untuk integrasi antar destinasi wisata dan perluasan destinasi wisata baru.** Wilayah Jawa memiliki keunggulan dari aspek infrastruktur yang sudah

baik, terlihat dari sudah hampir terhubungnya ujung barat dan ujung timur Pulau Jawa melalui jalan tol, sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan wisata secara aman di dalam pulau Jawa dengan menggunakan kendaraan pribadi. Meski demikian, terdapat ruang perbaikan yang diperlukan, berupa perbaikan akses menuju destinasi wisata dan optimalisasi konektivitas antar destinasi wisata. Oleh karena itu, perbaikan akses menuju destinasi wisata dan konektivitas antar destinasi wisata menjadi program prioritas pada tahun 2021.

**Penerapan digitalisasi pariwisata, merupakan inovasi sektor pariwisata untuk mendorong perbaikan kinerja pariwisata.** Semua provinsi di Jawa telah mencermati kebutuhan adanya portal digital pariwisata, yang mampu mengakomodir berbagai kebutuhan, mulai dari *e-ticket, booking* wisata secara *online*, informasi akomodasi dan transportasi, hingga *marketplace* untuk membeli souvenir. Yogyakarta dan Banyuwangi pun telah membuat aplikasi yang mengakomodir kebutuhan tersebut, melalui aplikasi *Visiting Yoga* dan *Banyuwangi Tourism*. Aplikasi *Banyuwangi Tourism* memiliki fitur yang paling lengkap, karena sudah mencakup info akomodasi yang tersertifikasi CHSE, info zona risiko, dan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit & Laboratorium). Digitalisasi pembayaran melalui QRIS juga menjadi dukungan dalam pemulihan sektor pariwisata. Dorongan penggunaan *cashless transaction* menjadi semakin relevan di masa pandemi COVID-19. Digitalisasi pada tahun 2021 perlu terus ditingkatkan, dengan konsep *integrated tourism application* yang mampu mengakomodir transaksi digital (a.l QRIS, e-ticketing), informasi zona risiko dan fasilitas kesehatan serta mampu menghasilkan *output big data* pariwisata.

**Sinergi dan kolaborasi antarpelaku usaha dan Pemerintah perlu terus dilakukan.** Pandemi COVID-19 semakin menyadarkan pentingnya keterpaduan antarsektor, antaraktor, dan antardaerah, serta keterpaduan antara pusat dan daerah dalam wujud sinergi dan kolaborasi untuk menjaga keberlangsungan pariwisata. Salah satu upaya Pemerintah dalam hal ini melalui pemberian hibah bagi pelaku usaha pariwisata. Sebagai contoh, upaya optimalisasi hibah pariwisata pada tahun 2020 adalah Pemkab Banyuwangi yang mewajibkan penerima hibah untuk bekerjasama dengan UMKM sebagai pemasok souvenir untuk hotel di wilayahnya. Sementara itu, penyediaan *online marketplace* untuk UMKM pariwisata menjadi strategi di sebagian besar Pemda lain, seperti Pemprov Jawa Barat yang membuat *borongdong.id*, yaitu *online marketplace* khusus ASN dan *Jakpreneur* di DKI Jakarta dan *Sibakul* di Yogyakarta yang mengintegrasikan UMKM makanan, fashion, dan kriya. Pengembangan ini dapat menjadi daya

tarik tambahan bagi wisatawan, karena menawarkan kemudahan untuk mencari cinderamata daerah yang bisa dibeli saat berwisata.

## Strategi Jangka Menengah-Panjang: Pengembangan Pariwisata untuk Menyambut Kedatangan Wisman

**Pengembangan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas dan terintegrasi dalam Zona Otorita Borobudur (ZOB).** Badan Otorita Borobudur terus melaksanakan pengembangan kawasan Borobudur dibawah satu program besar bernama "*Zona Otoritatif Borobudur*", untuk dapat memaksimalkan potensi wisatawan nusantara dan mempersiapkan kedatangan wisatawan mancanegara. Progres pengembangan Borobudur memiliki strategi besar, yaitu dekonsentrasi untuk mengurai kunjungan ke wilayah sekitar dan menyebarkan manfaat pertumbuhan sektor pariwisata. Adapun progress pengembangannya yaitu, di aspek **amenitas** berupa penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), baik di dalam maupun di luar kawasan candi, penataan 700 *homestay* dan pembangunan jaringan internet di setiap desa wisata. Sedangkan di sisi **akses** melalui pelebaran jalan akses menuju kawasan candi dan kelanjutan pembangunan kereta bandara YIA yang sudah mencapai progress 71,6% dari target. Dari sisi **pelaku usaha**, juga terus dilaksanakan pengembangan berupa pelaksanaan pelatihan kompetensi masyarakat terkait penerapan CHSE dan pengembangan kompetensi terkait ekonomi kreatif (kerajinan tangan, cinderamata, dll), agar dapat terintegrasi dengan destinasi wisata secara optimal.

*"Halaman ini sengaja dikosongkan"*

## BAGIAN 4

### Perekonomian Kalimantan

**Perbaikan ekonomi Kalimantan terus berlanjut pada triwulan IV 2020, meski masih mengalami kontraksi. Perbaikan ekonomi Kalimantan terutama ditopang oleh peningkatan kinerja kontribusi net ekspor di tengah permintaan domestik yang masih mengalami tekanan. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), perbaikan ekonomi Kalimantan terutama ditopang oleh LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan dan LU Pertanian. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Kalimantan untuk keseluruhan tahun 2020 mengalami kontraksi 2,27% (yoy).**

**Realisasi inflasi di Kalimantan hingga akhir triwulan IV 2020 tetap rendah dan tercatat sebesar 1,37% (yoy), meski meningkat jika dibandingkan dengan triwulan III 2020. Tekanan Inflasi pada periode triwulan IV 2020 tersebut terutama bersumber dari inflasi kelompok bahan makanan, khususnya aneka cabai, minyak goreng, dan telur ayam ras, serta berlanjutnya peningkatan harga emas perhiasan. Secara keseluruhan tahun, inflasi sepanjang tahun 2020 di Kalimantan tetap rendah dan bahkan berada di level terendah sejak tahun 2010 karena permintaan domestik yang cenderung menurun ditengah pasokan yang relatif terjaga.**

**Perbaikan ekonomi Kalimantan yang terjadi sejak semester II 2020 diperkirakan terus berlanjut secara bertahap pada tahun 2021 didukung oleh perbaikan kinerja eksternal dan permintaan domestik. Prakiraan perbaikan tersebut sejalan dengan dimulainya program vaksinasi sehingga dapat mendorong meningkatnya mobilitas secara bertahap, disertai berlanjutnya kebijakan stimulus. Di samping itu, prospek permintaan eksternal yang terus menguat diperkirakan menopang perbaikan kinerja ekonomi Kalimantan ke depan. Dari sisi LU, prospek perbaikan ekonomi Kalimantan didorong oleh kinerja LU utama, yakni Pertambangan, Industri Pengolahan, Pertanian, PHR dan Konstruksi. Sejalan dengan prospek perbaikan perekonomian tersebut, inflasi pada 2021 diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2020, namun masih berada pada kisaran target inflasi nasional  $3 \pm 1\%$ . Ke depan, sinergi Bank Indonesia dan pemerintah serta instansi terkait melalui TPID di seluruh Kalimantan akan terus diperkuat guna memastikan terjaganya inflasi dalam rentang sasaran yang mendukung proses perbaikan ekonomi nasional secara berkelanjutan.**

#### Pertumbuhan Ekonomi

**Perekonomian Kalimantan pada triwulan IV 2020 membaik ditopang perbaikan kontribusi kinerja net ekspor.** Kontraksi perekonomian Kalimantan tercatat 2,81% (yoy) pada Triwulan IV 2020, membaik dari kontraksi triwulan sebelumnya yang sebesar 4,21% (yoy) (Tabel IV.1). Perbaikan tersebut ditopang oleh kontribusi kinerja net ekspor yang meningkat, terutama didorong ekspor batubara ke Tiongkok disertai harga yang meningkat. Demikian halnya dengan ekspor CPO ke Tiongkok dan India yang juga membaik. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh adanya isu geopolitik antara Australia dan Tiongkok sehingga terjadi pengalihan kebutuhan batubara termal oleh Tiongkok ke Indonesia, terutama dari Kalimantan Timur yang cenderung memiliki kesamaan spesifikasi dengan jenis batubara Australia. Di sisi lain, permintaan domestik khususnya konsumsi swasta masih mengalami kontraksi karena mobilitas masyarakat yang tertahan dengan berlanjutnya pembatasan aktivitas untuk menahan laju penyebaran COVID-19. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi karena terbatasnya realisasi belanja APBD sepanjang periode laporan. Sementara itu, kinerja investasi masih lemah, meski penurunan lebih dalam tertahan oleh masih berlanjutnya

pembangunan investasi migas di Kalimantan Timur – meski juga masih dibawah target - dan penyelesaian beberapa proyek infrastruktur pemerintah. Dari sisi LU, perbaikan kinerja eksternal mendukung membaiknya kinerja LU utama di Kalimantan. Kinerja LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Pertanian melanjutnya perbaikan meski masih mencatat pertumbuhan yang negatif pada triwulan IV 2020. Secara spasial, perbaikan kontraksi ekonomi terjadi di hampir seluruh daerah di Kalimantan, kecuali Kalimantan Utara.

**Tabel IV.1.** Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kalimantan

Provinsi	2019				2019	2020				2020
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Kalimantan Barat	5,10	5,21	5,14	4,93	5,09	2,81	-3,49	-4,31	-2,22	-1,82
Kalimantan Tengah	5,85	7,48	5,13	5,94	6,09	2,90	-3,17	-3,14	-2,10	-1,40
Kalimantan Selatan	4,28	4,16	3,98	3,91	4,08	4,09	-2,86	-4,93	-2,94	-1,81
Kalimantan Timur	5,02	4,95	6,23	2,82	4,74	1,38	-5,35	-4,54	-2,83	-2,85
Kalimantan Utara	7,27	7,81	6,45	6,14	6,90	4,61	-2,61	-1,37	-4,76	-1,11
<b>Kalimantan</b>	<b>5,16</b>	<b>5,33</b>	<b>5,62</b>	<b>3,85</b>	<b>4,98</b>	<b>2,35</b>	<b>-4,30</b>	<b>-4,21</b>	<b>-2,81</b>	<b>-2,27</b>

Sumber: BPS, diolah

**Perbaikan ekonomi yang terjadi pada paruh kedua 2020, menahan kontraksi ekonomi Kalimantan lebih dalam.** PDRB Kalimantan tahun 2020 mengalami kontraksi 2,27%, terutama dipengaruhi oleh kinerja net ekspor yang mengalami tekanan sejak triwulan II di tengah permintaan domestik yang juga menurun. Kinerja ekspor komoditas

utama Kalimantan turun cukup dalam pada triwulan II 2020 karena melemahnya permintaan negara mitra dagang, meskipun secara gradual mulai membaik pada paruh kedua 2020. Dari sisi domestik, kinerja konsumsi rumah tangga (RT) berkontraksi sejalan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terbatas akibat COVID-19. Demikian halnya dengan kinerja konsumsi pemerintah dan investasi berkontraksi sejalan penurunan pagu belanja APBD, serta penundaan penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah dan swasta. Dari sisi LU, kinerja LU utama di Kalimantan mengalami penurunan yang cukup dalam seperti LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, termasuk juga LU Konstruksi, LU Perdagangan dan LU Transportasi.

## Kinerja Sisi Penggunaan

### Konsumsi Swasta

**Pada triwulan IV 2020, konsumsi swasta dan pemerintah masih mengalami tekanan.** Konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi lebih dalam menjadi -0,98% (yoy) dari -0,49% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi berlanjutnya pembatasan aktivitas masyarakat untuk penyebaran COVID-19 pada akhir tahun, termasuk pada periode HBKN natal dan tahun baru. Selain itu, perbaikan daya beli masyarakat juga masih relatif terbatas. Menurunnya konsumsi swasta lebih dalam tertahan oleh konsumsi lembaga nonprofint yang membaik terutama ditopang aktivitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Secara spasial, kontraksi konsumsi swasta khususnya konsumsi rumah tangga terjadi di seluruh daerah di Kalimantan. Tekanan pada konsumsi rumah tangga ini juga tercermin dari kredit sektor rumah tangga yang tumbuh melambat, terutama pada jenis kredit kendaraan bermotor (KKB), walaupun rasio *non performing loans* (NPL) tetap terjaga (Tabel IV.2).

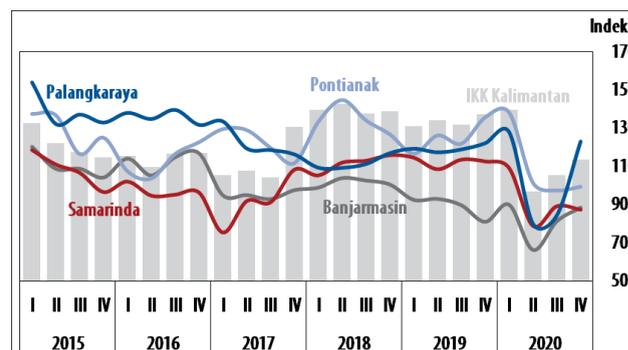
**Tabel IV.2.** Penyaluran Kredit Rumah Tangga di Kalimantan

	Kredit (% yoy)			NPL (%)		
	II '20	III '20	IV '20	II '20	III '20	IV '20
<b>Kredit RT</b>	<b>6,21</b>	<b>4,95</b>	<b>2,57</b>	<b>2,25</b>	<b>2,10</b>	<b>1,82</b>
- KPR	2,18	0,99	2,09	4,40	4,05	3,57
- KKB	0,32	-8,99	-20,20	2,65	2,30	2,07
- Alat RT	19,73	14,81	6,26	3,22	3,99	2,10
- Multiguna	16,25	16,24	7,63	0,94	1,01	0,86
- Lainnya	-50,96	-51,93	-18,54	2,67	1,37	1,40

Sumber: LBU, diolah

**Secara keseluruhan tahun 2020, kinerja konsumsi rumah tangga menurun dibandingkan tahun sebelumnya.** Perkembangan ini sejalan pembatasan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. Hal ini lebih lanjut berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat ditengah pendapatan dari ekspor juga cenderung menurun, sehingga konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi pada 2020. Hal ini juga

tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada tahun 2020 yang secara umum cenderung lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik IV.1).



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

**Grafik IV.1.** Indeks Keyakinan Konsumen

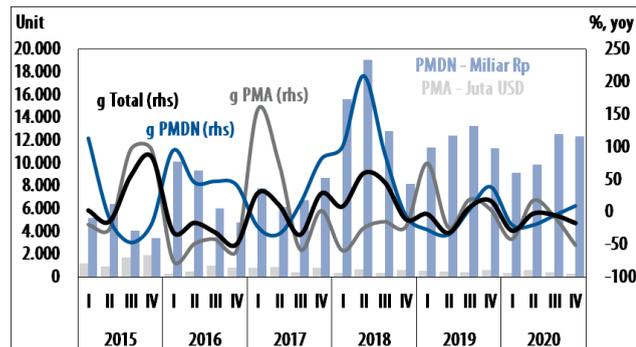
### Konsumsi Pemerintah

**Konsumsi pemerintah kembali berkontraksi setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh positif.** Konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2020 berkontraksi 2,47% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh positif 2,61% (yoy). Hal ini terutama dipengaruhi oleh realisasi anggaran telah dioptimalkan pada triwulan III 2020, terutama untuk penanganan COVID-19. Di samping itu, pagu belanja APBD juga lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, karena *refocusing* dan realokasi anggaran. Penyesuaian terhadap sistem penganggaran baru juga turut memengaruhi kecepatan realisasi belanja beberapa daerah di Kalimantan pada 2020. Kontraksi konsumsi pemerintah lebih dalam pada triwulan IV 2020 tertahan oleh realisasi penyaluran dana Pilkada. Secara spasial, kontraksi konsumsi pemerintah terjadi hampir di seluruh provinsi di Kalimantan, terdapat di Kalimantan Timur. Dengan perkembangan tersebut, maka peran konsumsi pemerintah di Kalimantan secara kumulatif hingga akhir 2020 menjadi terbatas. Sumber penerimaan fiskal daerah yang menurun baik transfer dari Pemerintah Pusat maupun pendapatan daerah menyebabkan ruang stimulus belanja daerah menjadi lebih rendah dengan pagu belanja APBD penyesuaian yang turun pada 2020.

### Investasi

**Kinerja investasi di Kalimantan pada triwulan IV 2020 mengalami masih mengalami tekanan.** Investasi berkontraksi 6,27% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,01% (yoy). Hal ini antara lain dipengaruhi oleh berbagai realisasi proyek investasi mengalami penundaan atau berjalan lebih lambat dari target akibat dampak pandemi COVID-19, termasuk penyelesaian proyek investasi migas di Kalimantan Timur yang tetap berjalan walaupun dibawah target. Kontraksi tersebut juga sejalan dengan realisasi investasi total PMA dan PMDN Kalimantan yang mengalami penurunan menjadi Rp16,86 triliun, dari Rp 18,44 triliun pada triwulan

sebelumnya (Grafik IV.2). Selain proyek investasi migas yang tetap berlangsung, terdapat beberapa proyek investasi lain di Kalimantan yang menahan penurunan kinerja investasi lebih dalam antara lain pembangkit listrik di Kalimantan Utara dan beberapa proyek jembatan di Kalsel. Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan tahun kinerja investasi Kalimantan mengalami kontraksi, baik bangunan maupun non bangunan, akibat penundaan penyelesaian proyek akibat dampak pandemi COVID-19. Di samping itu, proses pembangunan berbagai proyek juga sempat menghadapi kendala dari sisi logistik dan mobilitas tenaga kerja ahli, terutama di awal masa pandemi.



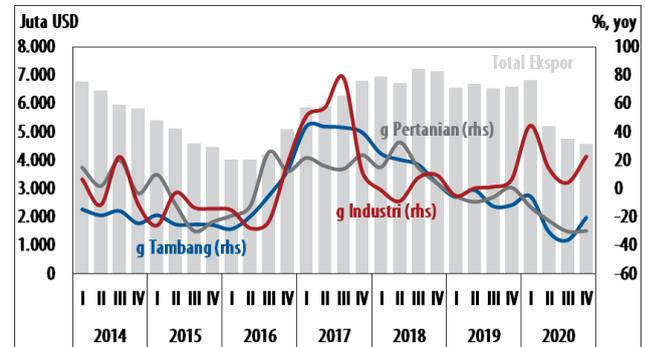
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), diolah  
**Grafik IV.2.** Realisasi PMA dan PMDN di Kalimantan

### Kinerja Ekspor-Impor

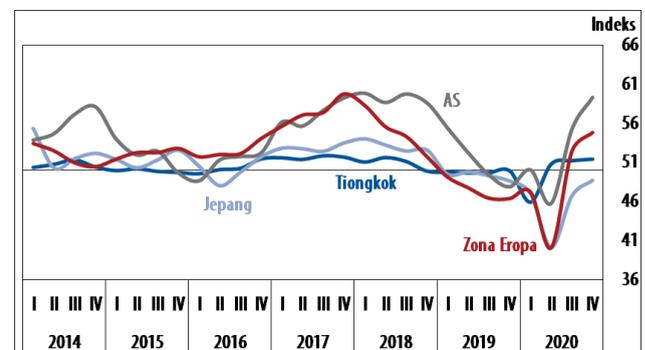
**Kontribusi net ekspor pada triwulan IV 2020 terus membaik, ditopang meningkatnya kinerja ekspor luar negeri (LN).** Kinerja ekspor LN yang meningkat terutama didorong oleh meningkatnya permintaan komoditas tambang, khususnya batubara untuk tujuan Tiongkok (Grafik IV.3). Menguatnya permintaan dari Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di negara tersebut di tengah terbatasnya ketersediaan pasokan batubara domestiknya. Selain itu, isu geopolitik antara Tiongkok dan Australia juga turut berdampak pada pasokan batu bara Tiongkok dan turut memicu kenaikan harga komoditas tersebut di pasar global. Peningkatan ekspor batubara ke Tiongkok ini sejalan dengan pemulihan ekonomi negara tersebut sebagaimana tercermin dari peningkatan Purchasing Managers' Index (Grafik IV.4). Perbaikan kontraksi juga didukung ekspor komoditas CPO terutama ke India, terutama untuk memenuhi kebutuhan terkait perayaan Diwali. Di sisi lain, impor luar negeri di Kalimantan berada dalam tren yang membaik.

**Secara keseluruhan tahun 2020, net ekspor berkontribusi negatif pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan.** Hal ini terutama disebabkan oleh perbaikan kinerja ekspor LN, khususnya batubara, yang mulai terjadi pada paruh kedua 2020 masih relatif terbatas sehingga tidak dapat mengkompensasi penurunan yang terjadi sepanjang tahun 2020. Demikian halnya untuk ekspor LN komoditas

CPO yang mulai menunjukkan perbaikan cukup signifikan pada paruh kedua 2020. Sementara itu, kebutuhan impor juga menurun sejalan dengan permintaan domestik yang melemah akibat pembatasan aktivitas masyarakat untuk mitigas COVID-19.



Sumber: Bea Cukai, diolah  
**Grafik IV.3.** Nilai Ekspor Kalimantan



Sumber: investing.com, diolah  
**Grafik IV.4.** Purchasing Managers' Index

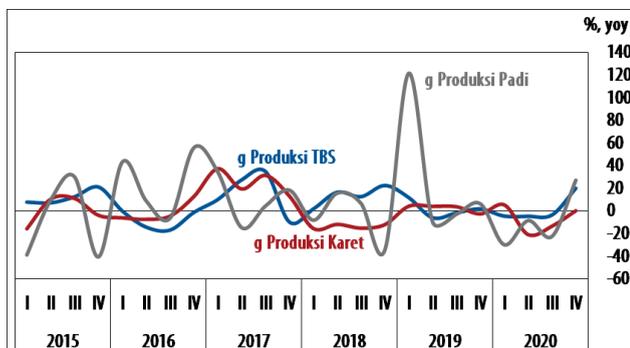
### Kinerja Lapangan Usaha

#### Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

**Kinerja LU Pertanian membaik pada triwulan IV 2020, ditopang meningkatnya produksi perkebunan.** LU Pertanian berkontraksi 0,90% (yoy), membaik dibandingkan triwulan III 2020 yang berkontraksi 1,31% (yoy). Produksi tandan buah sawit (TBS) meningkat seiring dengan pergeseran masa puncak panen ke triwulan IV 2020 (Grafik IV.5). Menguatnya permintaan ekspor CPO pada periode triwulan IV 2020 turut berdampak positif pada perbaikan kinerja produksi TBS. Selain itu, peningkatan kinerja produksi karet juga menunjukkan perbaikan disertai harga karet di pasar global yang meningkat sehingga turut menopang perbaikan kinerja LU Pertanian pada triwulan IV 2020. Hal ini tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang turut mengalami peningkatan. Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit untuk LU Pertanian cenderung tumbuh melambat. Risiko *non-performing loan* (NPL) tetap terjaga, walaupun meningkatnya indikator LAR tetap menjadi perhatian (Tabel IV.3).

**Secara keseluruhan tahun 2020, LU Pertanian Kalimantan masih tumbuh positif meski tidak setinggi**

**tahun sebelumnya.** Melambatnya perumbuhan LU pertanian, terutama akibat dampak kemarau panjang pada 2019 yang memengaruhi produksi dan kualitas panen TBS pada 2020. Selain itu, cuaca yang relatif kurang kondusif di akhir tahun 2020 akibat fenomena La Nina turut memengaruhi kinerja LU Pertanian di Kalimantan.



Sumber: Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO) serta Dinas Pemda terkait, diolah

**Grafik IV.5.** Pertumbuhan Produksi Pertanian

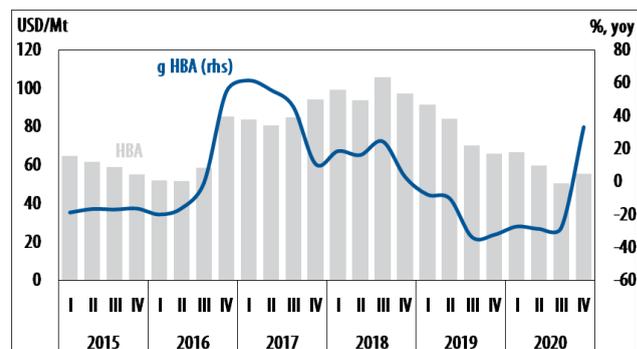
**Tabel IV.3.** Perkembangan Kredit, NPL dan LaR Korporasi

Sektor	Kredit (% yoy)		NPL (%)		LAR (%)	
	III '20	IV '20	III '20	IV '20	III '20	IV '20
<b>Umum</b>	<b>2,30</b>	<b>7,87</b>	<b>3,57</b>	<b>2,95</b>	<b>16,34</b>	<b>22,78</b>
- Sektor Utama	2,92	4,48	3,45	3,03	15,96	21,54
- Pertanian	13,54	5,08	0,62	1,09	8,05	16,29
- Pertambangan	-5,44	12,54	5,04	3,43	1,49	20,19
- Industri	-20,98	13,15	4,72	2,44	30,15	32,20
- Konstruksi	36,44	26,59	9,12	7,68	22,83	29,56
- Perdagangan	-12,08	-22,59	6,35	6,20	33,11	28,08

Sumber: LBU, diolah

## Pertambangan dan Penggalian

**Permintaan eksternal yang menguat mendorong perbaikan kinerja LU Pertambangan pada triwulan IV 2020.** Kinerja LU Pertambangan pada triwulan IV 2020 mengalami kontraksi 5,36% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan III 2020 yang terkontraksi 6,88% (yoy). Perbaikan ini dipengaruhi kinerja pertambangan batubara yang meningkat ditopang terutama permintaan Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di negara tersebut yang tengah memasuki musim dingin. Selain itu, faktor harga yang meningkat karena dipicu isu geopolitik antara Tiongkok dan Australia turut menopang perbaikan kinerja LU Pertambangan di Kalimantan. Di sisi pembiayaan, penyaluran kredit dari perbankan juga mengalami peningkatan ada triwulan IV 2020 dengan kualitas kredit yang juga membaik (Tabel IV.3). Meskipun mengalami perbaikan pada paruh kedua 2020, secara keseluruhan tahun LU Pertambangan mengalami kontraksi. Hal ini dipengaruhi oleh masih relatif terbatasnya perbaikan yang terjadi sehingga tidak dapat mengkompensasi penurunan yang terjadi sepanjang tahun 2020.

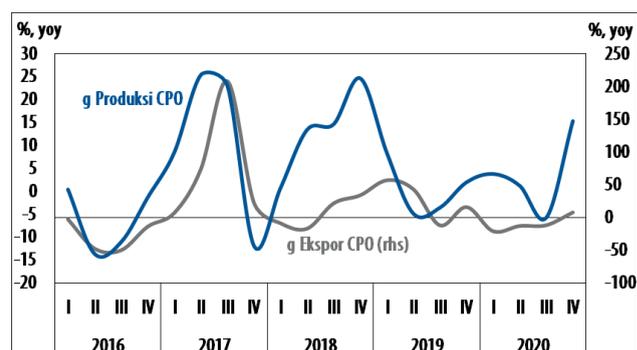


Sumber: Kementerian ESDM, diolah

**Grafik IV.6.** Indeks Harga Batubara Acuan

## Industri Pengolahan

**Kinerja LU Industri Pengolahan mulai membaik pada triwulan IV 2020, walaupun masih terkontraksi.** Pada triwulan IV 2020, LU industri pengolahan terkontraksi 1,77% (yoy), membaik dibandingkan triwulan III 2020 yang terkontraksi 6,20% (yoy). Membaiknya kinerja LU Industri pengolahan ditopang oleh kinerja produksi CPO yang meningkat merespons permintaan dari Tiongkok, ASEAN, Amerika, dan India (Grafik IV.7). Di sisi domestik, kinerja industri didorong oleh berlanjutnya program B30 yang didukung keberlangsungan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dengan perkembangan tersebut, penurunan kinerja LU Industri Pengolahan pada 2020 yang lebih dalam relatif tertahan. Hal ini dipengaruhi oleh permintaan domestik yang cenderung melemah akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat sehingga berdampak pada penyerapan biodiesel. Selain itu, perbaikan permintaan minyak nabati untuk pasar ekspor pada paruh kedua 2020 juga relatif masih terbatas. Terhentinya aktivitas kilang minyak Pertamina di Kaltim pada periode April-Mei 2020 turut menekan kinerja LU ini.



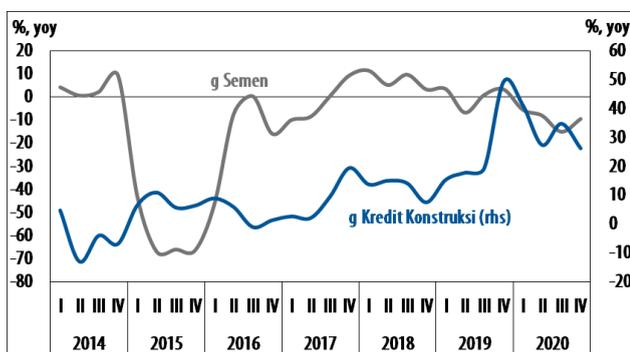
Sumber: Dinas Perkebunan dan DJBC, diolah

**Grafik IV.7.** Pertumbuhan Produksi dan Ekspor CPO

## Konstruksi

**Perbaikan kinerja LU Konstruksi masih terbatas pada triwulan IV 2020.** LU Konstruksi terkontraksi 4,20% (yoy), sedikit membaik dari -4,28% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan kinerja LU ini ditopang oleh berlanjutnya beberapa proyek swasta dan pemerintah

seperti Jalan Banjarbaru-Batulicin (Kalsel), Pelabuhan Kijing (Kalbar), serta Tol Balikpapan-Samarinda (Kaltim). Masih terbatasnya perbaikan LU Konstruksi ini tercermin pada penjualan semen yang masih tumbuh negatif. Selain itu, kredit konstruksi juga tumbuh melambat pada triwulan IV 2020 (Grafik IV.8). Dengan perkembangan tersebut LU Konstruksi pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan. Pandemi COVID-19 menyebabkan relatif terbatasnya logistik dan mobilitas tenaga kerja, terutama pada awal masa pandemi, sehingga berdampak pada kecepatan realisasi penyelesaian proyek. Selain itu, *refocusing* anggaran yang dilakukan untuk penanganan COVID-19 juga turut memengaruhi rencana pengerjaan beberapa proyek baru seperti pembangunan Bendungan Kusan di Kalsel.



Sumber: LBU dan Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik IV.8. Konsumsi Semen dan Kredit Konstruksi Kalimantan

## Perdagangan

**Tekanan kinerja LU Perdagangan pada triwulan IV 2020 membaik sejalan dengan kinerja ekspor.** Perbaikan kinerja LU Perdagangan ini terutama karena meningkatnya kegiatan perdagangan besar, khususnya untuk ekspor batubara dan CPO. Selain itu, penyelenggaraan Pilkada serentak pada akhir tahun 2020 turut menopang perbaikan kinerja LU ini walaupun dampaknya relatif terbatas karena berlanjutnya pembatasan aktivitas. Di sisi lain, pembatasan aktivitas tersebut menyebabkan dorongan momen perayaan HBKN pada akhir tahun terhadap kinerja LU Perdagangan tidak sekuat historisnya. Untuk keseluruhan tahun 2020, LU Perdagangan terkontraksi seiring permintaan domestik yang menurun di seluruh daerah di Kalimantan, terutama sejak triwulan II 2020.

## Fiskal Daerah

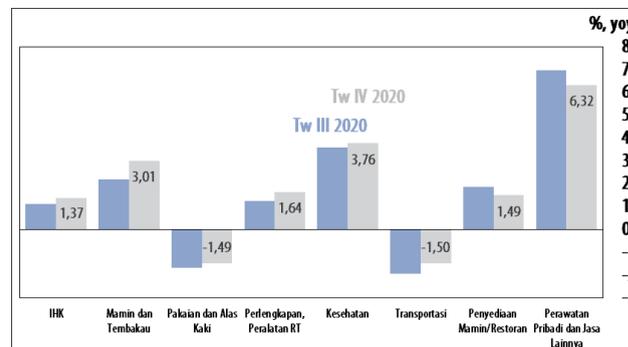
**Peran fiskal daerah pada 2020 terbatas karena menurunnya sumber pendapatan, baik dari transfer pemerintah maupun pendapatan asli daerah.** Realisasi dana perimbangan hingga akhir 2020 tercatat Rp16,14 triliun, turun dibandingkan Rp17,08 triliun pada tahun

sebelumnya<sup>12</sup>. Secara umum, penurunan terjadi karena revisi pagu TKDD seiring *refocusing* dan realokasi untuk penanganan COVID-19 yang tersentralisasi. Sejalan dengan hal tersebut dan terbatasnya aktivitas ekonomi Kalimantan karena pandemi COVID-19, pendapatan asli daerah turun lebih dalam. Pendapatan APBD Kalimantan pada triwulan IV 2020 tercatat turun hingga 17,80% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp32,4 triliun. Penurunan pendapatan asli daerah terjadi di seluruh provinsi di Kalimantan, antara lain bersumber dari pajak kendaraan bermotor, terutama bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang merupakan sumber pajak dengan nominal terbesar pada kategori pajak kendaraan bermotor.

**Sejalan dengan menurunnya pendapatan, realisasi belanja APBD Kalimantan hingga akhir 2020 menjadi terbatas.** Realisasi belanja daerah tahun 2020 turun 12,1% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp27,8 triliun. Penurunan ini terutama terjadi pada komponen belanja operasional dan transfer serta belanja modal, sejalan penyesuaian belanja yang dilakukan oleh pemda, termasuk pembatasan dinas dan pengadaan barang dan jasa. Dampaknya penyerapan realisasi belanja daerah keseluruhan tahun 2020 tercatat 87,4%, lebih rendah dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 89,9%.

## Perkembangan Inflasi

**Inflasi Kalimantan pada akhir triwulan IV 2020 sedikit meningkat didorong oleh beberapa harga komoditas pangan.** Pada triwulan laporan, inflasi Kalimantan tercatat 1,37% (yoy), lebih tinggi dari triwulan III 2020 yang sebesar 1,13% (yoy) (Grafik IV.9). Kenaikan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama komoditas hortikultura seperti aneka cabai akibat curah hujan yang cukup tinggi sehingga memengaruhi produksi. Selain itu, kenaikan inflasi juga turut dipengaruhi oleh harga telur ayam ras seiring meningkatnya permintaan di tengah pasokan yang terbatas.



Sumber: BPS (tahun dasar 2018 = 100), diolah

Grafik IV.9. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

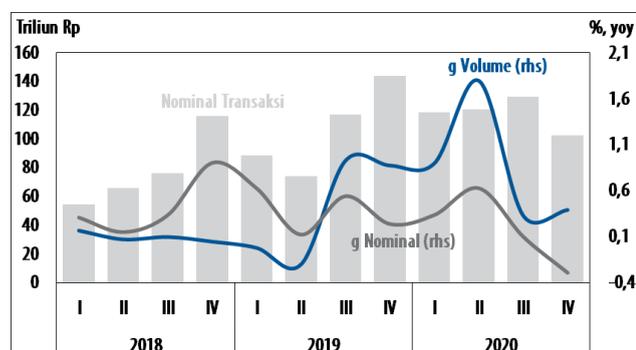
<sup>12</sup> Data merupakan agregat realisasi APBD Propinsi, tidak termasuk APBD Kab/Kota

Tekanan inflasi yang lebih tinggi juga dipengaruhi oleh naiknya harga emas perhiasan seiring ketidakpastian ekonomi ditengah pandemi COVID-19. Di sisi lain, deflasi kelompok transportasi masih berlanjut terutama untuk tarif angkutan udara seiring masih terbatasnya mobilitas masyarakat. Dengan perkembangan tersebut, tekanan inflasi Kalimantan pada 2020 tercatat rendah, sejalan dengan menurunnya permintaan domestik selama pandemi COVID-19.

## Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

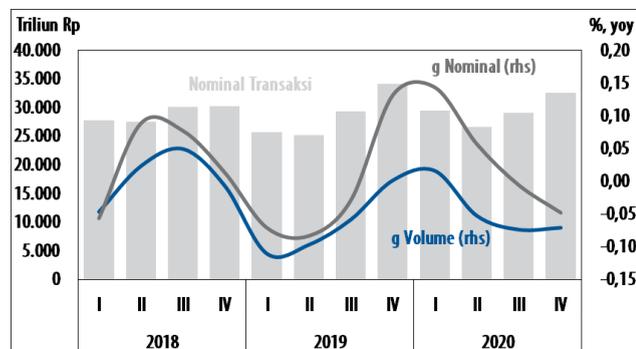
### Sistem Pembayaran Nontunai

**Masih terbatasnya perbaikan ekonomi tercermin pada transaksi nontunai di Kalimantan, baik melalui RTGS maupun kliring.** Volume transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) pada triwulan IV 2020 tumbuh 39,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 33,19% (yoy) (Grafik IV.10). Meskipun demikian, secara nominal masih cenderung terkontraksi. Demikian halnya dengan volume transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang membaik walaupun masih tumbuh negatif (Grafik IV.11). Dari sisi nominal, kliring terkontraksi sebesar 4,75% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,55% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.10. Perkembangan Nilai dan Volume Transaksi RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.11. Perkembangan Nilai dan Volume Transaksi SKNBI

**Penyaluran bansos nontunai di Kalimantan meningkat terutama dari sisi penyerapan penerima manfaat.** Secara

nominal penyaluran Program Sembako tercatat Rp449,1 miliar pada triwulan IV 2020, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp469,4 miliar. Namun, efektifitas penyerapan berdasarkan jumlah KPM di wilayah Kalimantan mengalami peningkatan yakni rata-rata sebesar 91,2%, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2020 yang sebesar 80,08%, dengan penyerapan tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan. Dari sisi nominal, kinerja penyerapan untuk masing-masing tahapan penyaluran bantuan secara rata-rata di triwulan IV 2020 lebih tinggi yaitu sebesar 82,56% dibandingkan dengan rata-rata di triwulan III 2020 sebesar 78,93%. Sementara itu, realisasi Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalimantan pada triwulan IV 2020 sebesar Rp295,1 miliar, sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan III 2020 yang sebesar Rp297,1 miliar. Secara persentase, realisasi penyerapan PKH di Kalimantan pada triwulan IV 2020 secara rata-rata mencapai 95%, lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang sebesar 97%.

### Pengelolaan Uang Rupiah

**Aliran uang kartal di Kalimantan sepanjang triwulan IV 2020 mengalami net outflow.** *Net outflow* triwulan IV 2020 tercatat sebesar Rp12,66 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2020 yang sebesar Rp2,09 triliun. Secara spasial, seluruh wilayah Kalimantan mencatatkan *net outflow*, tertinggi di Kalimantan Barat dengan nilai sebesar Rp4,05 triliun. Sementara itu, *net outflow* terendah terjadi di Kalimantan Selatan dengan nilai sebesar Rp0,56 triliun. Berdasarkan nominal pecahannya, permintaan terhadap uang kartal masih didominasi uang pecahan besar yaitu uang pecahan Rp100.000 (62,67%) dan Rp50.000 (34,81%).

### Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

**Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) berizin mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.** Transaksi KUPVA BB pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar Rp87,49 miliar untuk transaksi penjualan dan Rp81,59 miliar untuk transaksi pembelian. Nilai tersebut lebih rendah dibanding transaksi penjualan dan pembelian pada triwulan III 2020 yang sebesar Rp97,28 miliar untuk transaksi penjualan dan Rp95,20 miliar untuk transaksi pembelian. Secara spasial, KUPVA BB berizin (Kantor Pusat dan Kantor Cabang) terbanyak terdapat di Kalimantan Barat yaitu 40 KUPVA BB, dengan nominal transaksi pembelian sebesar Rp77,17 miliar menjadi yang tertinggi di Kalimantan.

## Prospek Perekonomian

### Prospek Pertumbuhan Ekonomi

**Perbaikan kinerja ekonomi Kalimantan diperkirakan**

**terus berlanjut pada 2021.** Dari sisi domestik, konsumsi RT dan LNPRT diperkirakan meningkat, didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat sejalan dengan mulai membaiknya aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat pasca program vaksin COVID-19 dilakukan secara meluas, serta berlanjutnya realisasi anggaran dan program stimulus perekonomian. Peningkatan alokasi belanja daerah pada 2021 diperkirakan turut menopang perbaikan ekonomi Kalimantan. Kinerja juga diperkirakan meningkat didukung oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara Baru (IKNB) dan pengembangan *food estate*, serta proyek investasi swasta yang didukung oleh peningkatan iklim investasi dengan implementasi UU Cipta Kerja. Dari sisi eksternal, perbaikan ekonomi mitra dagang utama diperkirakan mendorong permintaan ekspor komoditas Kalimantan, terutama Batubara dan CPO. Di samping itu, beroperasinya Pelabuhan Kijing di Kalbar pada akhir triwulan I 2021 dapat mendukung aktivitas ekspor ke depan.

#### **Membaiknya permintaan domestik dan eksternal, lebih lanjut mendukung perbaikan LU utama di Kalimantan.**

Kinerja LU Pertanian diperkirakan meningkat, didorong oleh masuknya masa panen tabama dan kelapa sawit serta semakin membaiknya permintaan domestik dan global terhadap CPO. Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan meningkat didorong oleh berlanjutnya program hilirisasi batubara, seperti pupuk dan methanol, serta hilirisasi kelapa sawit seiring beroperasinya pabrik CPO dan B30 baru di Kaltim untuk mendukung keberlanjutan program B30. Kinerja LU Pertambangan diperkirakan melanjutkan perbaikan didorong permintaan eksternal yang menguat seiring perbaikan ekonomi dan mobilitas di negara utama tujuan ekspor. Permintaan batubara domestik untuk kebutuhan pembangkit listrik (PLTU) juga diperkirakan meningkat, sejalan dengan prakiraan peningkatan aktivitas masyarakat dan kinerja produksi ke depan. Sementara itu, kinerja LU Konstruksi membaik ditopang berlanjutnya proyek-proyek PSN *multiyear* seperti pembangunan proyek infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara Baru (IKNB), dan proyek swasta dan pemerintah lainnya seperti PLTA SEI Kayan (Kalimantan Utara), Bendungan Sepaku Semoi (Kalimantan Timur), serta berlanjutnya pembangunan proyek *food estate*. Kinerja LU Perdagangan diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas pariwisata di Kalimantan (Lihat Boks: Strategi Pengembangan Singkawang Mendukung Perbaikan Sektor Pariwisata)

#### *Prospek Inflasi*

**Inflasi Kalimantan pada 2021 diperkirakan kembali meningkat dalam rentang sasaran inflasi nasional**

**3,0%±1%.** Peningkatan inflasi didorong oleh peningkatan tekanan permintaan disertai daya beli masyarakat yang terus membaik seiring aktivitas ekonomi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kembali mobilitas, tarif angkutan diperkirakan berkontribusi pada kenaikan inflasi Kalimantan pada 2020. Di samping itu, Sementara itu, kenaikan permintaan terhadap komoditas pangan baik dari rumah tangga maupun dari pelaku usaha horeka (hotel, restoran, dan kafe) dipekirakan turut mendorong inflasi Kalimantan.

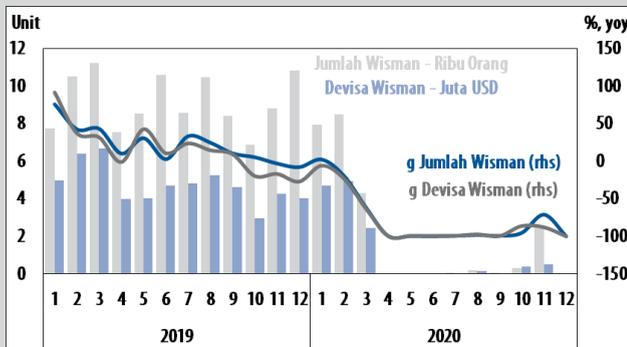
#### **Untuk memastikan inflasi Kalimantan tetap terjaga, koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat.**

Hal ini didukung oleh berbagai langkah dan program TPID dengan tetap mengacu pada kerangka 4K, terutama melalui penyelenggaraan pasar penyangga sebagai upaya dalam menjaga keterjangkauan harga, serta pemanfaatan teknologi digital melalui *e-commerce platform* dan aplikasi untuk mendukung pemasaran. Selain itu, TPID terus memberikan bantuan sarana produksi (saprodi) pertanian seperti bibit unggul serta melakukan pendampingan terhadap petani.

## Strategi Pengembangan Singkawang Mendukung Perbaikan Sektor Pariwisata

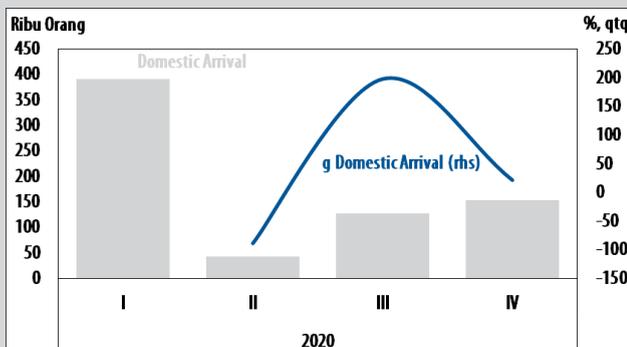
### Kondisi Pariwisata 2020

Kinerja sektor pariwisata di Kalimantan menurun signifikan sejak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Total kunjungan wisman dari 3 pintu masuk udara dan 7 pintu masuk non-udara selama tahun 2020 tercatat 24,1 ribu orang (terkontraksi 78,12%, yoy) dan penerimaan devisa pariwisata hanya sebesar USD 3,3 juta (terkontraksi 76,48%, yoy) seperti terangkum dalam Grafik IV.12. Meskipun demikian, di tengah kinerja wisman yang menurun, aktivitas wisnus secara gradual menunjukkan perbaikan. Pasca relaksasi PSBB pada Juni 2020, aktivitas wisnus menunjukkan peningkatan, tercermin dari kedatangan penumpang domestik melalui bandara di destinasi utama wisata (Supadio) dan kenaikan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel (Grafik IV.13 – Grafik IV.14). Besarnya pangsa wisnus terhadap total wisatawan di wilayah Kalimantan (95,66%), menyebabkan penurunan kinerja wisman selama 2020 berdampak minimal terhadap kinerja pariwisata Kalimantan secara keseluruhan.



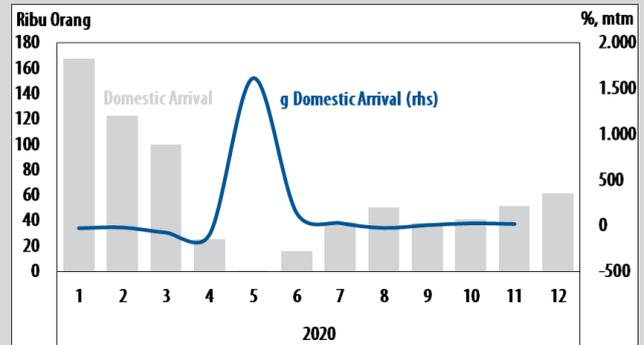
Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.12. Kunjungan dan Devisa Wisman



Sumber: Bank Indonesia

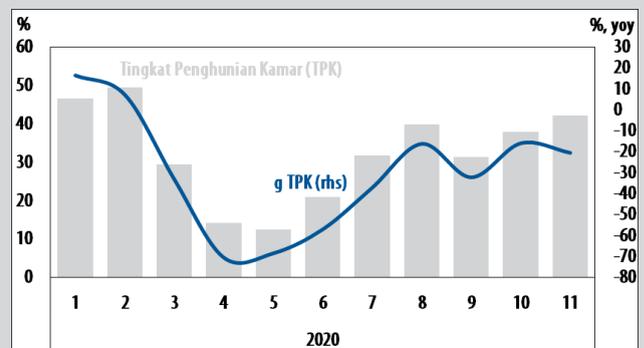
Grafik IV.13. Kedatangan Domestik di Bandara Supadio (Triwulanan)



Sumber: Bank Indonesia

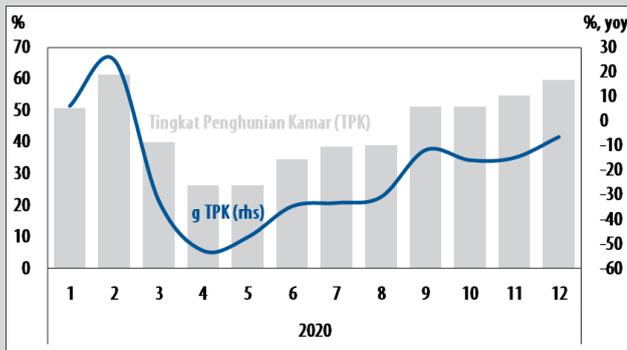
Grafik IV.14. Kedatangan Domestik di Bandara Supadio (Bulanan)

Fenomena peningkatan kunjungan wisnus terjadi di beberapa destinasi wisata unggulan di Kalimantan, terutama Singkawang. Fenomena ini didukung oleh perubahan perilaku wisata pasca Covid-19, yang lebih memilih atraksi/destinasi di daerah sekitar. Jumlah kunjungan wisnus ke kota Singkawang tahun 2020 tercatat 286,08 ribu orang, meningkat 8,05% (yoy). Kondisi ini berkebalikan dengan capaian kunjungan wisman pada periode yang sama, yang turun sebesar 20,36% (yoy). Sementara itu, performa kunjungan wisnus ke Kabupaten Berau-Kepulauan Derawan, turun moderat 56,55% (yoy) dibandingkan dengan kunjungan wisman, yang turun sebesar 97,36% (yoy) pada periode yang sama. Sejalan dengan tren peningkatan kunjungan wisnus sejak relaksasi PSBB, TPK hotel di kedua destinasi unggulan tersebut juga terus meningkat, sehingga pada bulan Desember 2020, menunjukkan level yang hampir menyamai TPK hotel sebelum pandemi COVID-19 (Grafik IV.15 - Grafik IV.16).



Sumber: BPS, diolah

Grafik IV.15. Tingkat Hunian Hotel Singkawang



Sumber: BPS, diolah

Grafik IV.16. Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Berau

## Strategi Peningkatan Kunjungan Wisnus

**Meningkatnya kunjungan wisnus ke Singkawang, tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Pusat (Pempus) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).**

Program Padat Karya Tunai (PKT) yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Singkawang untuk revitalisasi objek wisata telah terealisasi sebesar 86.30%. Sementara itu, Pemkot Singkawang menggunakan anggaran PEN yang diterima dalam bentuk hibah untuk membangun akses ke obyek wisata yang ada di Singkawang, seperti pembangunan jalan menuju wisata agro kebun Mesopa. Selain itu, sebanyak 66,19% pelaku usaha pariwisata (4.034 debitur) telah memanfaatkan restrukturisasi kredit di Bank Kalbar, dengan nominal Rp661,92 miliar. Sementara itu, untuk meningkatkan keyakinan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata secara aman di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), beberapa hotel di Singkawang telah memiliki sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE). Kendati sebagian hotel lainnya belum tersertifikasi CHSE, hotel tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan. Ke depan, sosialisasi kepada pelaku usaha dan wisatawan mengenai proses pengurusan dan manfaat CHS, perlu untuk terus didorong. Sejalan dengan itu, program restrukturisasi kredit perlu terus dilanjutkan, mengingat kinerja kredit pariwisata terus menunjukkan tren peningkatan. Disamping itu, percepatan vaksinasi COVID-19 di kota Singkawang perlu dilakukan, karena realisasinya baru mencapai 16,32% dari target<sup>13</sup>. Hal ini juga sejalan dengan hasil Survei Preferensi Wisnus di Kalimantan, yang menyatakan bahwa mayoritas wisnus (83%) meyakini pemberian vaksin dapat mendorong kinerja pariwisata.

**Pemda Singkawang mendukung penguatan program**

**Pempus dalam perbaikan wisnus, melalui promosi dan sosialisasi protokol kesehatan.** Sebagai salah satu upaya reaktivasi pariwisata dan ekonomi kreatif di Singkawang, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong perbaikan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui revitalisasi amenitas dalam program "Singkawang *Rebound*", sebagai bagian dari penguatan program Sapta Pesona (SP). Dukungan tersebut dilakukan melalui pemberian bantuan alat pendukung kebersihan, kesehatan, dan keamanan, berupa pembuatan wastafel, sapu pantai, desinfektan, tempat sampah, pengecek suhu, dan *signage* SP. Melalui program ini, diharapkan dapat memberikan semangat bagi pelaku usaha untuk menyiapkan destinasi yang bersih, aman, sehat, dan lestari, didukung oleh promosi wisata #PastiKeSingkawang yang dilakukan melalui media sosial dan penyelenggaraan acara berbasis hobi dan prestasi (Lomba Cipta Karya Lagu Singkawang) oleh Pemda. Lebih lanjut, Pemda juga melakukan sosialisasi protokol kesehatan di berbagai hotel, restoran, dan destinasi wisata, melalui himbuan dengan menggunakan *standing banner* dan spanduk.

**Pempus dan Pemda Singkawang terus melanjutkan pengembangan atraksi guna menambah kunjungan wisnus.** Sejalan dengan itu, Pempus dan Pemda Singkawang terus mengembangkan destinasi pariwisata melalui peningkatan atraksi. Upaya tersebut terutama terlihat pada pengembangan kota Pusaka, yang merupakan salah satu atraksi utama. Penataan untuk memperindah Kota Pusaka dilakukan melalui pembangunan gapura oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dengan pembiayaan APBN, pembangunan trotoar (Singkawang *Citywalk*) oleh Pemda Singkawang, revitalisasi Pasar Beringin dan Pasar Turi, serta peresmian jalan *paving* sepanjang 190 meter, bekerjasama dengan KemenPUPR melalui program Kotaku. Saat ini, Pemda tengah menyusun rencana induk revitalisasi kedua pasar tersebut, dengan skema kerja sama Bangun Guna Serah (BGS).

**Sinergi dengan program Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) #DiIndonesiajaja (BBWI), menjadi strategi utama peningkatan wisnus pada tahun 2021.** Sinergi tersebut dapat dilakukan melalui promosi paket wisata atau subsidi *voucher* pembelian produk wisata Singkawang. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan dukungan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, melalui penyiapan dan perluasan penggunaan pembayaran nontunai, yaitu QRIS secara *end-to-end* di beberapa objek wisata di Singkawang, yang

<sup>13</sup> Laporan vaksinasi COVID-19 Provinsi Kalbar sampai tanggal 3 Februari.

disertai dengan edukasi kepada seluruh pihak.

## Strategi Mempersiapkan Pemulihan Wisman

**Menghadapi tantangan penurunan jumlah wisman, Singkawang perlu mengoptimalkan sejumlah peluang yang ada.** Dalam jangka pendek, perlu upaya peningkatan jumlah atraksi selain Imlek, melalui perluasan dan penguatan promosi. Melihat tingginya kunjungan wisatawan lokal pada libur natal dan tahun baru 2020, sebagai dampak dari penambahan sejumlah atraksi (Lorong Wisata Kenangan, Wisata Mangrove, Taman Burung, dan Batu Belimbing), maka pengembangan *Integrated Tourism* antara wisata budaya di Singkawang dan wisata alam di daerah sekitarnya (Pulau Lemukutan, Pulau Randayan, Pantai Temajuk, dan Pantai Paloh) juga berpotensi dapat menarik kunjungan wisman dan memperpanjang *length of stay* ke depan. Letak Singkawang yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura serta keunikan budaya yang dimiliki, menjadi keunggulan tersendiri untuk menarik wisatawan. Upaya untuk menarik kunjungan wisman dapat dilakukan melalui perluasan dan penguatan promosi, melalui keikutsertaan dalam kegiatan Travel Fair di beberapa negara tetangga. Sejalan dengan itu, upaya yang telah dilakukan pelaku usaha, berupa penggunaan layanan *virtual tour* untuk menjelajah kota Singkawang (biro perjalanan dan penyedia jasa daring dan luring) juga menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong peningkatan kunjungan wisman ke depan. Paket wisata yang telah ada untuk menarik kunjungan wisman berupa 3 Days 2 Nights (3D2N) Malaysia–Singkawang dan paket 4Days 3 Nights (4D3N) Singapura–Singkawang, dapat diperluas untuk menyasar wisman dari negara potensial lainnya (selain Malaysia dan Singapura).

**Dalam jangka menengah, percepatan peningkatan dan perbaikan akses, konektivitas, dan amenitas, pendukung perlu dilakukan secara bertahap untuk pemulihan kunjungan wisman.** Saat ini, Pemerintah Daerah Singkawang dan Tim Pembangunan Percepatan Bandara, sedang melakukan proses tender dan penerimaan *site visit* calon investor untuk membangun bandara Singkawang, sehingga dapat meningkatkan akses dan konektivitas udara dari Pontinak menuju Singkawang (sebelumnya ditempuh melalui jalur darat). Adapun terkait amenitas, selain upaya yang telah dilakukan untuk menghias kota Singkawang dengan memperbanyak *spot* foto bagi wisatawan (Singkawang Heritage Street Gallery), kerja sama

antara pemangku kebijakan pariwisata dengan investor swasta untuk pembangunan hotel berbintang, pembenahan, dan penambahan sarana dan prasarana dasar, seperti penambahan toilet umum perlu untuk terus diperkuat. Dengan adanya penambahan jumlah hotel berbintang, diharapkan Singkawang dapat menjadi lebih siap dalam menyambut tren perubahan wisman dalam melakukan aktivitas pariwisata ditengah AKB melalui program *staycation*<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Hasil Survei Preferensi Wisman yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada Januari 2021 terhadap 375 responden di seluruh provinsi di Kalimantan

## BAGIAN 5

### Perekonomian Balinusra

*Perekonomian Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) masih mengalami tekanan hingga triwulan IV 2020. Kontraksi ekspor jasa dari aktivitas pariwisata yang masih berlanjut akibat pembatasan kunjungan wisman berdampak pada proses perbaikan ekonomi Balinusra yang tidak secepat wilayah lainnya. Tekanan pada ekspor jasa sebagai sumber penerimaan utama tersebut, mengakibatkan proses perbaikan permintaan domestik menjadi lebih lambat. Bahkan konsumsi swasta masih melanjutkan kontraksi yang lebih dalam pada triwulan IV 2020. Dari sisi lapangan usaha (LU), penurunan kinerja ekonomi terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja LU Konstruksi sebagai dampak tertundanya beberapa proyek infrastruktur. Meski demikian, kontraksi lebih dalam tertahan oleh perbaikan kinerja LU Penyediaan Akomodasi makan-minum (Akmamin), LU Pertanian, dan LU Perdagangan. Secara keseluruhan perekonomian Balinusra pada tahun 2020 mengalami kontraksi 5,01% (yoy), relatif paling dalam dibandingkan wilayah lainnya.*

*Masih berlanjutnya tekanan pada kinerja konsumsi swasta, tercermin dari tekanan inflasi Balinusra pada triwulan IV 2020 yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan Pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat yang mengalami tekanan sepanjang 2020, antara lain terkait biaya energi dan biaya pendidikan. Dengan capaian tersebut, maka inflasi untuk keseluruhan 2020 berada di bawah kisaran sasaran.*

*Ke depan, proses perbaikan ekonomi Balinusra akan berlanjut pada 2021 secara bertahap, terutama didorong oleh perbaikan permintaan domestik. Pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 diperkirakan dapat mendorong peningkatan permintaan domestik dan pergerakan wisatawan nusantara di tengah pemulihan kinerja ekspor jasa yang diperkirakan membaik secara perlahan pada paruh kedua. Perbaikan kinerja sektor eksternal masih akan ditopang oleh ekspor produk pertambangan seiring perbaikan ekonomi Tiongkok. Dengan perkembangan tersebut, inflasi Balinusra tahun 2021 diperkirakan akan meningkat, namun masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional.*

#### Pertumbuhan Ekonomi

**Ekonomi Balinusra pada triwulan IV 202, masih menghadapi tekanan terutama karena ekspor jasa yang masih lemah.** Perekonomian Balinusra pada triwulan IV 2020 terkontraksi 7,43% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 6,81% (yoy). Meski net ekspor masih berkontribusi positif, namun kontraksi yang cukup signifikan pada kinerja ekspor jasa mengakibatkan tekanan yang besar bagi sumber utama penerimaan utama wilayah ini. Jumlah kunjungan wisman belum pulih hingga akhir tahun akibat masih diterapkannya *travel restriction*. Hal tersebut mengakibatkan tekanan pada sisi domestik, terutama konsumsi rumah tangga yang masih terus berlanjut hingga triwulan IV 2020. Namun, kontraksi permintaan domestik di Balinusra pada triwulan membaik karena ditopang konsumsi Pemerintah dan investasi. Secara sektoral, kontraksi pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha (LU) pendukung aktivitas pariwisata masih berlanjut sehingga menekan kinerja ekonomi Balinusra secara keseluruhan. Secara spasial, kontraksi pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam pada triwulan IV 2020 terjadi di Bali (Tabel V.1).

**Tekanan yang dihadapi Balinusra hingga akhir tahun 2020 menyebabkan kinerja ekonomi secara keseluruhan**

**tahun mengalami kontraksi.** Ekonomi Balinusra tercatat mengalami kontraksi 5,01% pada 2020 terutama karena melemahnya permintaan domestik selama pandemi COVID-19 seiring penurunan pendapatan dari pariwisata. Tekanan kinerja pariwisata sejak paruh pertama 2020 dan terus berlanjut hingga akhir tahun mengakibatkan tekanan yang cukup besar pada kinerja konsumsi dan investasi. Upaya untuk mendorong pemulihan melalui pergerakan wisatawan nusantara juga masih tertahan akibat kasus COVID-19 yang masih meningkat.

**Tabel V.1.** Pertumbuhan Ekonomi Balinusra

Provinsi	2019				2019	2020				2020
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Bali	6,0	5,6	5,3	5,5	5,6	-1,2	-11,1	-12,3	-12,2	-9,3
NTB	1,7	2,1	6,3	5,3	3,8	3,0	-1,3	-1,0	-3,0	-0,6
NTT	5,2	6,3	3,9	5,6	5,2	3,0	-2,0	-1,8	-2,3	-0,8
<b>Balinusra</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,8</b>	<b>-7,4</b>	<b>-5,0</b>

Sumber: BPS, diolah

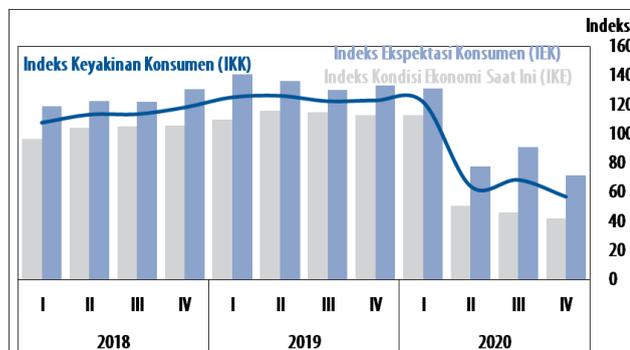
Tekanan kinerja pariwisata tersebut berdampak pada melemahnya seluruh LU pendukungnya. Meski demikian, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh perbaikan kinerja LU Pertambangan yang tumbuh positif, seiring perbaikan produksi dan peningkatan permintaan domestik maupun eksternal. Secara spasial, seluruh daerah di wilayah Balinusra mengalami kontraksi pertumbuhan dengan yang

paling dalam dialami oleh Bali yang menghadapi tekanan sejak triwulan pertama 2020 (Tabel V.1).

## Kinerja Sisi Penggunaan

### Konsumsi Swasta

**Konsumsi swasta berkontraksi lebih dalam pada triwulan IV 2020 karena berlanjutnya tekanan kinerja pariwisata sebagai sumber penerimaan utama Balinusra.** Konsumsi swasta pada triwulan IV 2020 berkontraksi 5,19% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 4,67% (yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh masih lemahnya pendapatan dari sektor pariwisata. Dorongan konsumsi pada periode libur akhir tahun menurun secara signifikan seiring berlanjutnya pembatasan mobilitas akibat kasus COVID-19 yang masih tinggi. Meski demikian, aktivitas pariwisata domestik pada akhir tahun 2020 sedikit mengalami perbaikan ditengah pengetatan akses menuju Balinusra. Selain itu, tekanan lebih dalam pada konsumsi swasta tertahan oleh konsumsi lembaga nonprofit yang kembali tumbuh positif sejalan dengan peningkatan aktivitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penurunan kinerja konsumsi swasta ini tercermin dari hasil Survei Konsumen yang mengalami penurunan pada triwulan IV 2020 (Grafik V.1). Dengan perkembangan tersebut, kinerja konsumsi swasta Balinusra untuk keseluruhan tahun 2020 berkontraksi 2,92% (yoy) dimana Bali menjadi yang terdalam.



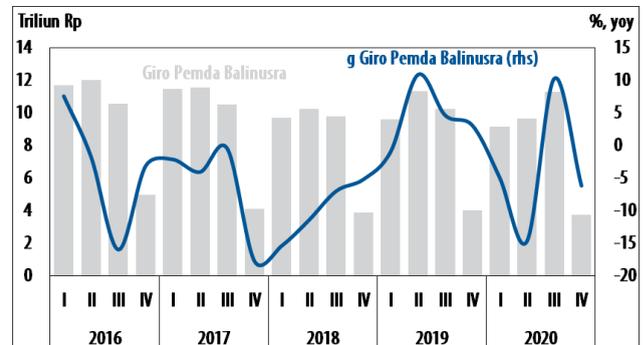
Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.1. Survei Konsumen

### Konsumsi Pemerintah

**Konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2020 tumbuh membaik meski masih berkontraksi.** Konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2020 tumbuh -1,59% (yoy), tidak sedalam kontraksi periode sebelumnya yang sebesar -4,53% (yoy). Perbaikan ini terutama didorong peningkatan realisasi bantuan sosial dan penyaluran dana hibah pariwisata di Bali, NTB, dan NTT. Meningkatnya belanja pemerintah ini juga tercermin dari penurunan simpanan giro pemerintah pada triwulan IV 2020 (Grafik V.2). Dengan perkembangan pada triwulan IV tersebut, konsumsi pemerintah untuk keseluruhan tahun 2020 tercatat mengalami kontraksi 2,79% dibandingkan tahun

sebelumnya. Hal ini terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya ruang gerak stimulus fiskal daerah sejalan dengan menurunnya penerimaan, baik yang berasal dari dana transfer karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan pendapatan asli daerah seiring menurunnya aktivitas pariwisata.

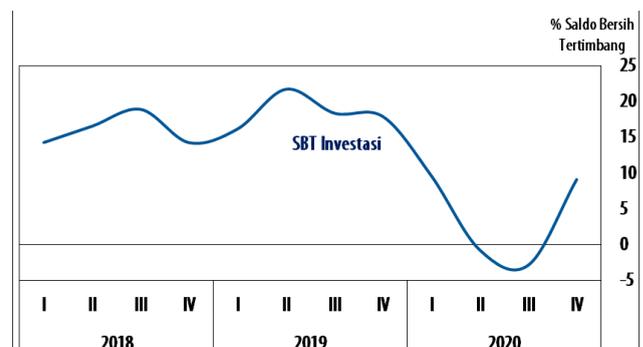


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik V.2. Giro Pemerintah Daerah di Perbankan Balinusra

### Investasi

**Kinerja investasi Balinusra mengalami perbaikan pada triwulan IV 2020 meski berjalan lambat.** Membaiknya kinerja investasi terutama didorong realisasi investasi nonbangunan di LU Pertambangan terkait penambahan kapasitas produksi. Di sisi lain, pembangunan proyek infrastruktur, baik swasta maupun pemerintah, di wilayah ini berjalan lambat dan juga mengalami penundaan akibat *refocusing* anggaran karena COVID-19. Perbaikan kinerja investasi sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang menunjukkan adanya peningkatan saldo bersih tertimbang (SBT) untuk kegiatan investasi pada triwulan IV 2020 (Grafik V.3). Secara keseluruhan tahun, kinerja investasi pada 2020 turun 9,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi pandemi COVID-19 yang menyebabkan tertundanya kegiatan investasi pelaku usaha. Selain itu, investasi pemerintah juga tertahan karena *refocusing* dan realokasi belanja modal untuk pembangunan proyek infrastruktur, termasuk sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Balinusra, untuk penanganan COVID-19.

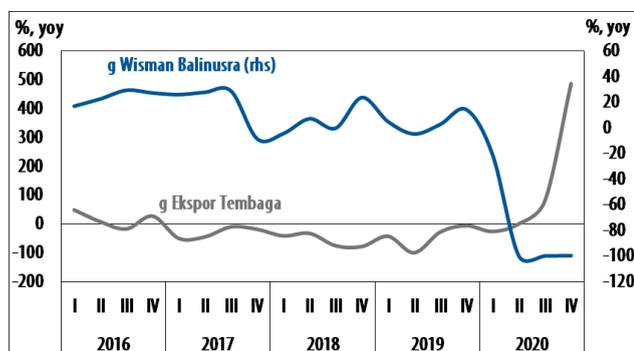


Sumber: SKDU Bank Indonesia

Grafik V.3. Perkembangan Indikator Investasi

## Net Ekspor Barang dan Jasa

**Kinerja net ekspor pada triwulan IV 2020 masih dapat berkontribusi positif karena ditopang ekspor barang luar negeri.** Beberapa ekspor komoditas berbasis sumber daya alam dari Balinusra mencatat perbaikan pada akhir tahun seiring menguatnya permintaan dari negara mitra dagang. Kinerja ekspor konsentrat tembaga dari Nusa Tenggara Barat meningkat terutama untuk tujuan Tiongkok pada triwulan IV 2020. Demikian halnya untuk komoditas perikanan untuk tujuan Amerika Serikat dan Australia. Meski demikian, perbaikan ekspor barang tersebut tidak dapat mengkompensasi penurunan ekspor jasa. Jumlah kunjungan wisman belum pulih hingga akhir tahun akibat masih diterapkannya *travel restriction* (Grafik V.4).



Sumber: Badan Pusat Statistik dan DJBC, diolah

Grafik V.4. Perkembangan Jumlah Wisman dan Ekspor Tembaga

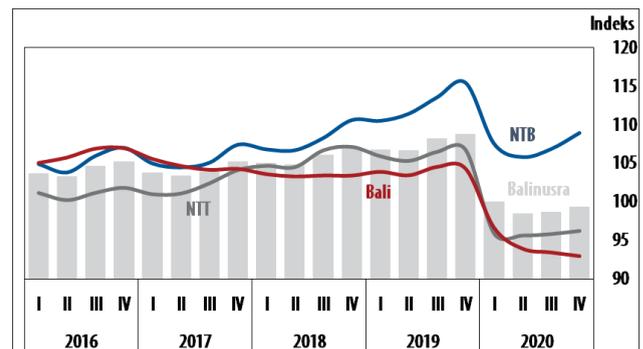
**Secara keseluruhan tahun 2020, net ekspor masih dapat berkontribusi positif.** Permintaan domestik sepanjang 2020 yang melemah menyebabkan menurunnya kebutuhan impor. Impor ditopang untuk pemenuhan barang mendukung beberapa proyek investasi dan infrastruktur yang masih berjalan. Sementara ekspor barang membaik, terutama didorong oleh komoditas tembaga dari Nusa Tenggara Barat. Membaiknya ekspor tembaga didukung menguatnya permintaan dari Tiongkok disertai harga yang kembali membaik pada paruh kedua 2020. Selain itu, kontribusi positif net ekspor juga bersumber dari meningkatnya pengiriman konsentrat tembaga ke Jawa Timur. Namun, kinerja ekspor jasa yang menurun signifikan sepanjang tahun 2020 akibat restriksi wisman menahan perbaikan kontribusi net ekspor lanjut.

## Kinerja Lapangan Usaha

### Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

**Kinerja LU Pertanian pada triwulan IV 2020 membaik walaupun masih tumbuh negatif.** Perbaikan kinerja LU Pertanian terutama ditopang panen komoditas hortikultura di NTB. Di sisi lain, kinerja LU Pertanian di wilayah Bali dan NTT berkontraksi akibat curah hujan yang tinggi sehingga menghambat produksi tanaman bahan makanan. Masih

terbatasnya perbaikan kinerja LU Pertanian tercermin dari perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Balinusra pada yang belum kembali meningkat ke level di atas indeks 100, kecuali NTB (Grafik V.5). Dengan perkembangan pada triwulan IV, maka kinerja LU Pertanian untuk keseluruhan 2020 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kontraksi pertumbuhan terjadi karena berkurangnya luas tanam akibat permintaan dan harga yang rendah sehingga menjadi disinsentif produksi bagi sebagian besar petani di Balinusra. Selain itu, wabah virus yang menyerang ternak babi di NTT dan Bali, terutama pada paruh pertama 2020, juga turut berkontribusi pada penurunan kinerja LU Pertanian.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik V.5. Nilai Tukar Petani

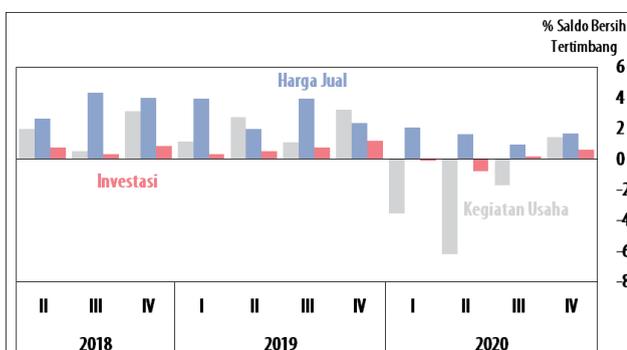
### Penyediaan Akomodasi, Makanan, dan Minuman (Akmamin)

**LU Akmamin masih berkontraksi cukup dalam pada triwulan IV 2020, meski sedikit mengalami perbaikan dibanding triwulan sebelumnya.** Tekanan pada LU ini terutama dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah kunjungan wisatawan ke Balinusra sejalan dengan penerapan kebijakan *travel restriction* akibat pandemi COVID-19. Dorongan konsumsi pada periode libur akhir tahun menurun signifikan seiring berlanjutnya pembatasan mobilitas akibat kasus COVID-19 yang masih tinggi. Meski demikian, perbaikan LU Akmamin pada triwulan IV 2020 ditopang aktivitas wisnus yang membaik ditengah pengetatan akses masuk ke Balinusra pada akhir tahun 2020. Dengan perkembangan tersebut, mengalami kontraksi yang cukup dalam pada 2020. Menurunnya aktivitas pariwisata yang terjadi sejak paruh pertama 2020 dan terus berlanjut hingga akhir tahun 2020 menyebabkan kinerja LU Akmamin berkontraksi hingga mencapai 27,54% dibandingkan tahun sebelumnya.

### Perdagangan

**Kinerja LU Perdagangan pada triwulan IV 2020 masih mengalami kontraksi meski juga sedikit membaik dibandingkan triwulan sebelumnya.** Sejalan dengan aktivitas pariwisata yang masih cenderung lemah, kinerja LU Perdagangan masih terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh masih jumlah kunjungan wisatawan ke Balinusra yang masih

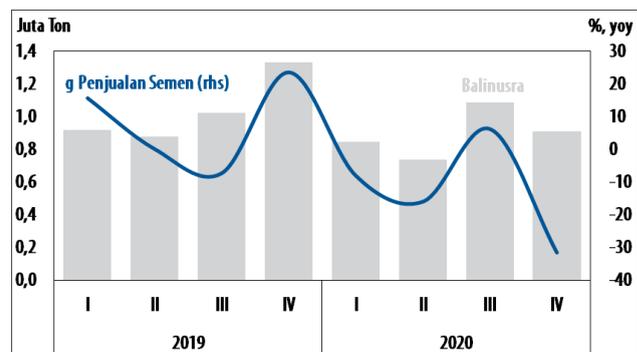
rendah terkait *travel restriction* dan pembatasan mobilitas masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang masih berlanjut hingga akhir tahun 2020. Meski tidak sekuat pola historisnya, dorongan momen kegiatan upacara keagamaan di Bali dan NTB (Mulid Nabi), termasuk Natal dan Tahun Baru, serta aktivitas wisnus pada libur akhir tahun dapat menopang perbaikan kinerja LU Perdagangan pada triwulan IV 2020. Kegiatan Pilkada serentak pada akhir tahun juga mendorong perbaikan kinerja LU ini. Hal ini tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang menunjukkan perbaikan kegiatan usaha, harga jual, dan investasi LU Perdagangan (Grafik V.6). Dengan perkembangan tersebut, kinerja LU Perdagangan secara keseluruhan tahun 2020 mengalami kontraksi seiring melemahnya permintaan domestik di seluruh daerah di Balinusra, terutama karena penurunan aktivitas pariwisata.



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, diolah  
**Grafik V.6.** Perkembangan Kegiatan Perdagangan

### Konstruksi

**Kinerja LU Konstruksi pada triwulan IV 2020 masih mengalami tekanan, terutama karena terbatasnya investasi bangunan.** Tertundanya berbagai proyek di Balinusra, terutama proyek investasi swasta, seperti ITDC Nusa Dua dan pembangunan bandara Komodo berdampak pada penurunan kinerja LU Konstruksi pada triwulan IV 2020. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan realisasi beberapa proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang masih berlanjut berjalan kurang optimal, seperti Bendungan Sidan di Bali, pembangunan ITDC Mandalika di NTB, dan Bendungan Manikin di NTT. Perkembangan kinerja LU Konstruksi yang masih menghadapi tekanan sejalan dengan data konsumsi semen pada triwulan IV 2020 yang terkontraksi (Grafik V.7). Dengan perkembangan tersebut, kinerja LU Konstruksi pada keseluruhan tahun 2020 terkontraksi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Melemahnya aktivitas perekonomian Balinusra serta refocusing anggaran belanja modal berdampak pada penundaan rencana realisasi investasi swasta, terutama pembangunan hotel, dan juga beberapa proyek infrastruktur pemerintah.

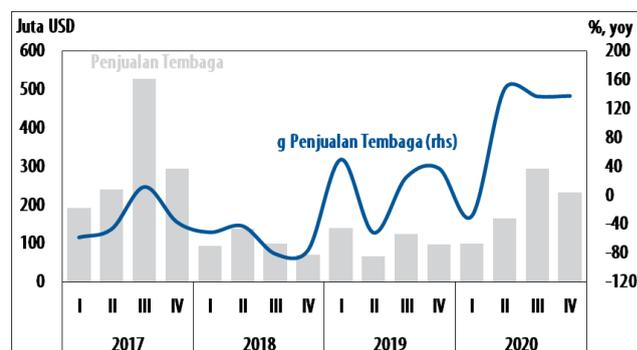


Sumber: Bank Indonesia

**Grafik V.7.** Pertumbuhan Penjualan Semen

### Pertambangan dan Penggalian

**Kinerja LU Pertambangan tetap tumbuh positif, meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Kinerja produksi dan penjualan tembaga yang tetap tinggi, baik untuk ekspor maupun domestik menopang kinerja LU ini tetap tumbuh kuat. Selain itu, peningkatan produksi juga didukung proses eksploitasi tambang di NTB yang terus berlangsung (Grafik V.8). Dengan perkembangan tersebut, kinerja LU Pertambangan untuk keseluruhan tahun 2020, mencatat pertumbuhan yang kuat, setelah pada tahun sebelumnya masih tumbuh rendah. Kinerja produksi tambang tembaga yang tumbuh tinggi selama tahun 2020 juga didukung peningkatan kapasitas produksi. Dorongan permintaan eksternal terutama dari Tiongkok terhadap komoditas tembaga yang tetap kuat di tengah pandemi COVID-19, disertai harga yang meningkat pada paruh kedua 2020, mendorong pelaku usaha mengoptimalkan kapasitas produksinya. Kinerja penjualan domestik khususnya untuk *smelter* di Jawa Timur yang tetap kuat turut mendorong kinerja LU perdagangan selama tahun 2020. Perbaikan kinerja LU Pertambangan yang tetap kuat ini lebih lanjut menahan penurunan ekonomi Balinusra lebih lanjut.



Sumber: Perusahaan Tambang di Balinusra, diolah

**Grafik V.8.** Perkembangan Penjualan Tembaga Balinusra

### Fiskal Daerah

**Peran fiskal daerah hingga triwulan IV 2020 masih terbatas, seiring dengan sumber penerimaan daerah yang turun.** Realisasi pendapatan APBD hingga triwulan IV 2020 secara nominal tercatat Rp65,84 triliun, lebih rendah

dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp76,18 triliun (Tabel V.2). Penurunan pendapatan daerah terjadi di seluruh provinsi, baik dari transfer pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah (PAD). Lebih rendahnya penerimaan transfer sejalan dengan kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19. Sementara PAD menurun terutama disebabkan oleh aktivitas pariwisata yang turun. Penurunan PAD yang lebih dalam tertahan oleh langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan seperti relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berupa pemutihan sanksi administratif, termasuk pemanfaatan elektronifikasi untuk mendukung pelayanan selama pandemi COVID-19.

**Tabel V.2.** Realisasi Pendapatan APBD di Balinusra

Komponen APBD	Realisasi (Triliun Rp)		%yoy	Realisasi (%)	
	IV'19	IV'20	IV'20	IV'19	IV'20
<b>Pendapatan Balinusra</b>	<b>76,18</b>	<b>65,85</b>	<b>-0,14</b>	<b>90,50</b>	<b>93,41</b>
Bali	23,62	21,36	-0,10	82,79	90,42
NTB	25,73	19,79	-0,23	95,61	97,17
NTT	26,83	24,70	-0,08	93,38	93,19
<b>Belanja Balinusra</b>	<b>73,49</b>	<b>67,51</b>	<b>-0,08</b>	<b>85,81</b>	<b>87,66</b>
Bali	24,11	22,04	-0,09	79,63	85,27
NTB	22,39	20,07	-0,10	89,09	93,39
NTT	26,99	25,40	-0,06	89,28	85,59

Sumber: BPKAD Provinsi dan Kab/Kota

### Sejalan dengan penurunan realisasi pendapatan, realisasi belanja APBD Balinusra menjadi terbatas.

Realisasi belanja daerah hingga triwulan IV 2020 tercatat Rp25,40 triliun (87,66% dari pagu), menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp26,99 triliun (85,81% dari pagu). Penurunan realisasi belanja APBD terdapat terjadi di NTB, diikuti Bali dan NTT. Meski demikian, penurunan realisasi belanja daerah yang lebih dalam tertahan oleh realisasi belanja untuk Pilkada. Menurunnya pendapatan

yang diterima, mendorong Pemda melakukan berbagai penyesuaian belanja, termasuk penundaan proyek non-prioritas dari komponen belanja modal serta pemangkasan belanja barang dan jasa, pembatasan dinas pada komponen belanja pegawai yang dialihkan untuk penanganan pandemi.

## Perkembangan Inflasi

### Realisasi inflasi di Balinusra pada triwulan IV 2020 menurun, terutama karena deflasi pada tarif angkutan.

Inflasi Balinusra pada triwulan IV 2020 tercatat 0,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,95% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi pada triwulan laporan terjadi di seluruh wilayah Balinusra (Tabel V.3), terutama di sebabkan menurunnya tekanan inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah, serta transportasi (Tabel V.4). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat dan permintaan domestik yang masih rendah. Meski demikian, inflasi *volatile food* mengalami kenaikan, terutama dari komoditas hortikultura. Hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan akibat La Nina yang mengganggu produksi dan pemenuhan pasokan ditengah permintaan yang relatif mengalami peningkatan pada periode HBKN akhir tahun.

**Tabel V.3.** Perkembangan Inflasi Balinusra (% ,yoy)

Provinsi	2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Bali	1,85	2,14	2,54	2,38	3,04	2,18	0,95	0,80
NTB	2,45	3,39	2,18	1,86	1,63	-0,17	0,84	0,60
NTT	2,12	1,35	2,06	0,67	1,65	1,57	1,10	0,61
<b>Balinusra</b>	<b>2,06</b>	<b>2,35</b>	<b>2,36</b>	<b>1,96</b>	<b>2,52</b>	<b>1,48</b>	<b>0,95</b>	<b>0,72</b>

Sumber: BPS, diolah

**Tabel V.4.** Inflasi Balinusra Berdasarkan Kelompok Komoditas (% ,yoy)

Provinsi	Bali				NTB				NTT			
	2020				2020				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Mamin dan Tembakau	4,65	2,54	0,30	2,30	3,91	0,30	1,52	2,30	3,92	4,06	3,74	2,87
Pakaian dan Alas Kaki	0,11	0,06	-0,57	-0,03	1,53	0,59	0,19	0,10	1,95	1,64	0,87	-0,47
Perumahan dan Bb RT	2,25	2,35	0,25	-0,24	0,40	-0,39	-0,63	-0,43	-0,32	-0,14	-0,12	-0,27
Perlengkapan, Peralatan RT	1,15	1,44	2,98	0,44	1,43	1,22	1,28	1,08	0,81	0,72	0,67	0,60
Kesehatan	2,84	2,11	2,08	1,85	2,02	1,92	2,02	2,30	2,50	3,72	5,47	6,39
Transportasi	-1,04	-2,72	-3,05	-3,13	-2,81	-6,73	-0,91	-4,59	-1,93	-3,10	-4,40	-4,66
Infokom dan Keuangan	0,63	0,76	0,68	1,20	-0,28	-0,51	-1,34	-0,96	0,08	-0,94	-1,67	-2,04
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	3,20	3,28	3,15	1,18	1,28	1,33	0,01	0,14	0,89	0,02	-0,26	-0,12
Pendidikan	8,25	7,85	0,73	0,73	1,40	1,40	0,33	0,33	2,76	2,75	0,31	0,62
Penyediaan Mamin/Restoran	4,63	3,90	4,46	1,64	0,36	0,44	0,52	0,60	0,68	0,95	0,86	1,60
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,17	4,73	5,73	3,67	6,08	6,46	7,83	5,99	5,41	6,73	6,38	4,06
<b>Inflasi Umum</b>	<b>3,04</b>	<b>2,18</b>	<b>0,95</b>	<b>0,80</b>	<b>1,63</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,84</b>	<b>0,60</b>	<b>1,65</b>	<b>1,57</b>	<b>1,10</b>	<b>0,61</b>

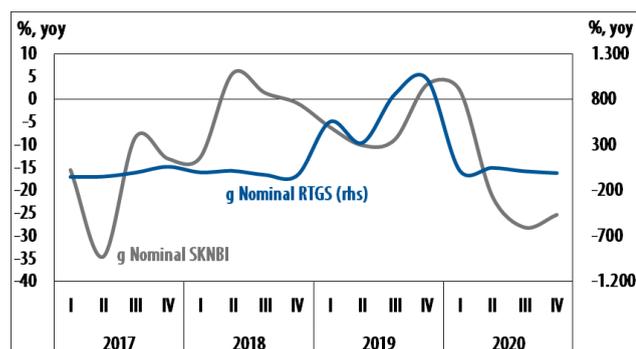
Sumber: BPS, diolah

**Untuk keseluruhan tahun, inflasi Balinusra pada 2020 tercatat rendah dan berada di bawah kisaran sasaran inflasi nasional.** Rendahnya inflasi terutama dipengaruhi oleh permintaan domestik yang menurun, khususnya karena aktivitas pariwisata yang turun signifikan, selama pandemi COVID-19. Penurunan inflasi terjadi pada sebagian besar kelompok barang, dengan penurunan terdalam terjadi pada kelompok Transportasi dan Pendidikan. Berbagai insentif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli, termasuk di antaranya penghapusan *airport tax*, penundaan kenaikan uang sekolah, serta penurunan tarif listrik, berdampak pada rendahnya inflasi Balinusra. Secara spasial, inflasi tahun 2020 di seluruh daerah di Bali tercatat di bawah 1%.

## Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

### Sistem Pembayaran Nontunai

**Sejalan dengan masih terbatasnya kinerja ekonomi Balinusra, aktivitas transaksi melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) dan kliring masih terbatas.** Nilai transaksi RTGS di Balinusra pada triwulan IV 2020 berkontraksi 9,60% (yoy) (Grafik V.9), dengan volume transaksi yang juga tumbuh melambat dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Secara spasial, transaksi RTGS yang menurun terutama terjadi di NTT. Sementara itu, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional (SKN) juga masih tumbuh negatif. Nominal transaksi kliring berkontraksi 25,35% (yoy) pada triwulan IV 2020, meski membaik dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 28,11% (yoy), yang juga masih tumbuh negatif.

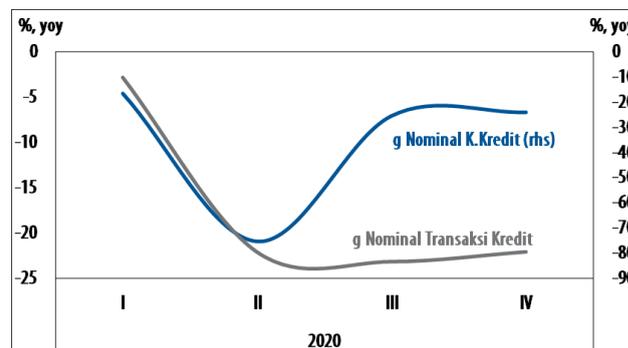


Sumber: Bank Indonesia

**Grafik V.9.** Pertumbuhan Nominal Transaksi RTGS dan Kliring

**Aktivitas transaksi nontunai masyarakat yang tercermin dari transaksi melalui kartu ATM/Debit dan kartu kredit juga masih terbatas.** Nilai transaksi kartu ATM/Debit mengalami kontraksi 6,69% (yoy) pada triwulan IV 2020, meski membaik dari kontraksi triwulan sebelumnya yang sebesar 7,08% (yoy). Perbaikan terjadi terutama ditopang aktivitas transaksi di pusat perbelanjaan pada periode liburan akhir tahun. Demikian halnya dengan nominal

transaksi kartu kredit yang juga masih berkontraksi cukup dalam, meski membaik dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik V.10). Peningkatan transaksi tersebut disertai dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.



Sumber: Bank Indonesia

**Grafik V.10.** Pertumbuhan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit dan Kartu Kredit

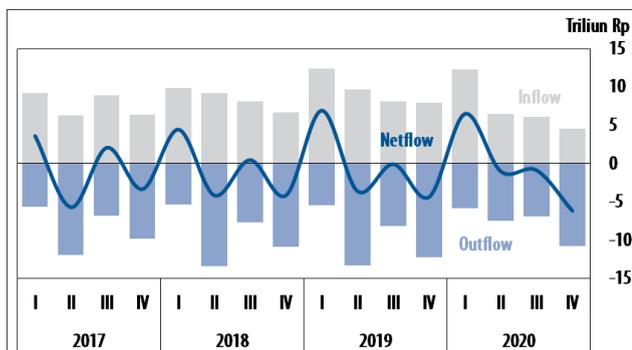
**Transaksi ritel dengan uang elektronik (UE) menunjukkan peningkatan secara nominal.** Implementasi elektronifikasi di Balinusra yang terus dilakukan turut berdampak pada kenaikan transaksi UE secara nominal yang pada triwulan IV 2020 tercatat Rp893,84 miliar, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp695,18 miliar, atau tumbuh 28,6% (yoy). Kenaikan nominal transaksi sejalan dengan jumlah UE yang mengalami peningkatan di seluruh provinsi dari 1,87 juta akun pada triwulan IV 2019 menjadi 3,57 juta akun pada triwulan IV 2020.

**Penyaluran bansos nontunai melalui Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi secara optimal.** Penyaluran Program Sembako di Balinusra pada triwulan IV 2020 telah mencapai 100% tersalurkan kepada 1,24 juta KPM dengan total nominal mencapai Rp749,20 miliar. Nominal penyaluran tersebut menurun dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp762,81 miliar dan disalurkan kepada 1,26 juta KPM, sejalan dengan lebih rendahnya alokasi dan besaran penyaluran yang telah ditentukan. Dari sisi penyerapan, realisasi di Balinusra tercatat sebesar 91,96%, lebih tinggi dari tingkat realisasi nasional sebesar 90,73%. Sementara itu, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Balinusra pada triwulan IV tercatat sebesar Rp694,63 miliar yang salurkan kepada 816,73 ribu KPM.

### Pengelolaan Uang Rupiah

**Sesuai pola historisnya, kebutuhan uang kartal di Balinusra pada triwulan IV 2020 mengalami peningkatan.** Total *net outflow* pada triwulan IV tercatat Rp6,18 triliun, lebih tinggi dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar Rp0,88 triliun (Grafik V.11). *Net outflow* yang terjadi pada triwulan IV 2020 mengikuti pola tahunannya yang cenderung meningkat pada akhir tahun

terkait peningkatan kebutuhan uang masyarakat pada saat Natal dan Tahun baru. Selain itu, uang kartal tetap masih mengalir ke masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat.

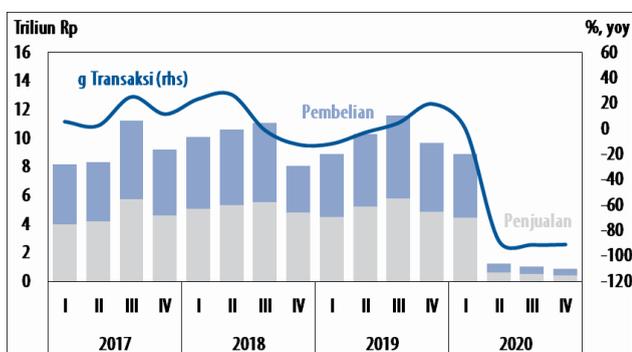


Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.11. Aliran Uang Kartal

## Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

**Aktivitas transaksi KUPVA BB berizin masih tercatat menurun.** Transaksi jual valas pada triwulan IV tercatat sebesar Rp0,43 triliun, turun dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp0,52 triliun. Sementara itu, transaksi beli valas tercatat sebesar Rp0,44 triliun, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar Rp0,51 triliun (Grafik V.12). Secara tahunan, total nilai transaksi tersebut berkontraksi hingga 90,83% (yoy), sejalan dengan penurunan jumlah wisman sebagai konsumen utama KUPVA BB di Balinusra.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.12. Perkembangan Transaksi KUPVA BB

## Prospek Perekonomian

### Prospek Pertumbuhan Ekonomi

**Perekonomian Balinusra pada 2021 diperkirakan membaik, terutama ditopang permintaan domestik.** Dari sisi domestik, dimulainya program vaksinasi COVID-19 pada awal triwulan I 2021 diperkirakan berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat dan optimisme pelaku ekonomi, sehingga dapat mendorong perbaikan permintaan domestik secara bertahap. Perbaikan permintaan domestik juga ditopang berlanjutnya program bansos untuk menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu,

kinerja investasi diperkirakan membaik didukung kembali berlanjutnya pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata seperti hotel, bandara dan pelabuhan, serta proyek hilirisasi tembaga. Di sisi eksternal, perbaikan ekspor barang khususnya tembaga diperkirakan tetap kuat ditopang prospek permintaan dari Tiongkok. Sementara itu, kinerja ekspor jasa dari pariwisata secara gradual akan membaik terutama pada paruh kedua 2021, sejalan dengan rencana pembukaan akses untuk wisatawan mancanegara meski belum kembali ke level sebelum COVID-19. Membaiknya permintaan domestik dan eksternal, lebih lanjut berdampak pada perbaikan LU utama Balinusra. Kinerja LU utama terkait pariwisata seperti LU Transportasi dan LU Akmamin diperkirakan membaik pada 2021 ditopang pemulihan kunjungan wisatawan secara bertahap, termasuk didukung upaya optimalisasi potensi dari aktivitas wisnus. (Lihat Boks: Potensi Pengembangan Pariwisata Balinusra Pasca Pandemi COVID-19).

### Prospek Inflasi

**Inflasi Balinusra pada 2021 diperkirakan meningkat sejalan dengan prakiraan pemulihan ekonomi Balinusra, namun tetap dalam kisaran sasaran 3%±1% (yoy).**

Peningkatan inflasi terjadi di seluruh kelompok barang, seiring mulai pulihnya aktivitas pariwisata sehingga mendorong naiknya permintaan domestik. Kinerja pariwisata yang diprakirakan mulai pulih secara bertahap akan mendorong permintaan bahan makanan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran serta tarif angkutan udara. Selain itu, meningkatnya daya beli masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan permintaan untuk barang sandang dan tersier.

**Koordinasi pengendalian inflasi di wilayah Balinusra akan terus diperkuat untuk memastikan terjaganya inflasi dalam sasaran.**

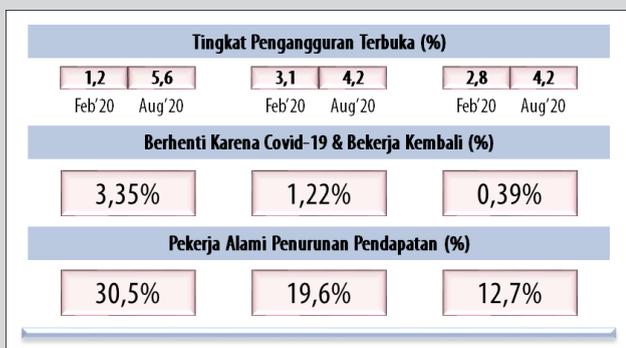
Koordinasi akan tetap difokuskan pada strategi pengendalian inflasi dalam kerangka 4K. Upaya yang akan dilakukan TPID di wilayah Balinusra dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong peningkatan produksi dan pasokan, termasuk distribusi kebutuhan masyarakat. Selain itu, upaya untuk mengatasi permasalahan pasokan antarwaktu dengan pembenahan distribusi maupun kegiatan kerjasama antardaerah akan terus dilakukan. Pada saat yang bersamaan, TPID di seluruh daerah di Balinusra akan secara efektif melakukan komunikasi kepada masyarakat untuk menjaga optimisme pemulihan dan ekspektasi terhadap terjaganya harga-harga secara umum. TPID di seluruh wilayah Balinusra akan terus secara periodik melakukan pertemuan koordinasi untuk memastikan konsistensi dan kerjasama pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi berjalan secara optimal guna mendukung proses pemulihan ekonomi terus berjalan.

## Potensi Pengembangan Pariwisata Balinusra Pasca Pandemi COVID-19

*COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Balinusra. Kondisi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, hingga pendapatan asli daerah turut terdampak, mengingat sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi utama. Perbaikan kunjungan wisnus yang lebih cepat dibandingkan wisman, menjadi salah satu pilihan untuk menjadi bantalan. Oleh karena itu, perlu sinergi antara pelaku usaha, pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan peluang perbaikan kunjungan wisnus tersebut bagi pemulihan pariwisata.*

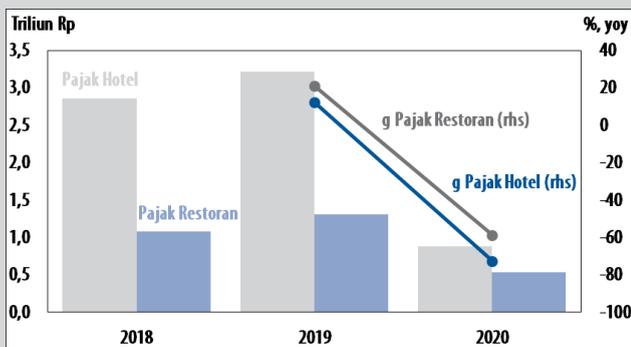
### Dampak COVID-19 ke Sektor Pariwisata

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan Pajak Balinusra. Restriksi perjalanan wisata akibat pandemic Covid-19, mengakibatkan kedatangan wisatawan mancanegara (Wisman) turun tajam sebesar 82,54% dan wisatawan nusantara (wisnus) turun sebesar 60% (yoy). Penurunan kunjungan wisatawan tersebut, berdampak signifikan terhadap kinerja dunia usaha. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, 56% pelaku usaha pariwisata telah melakukan pemberhentian kegiatan operasional selama lebih dari 6 bulan. Saat ini, mayoritas pelaku usaha hanya memperkerjakan kurang dari 50% tenaga kerja.



Sumber: Sakernas, diolah

Grafik V.13. Tabel Dampak Pariwisata Balinusra



Sumber: BPS, diolah

Grafik V.14. Penurunan Pajak Hotel dan Restoran

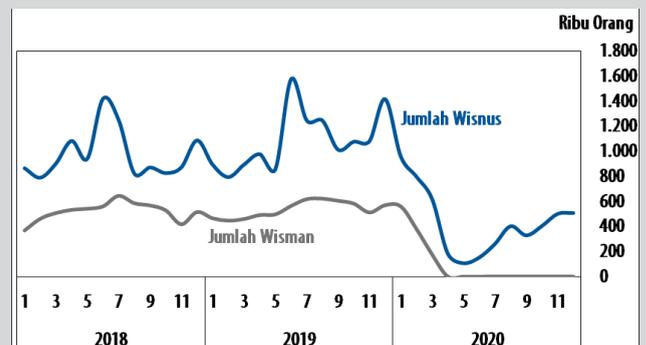
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan signifikan, terutama di Bali. Berdasarkan data Sakernas BPS, TPT Bali pada Agustus 2020 sebesar 5,63% (yoy), meningkat dibanding Februari 2020 yang sebesar 1,20%. Pendapatan pekerja juga tercatat menurun, di Bali sebanyak 30,5%, NTB 19,6%, dan NTT 12,7%. Dampak lainnya terlihat pada pergeseran jumlah tenaga kerja, dari sektor Akomodasi Makanan Minuman ke sektor Pertanian, terutama di Bali akibat pemberhentian sebagian besar operasional usaha pariwisata

Pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten yang sangat mengandalkan sektor pariwisata turun signifikan. Penurunan PAD tersebut akibat kunjungan wisman dan tingkat hunian hotel yang menurun signifikan, seperti di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali. Penurunan pendapatan pajak hotel tercatat turun 72,6% dan pajak restoran turun 58,7%.

### Strategi Pemulihan Pariwisata Melalui Peningkatan Wisnus

#### Peran Wisnus dalam Pariwisata Balinusra

Peran wisnus selama pandemi COVID-19 meningkat. Meskipun pertumbuhan jumlah wisnus ke Balinusra masih negatif, namun pangsa wisnus meningkat dari 67,0% pada 2019 menjadi 82,3% pada 2020.



Sumber: BPS, diolah

Grafik V.15. Kunjungan Wisman dan Wisnus Ke Bali

Pelonggaran penerbangan domestik pada akhir semester I 2020, ditengah restriksi perjalanan internasional yang masih berlaku, menopang peningkatan pangsa tersebut. Dengan peluang tersebut, upaya mendorong aktivitas wisnus perlu terus ditingkatkan.

### Potensi Wisatawan Nasional

**Pemulihan pariwisata dapat bersumber dari wisatawan nasional (wisnas).** Jumlah wisnas yang berpeluang untuk melakukan aktivitas wisata didalam negeri mencapai 11,7 Juta orang. Apabila peluang tersebut dapat dimanfaatkan menjadi wisatawan Balinusra, maka akan setara dengan kedatangan 140% wisman Balinusra pada tahun 2019. Selain itu, tingkat penghunian kamar hotel (TPKH) juga akan meningkat mencapai 23% dari angka TPKH tahun 2019.

### Strategi Perbaikan Kunjungan Wisnus di Balinusra

**Program untuk meningkatkan kunjungan wisnus telah diimplementasikan di Balinusra.** Pemerintah dan pelaku usaha berkolaborasi melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisnus. Pemda Bali mendukung dengan melakukan revitalisasi pariwisata. Sementara pelaku usaha berkolaborasi secara aktif mengeluarkan paket promosi, seperti *Recovery Program The Nusa Dua* dengan menawarkan *Staycation pay Now Stay Later* dan Paket Wisata "Explore The Nusa Dua". Pada tingkat nasional, upaya secara terintegrasi peningkatan aktivitas wisata nusantara dilakukan melalui program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) dan Bangga Buatan Indonesia (BBI).

**NTT dan NTB turut merancang program khusus untuk menarik kunjungan wisnus.** Tagline Labuan Bajo #Rebound diimplementasikan sebagai program promosi terpadu dengan branding wisata premium. Program ini didukung dengan penjualan paket wisata Labuan Bajo-Flores untuk meningkatkan *length of stay*. Sementara di NTB pengembangan Halal *Tourism* terus dilakukan, disamping penguatan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment* (CHSE) dalam kerangka program Lombok #Rebound.

**Program BBI dan BBWI diperkuat dengan program perluasan SP non tunai dan pengembangan UMKM.** Implementasi SP non tunai bersifat nirsentuh/*contactless*, khususnya kanal pembayaran berbasis QRIS, dapat menjadi komponen pendukung pemulihan pariwisata pada era kebiasaan baru. Pada tahun 2021, target perluasan SP non tunai berbasis QRIS di Balinusra mencapai 548.900 *merchant*, yang telah terealisasi sebesar 50,04% pada akhir Januari 2021. Pengembangan UMKM dilakukan melalui pemberian *capacity building*, bantuan sarana prasarana, serta

pelaksanaan kurasi produk. Sebanyak 13 UMKM di Bali sudah terlibat dalam program BBI, sedangkan 30 UMKM di NTB sedang dalam proses kurasi untuk kemudian diajukan dalam program BBI. Sementara itu, 7 UMKM binaan di NTB dan NTT dinilai berpotensi untuk dikembangkan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), sebagai komponen pendukung Program BBWI.

### Fokus Khusus Untuk Perbaikan Kunjungan Wisman

Upaya perbaikan kunjungan wisman tetap dilakukan di Balinusra, menanti pemulihan aktivitas wisata internasional. Pada jangka pendek, pelaku usaha, pemerintah daerah dan pusat, bekerja sama mengembangkan *travel bubble* Nusa Dua dan Bali Tourism Free COVID-19 Corridor, sebagai upaya meningkatkan wisman dari negara tertentu. Pada jangka panjang, Labuan Bajo dan Mandalika dikembangkan menjadi destinasi yang berkualitas. Badan otoritas, pelaku usaha dan pemerintah baik pusat serta daerah berkolaborasi mengembangkan Labuan Bajo dan Mandalika dari aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas yang mendukung keunikan wisata dikedua destinasi tersebut.

### Travel Bubble Nusa Dua

**Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah Nusa Dua Green Zone Business and Leisure Destination.** Konsep ini ditawarkan oleh The Nusa Dua (ITDC), untuk menjadi *pilot project* pembukaan pariwisata internasional (wisman). Implementasi program ini dapat segera dilakukan apabila sudah terdapat kesepakatan G-to-G dan pembukaan *border*. Dalam konsep ini, Nusa Dua akan menjadi kawasan tertutup khusus wisman, yang sudah memiliki seluruh fasilitas atraksi dan amenitas termasuk rumah sakit dan telah memenuhi standar protokol kesehatan ketat, untuk mendukung kenyamanan wisman. Selain itu, mendukung *travel bubble* tersebut, Bandara I Gusti Ngurah Rai juga sudah mengimplementasikan *Safe Corridor Initiative*.



Sumber: ITDC Nusa Dua, diolah

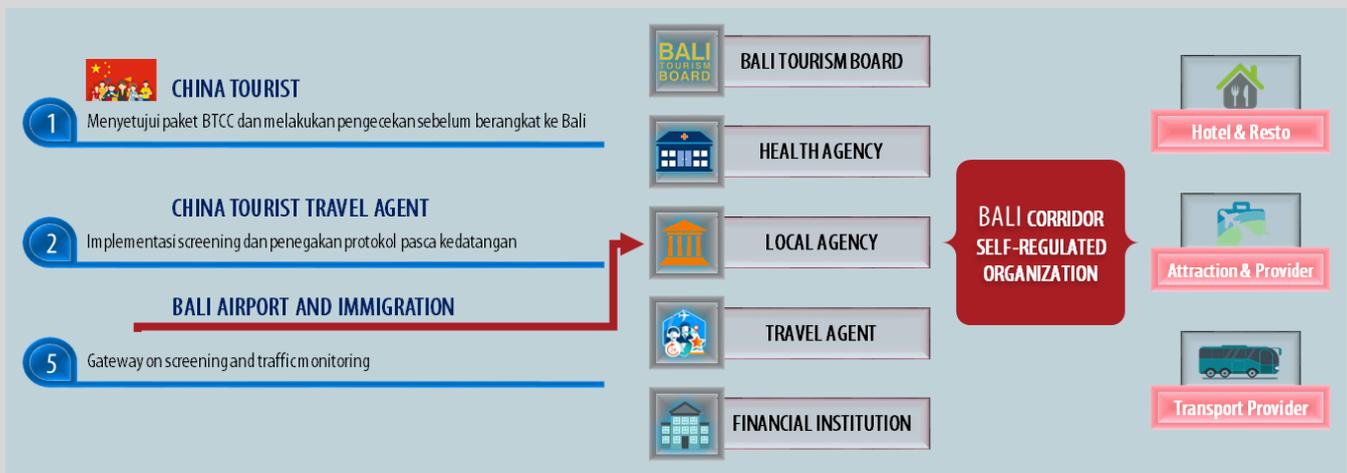
**Gambar V.1.** Konsep Green Zone Destination Nusa Dua Bali

### Bali Tourism Free COVID-19 Corridor

**Potensi kedua yang dapat didorong adalah model Bali Tourism Free COVID-19 Corridor (BTFFC).** Rumah Sakit, Perusahaan Travel, dan Angkasa Pura I mengembangkan

konsep Bali Tourism Free COVID-19 Corridor (BTFC), sebagai salah satu *pilot project travel bubble* wisatawan Tiongkok ke Bali. Dalam konsep tersebut, diusulkan perlu dibentuknya Badan Otonom yang terdiri dari asosiasi pariwisata, pemda, dan *health agency*, transportasi dan lain

lain. Dalam paket ini, kegiatan wisata diawali dengan proses persiapan bagi wisatawan berupa vaksinasi dan tes, dilanjutkan proses kedatangan, transportasi, akomodasi hingga proses keberangkatan kembali yang berada dalam *free covid corridor*.



Sumber : PT. Angkasa Pura I

Gambar V.2. Konsep Bali Tourist Free Covid Corridor (BTFC)

### Labuan Bajo & Mandalika

**Labuan Bajo di NTT dan Mandalika dikembangkan untuk menjadi destinasi yang berkualitas.** Labuan Bajo diarahkan untuk menjadi wisata super premium berkelanjutan. Penataan infrastruktur kota Labuhan Bajo, pengembangan Bandara Komodo, Pelabuhan Wae Kelambu serta Pengembangan Pulau Komodo mendukung upaya menuju Wisata Super Premium Berkelanjutan. Mandalika di NTB diarahkan untuk menjadi *adventure tourism*, sehingga pengembangan infrastruktur pendukung, atraksi dan amenitas disesuaikan dengan tema *sport adventure, food adventure* dan *cultural adventure*.

Tabel V.5. Perkembangan 3A2P yang Terus Berlanjut

Aspek	Labuan Bajo Premium	Mandalika
Akses	Bandara Komodo Labuan Bajo, Jalan Lintas Utara Flores.	Bandara Lombok Praya, Pelabuhan Gili Mas, Bypass BIL-KEK Mandalika.
Atraksi	Pembangunan Pulau Komodo dan Pulau Rinca sebagai kawasan wisata premium.	Sirkuit MotoGP, Desa wisata penyangga kawasan Mandalika.
Amenitas	Pembangunan Hotel Bintang-5 dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Waemese	Tambahan kamar selama event MotoGP sebanyak 7.500 kamar, 264 hotel/villa, serta <i>glamping (glamour camping)</i> .
Pelaku	Pendampingan dan sosialisasi pelaksanaan CHSE, pelatihan Ekraf.	Pelatihan UMKM, pendidikan vokasi, diklat <i>hospitality</i> , membentuk <i>command center</i> Manajemen Krisis Kepariwisata (MKK).
Promosi	<i>Digital campaign</i> melalui #RinduLabuanBajo, Integrated Tourism Masterplan Labuan Bajo.	<i>Digital campaign</i> melalui #PesonaLombokSumbawa

## BAGIAN 6

### Perekonomian Sulampua

*Perekonomian Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua) terus mengalami perbaikan dan mulai tumbuh positif pada triwulan IV 2020, setelah pada dua triwulan sebelumnya mengalami kontraksi. Perbaikan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya kontribusi positif dari kinerja net ekspor ditopang permintaan eksternal yang menguat. Di sisi lain, perbaikan permintaan domestik masih terbatas. Sejalan dengan hal tersebut, dari sisi lapangan usaha (LU), perbaikan ekonomi Sulampua terutama ditopang kinerja LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian Sulampua untuk keseluruhan tahun 2020 tetap tumbuh positif sebesar 0,55% (yoy), meski lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh 2,71%.*

*Realisasi inflasi Sulampua pada triwulan IV 2020 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama disebabkan oleh gangguan pasokan akibat faktor cuaca di tengah permintaan pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru yang relatif meningkat. Meskipun demikian, secara keseluruhan tahun inflasi Sulampua pada 2020 tercatat rendah sejalan dengan terbatasnya tekanan permintaan domestik akibat mobilitas masyarakat yang mengalami penurunan.*

*Ke depan, perekonomian Sulampua pada 2021 diperkirakan terus membaik terutama didukung oleh perbaikan permintaan domestik, baik konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, maupun investasi. Perbaikan ekonomi juga ditopang oleh kinerja eksternal yang diperkirakan tetap kuat, sejalan dengan permintaan eksternal yang meningkat. Perbaikan permintaan domestik diperkirakan akan mendorong inflasi Sulampua pada tahun 2021 kembali meningkat, namun masih berada dalam kisaran target inflasi nasional. TPID di seluruh wilayah Sulampua akan terus memperkuat sinergi untuk memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran.*

**Perekonomian Sulampua pada triwulan IV 2020 membaik dan mulai tumbuh positif, didorong meningkatnya kontribusi net ekspor.** Pertumbuhan ekonomi Sulampua pada triwulan IV 2020 tercatat 0,36% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mencatat kontraksi 1,05% (yoy). Meningkatnya kontribusi net ekspor didukung tetap solidnya kinerja ekspor, terutama untuk komoditas bijih tembaga dan besi baja. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih terbatas sejalan dengan pembatasan mobilitas pada akhir tahun, termasuk pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Demikian halnya dengan kinerja konsumsi Pemerintah yang terbatas karena sebagian besar daerah telah mengoptimalkan realisasi anggaran pada triwulan sebelumnya. Kinerja investasi juga tercatat melambat karena faktor *base effect* tingginya investasi smelter pada triwulan IV 2019. Meski demikian, investasi wilayah ini masih ditopang berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah dan pembangunan industri baja di Maluku Utara. Secara spasial, perbaikan ekonomi Sulampua ditopang oleh perbaikan ekonomi di empat provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua. Tiga daerah di antaranya bahkan dapat mencatat pertumbuhan positif di tengah kontraksi perekonomian yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia (Tabel VI.1)

**Di sisi LU, perbaikan ekonomi pada triwulan IV 2020 terutama ditopang kinerja LU Pertambangan dan LU**

**Industri Pengolahan.** Masih tingginya permintaan eksternal terhadap komoditas bijih tembaga dan besi baja mendorong peningkatan kinerja LU Pertambangan dan LU Industri Pengolahan. Peningkatan kinerja kedua LU tersebut juga ditopang oleh meningkatnya produksi tambang tembaga di Papua seiring optimalisasi kapasitas tambang bawah tanah, serta beroperasinya smelter baru di Sulawesi yang sebagian besar hasil produksinya untuk ekspor. Sementara itu, kinerja LU Konstruksi di wilayah Sulampua juga mengalami perbaikan, walaupun masih tumbuh negatif, karena ditopang berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah.

**Tabel VI.1.** Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sulampua

Provinsi	2019				2019	2020				2020
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
<b>Sulawesi</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,0</b>	<b>4,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,2</b>
Sulawesi Selatan	6,6	7,4	7,2	6,5	6,9	3,0	-3,9	-1,1	-0,6	-0,7
Sulawesi Barat	6,0	5,2	5,2	6,4	5,7	4,9	-0,8	-5,3	-7,5	-2,4
Sulawesi Tenggara	6,4	6,3	6,4	6,9	6,5	4,5	-2,6	-1,9	-2,2	-0,6
Sulawesi Tengah	7,3	6,9	10,0	10,9	8,8	7,9	4,5	2,8	4,4	4,9
Gorontalo	6,7	6,7	5,7	6,5	6,4	4,0	-0,3	-0,1	-3,6	0,0
Sulawesi Utara	6,6	5,5	5,1	5,5	5,6	4,4	-3,8	-1,8	-2,2	-1,0
<b>Maluku</b>	<b>-9,6</b>	<b>-13,1</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,9</b>	<b>-7,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>1,4</b>
Maluku	6,0	5,9	5,2	4,6	5,4	3,7	-1,1	-2,6	-3,4	-0,9
Maluku Utara	7,6	7,5	4,1	5,4	6,1	3,5	-0,2	6,7	9,5	4,9
Papua	-18,7	-23,9	-15,1	-3,8	-15,7	1,4	4,1	-2,8	6,9	2,3
Papua Barat	-0,2	-0,5	2,9	8,3	2,7	5,3	0,7	-3,2	-5,2	-0,8
<b>Sulampua</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>2,8</b>	<b>5,4</b>	<b>2,7</b>	<b>4,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>

Sumber: BPS, diolah

**Perbaikan ekonomi yang terjadi pada triwulan IV 2020 menahan perlambatan ekonomi Sulampua untuk**

**keseluruhan tahun 2020.** Kinerja perekonomian Sulampua sepanjang 2020 menghadapi tekanan dari permintaan domestik yang menurun, terutama karena melemahnya konsumsi swasta seiring terbatasnya aktivitas mobilitas masyarakat. Demikian halnya dengan kinerja investasi menurun karena mobilitas tenaga kerja yang terbatas, termasuk tenaga kerja ahli dari luar negeri, serta *wait and see* pelaku usaha terhadap rencana investasinya. Selain itu, pergeseran sejumlah rencana investasi infrastruktur Pemerintah akibat *refocusing* dan realokasi anggaran juga turut memengaruhi kinerja investasi Sulampua. Ditengah pelemahan permintaan domestik, kinerja net ekspor yang solid terutama ekspor luar negeri untuk produk besi baja dan konsentrat tembaga dapat menopang kinerja ekonomi Sulampua tetap tumbuh positif pada 2020. Hal ini juga didukung kapasitas produksi yang meningkat pascainvestasi hilirisasi besar yang terjadi pada 2019.

## Kinerja Sisi Penggunaan

### Konsumsi Swasta

**Kinerja konsumsi swasta pada triwulan IV 2020 masih menghadapi tekanan seiring masih terbatasnya aktivitas masyarakat.** Konsumsi swasta berkontraksi 3,73% (yoy) pada triwulan IV 2020, lebih dalam dari kontraksi 3,00% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dorongan konsumsi swasta pada periode akhir tahun, terutama menjelang perayaan HBKN Natal dan libur akhir tahun tidak sebesar pola historisnya, seiring berlanjutnya kebijakan pembatasan mobilitas untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19. Di sisi lain, upaya untuk mendorong daya beli masyarakat melalui program stimulus Pemerintah relatif dapat menjaga daya beli masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, walaupun belum dapat mengkompensasi penurunan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Perlambatan lebih dalam konsumsi swasta tertahan oleh konsumsi lembaga nonprofit sejalan dengan peningkatan aktivitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di sejumlah daerah.

**Sejalan dengan kondisi tersebut, permintaan terhadap pembiayaan sektor rumah tangga mengalami perlambatan.** Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih berkontraksi, sementara kredit multiguna tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya minat masyarakat untuk melakukan konsumsi, terutama untuk barang sekunder dan tersier (Tabel VI.2). Meski demikian, perlambatan kredit RT tersebut tetap diimbangi oleh kualitas kredit yang tetap terjaga dengan rasio NPL *gross* yang masih berada di bawah batas aman (<5%). Sementara itu, nominal penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga mengalami

peningkatan. Hal ini mengindikasikan kecenderungan masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan dana yang dimiliki mengantisipasi tingginya ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.

**Tabel VI.2.** Perkembangan Kredit RT Sulampua

Kategori	g Kredit (% yoy)							
	2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Kredit	10,16	7,98	8,33	8,35	8,47	5,51	4,35	2,96
- KPR	7,99	4,87	3,77	0,20	1,00	-1,23	-5,35	-1,84
- KKB	12,54	7,77	4,46	11,99	13,45	2,72	-4,57	-16,23
- Multiguna	10,62	10,79	9,06	11,74	12,00	9,18	12,77	5,82
NPL (%)	2,54	2,70	3,92	3,59	3,98	3,87	3,85	3,52

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Tabel VI.3.** Perkembangan DPK Rumah Tangga

Kategori	Nominal (Triliun Rp)							
	2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total DPK	175,07	181,77	181,65	200,33	187,50	194,75	203,15	216,15
- Tabungan	118,20	122,46	123,36	141,30	127,56	134,82	140,60	155,55
- Deposito	6,79	8,01	6,34	7,35	6,27	6,33	7,55	6,63
- Giro	50,08	51,31	51,95	51,68	53,67	53,61	55,01	53,96
Kategori	g DPK (% yoy)							
	2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total DPK	7,00	9,24	8,03	7,07	7,10	7,14	11,84	7,90
- Tabungan	6,95	8,88	8,67	8,62	7,92	10,09	13,98	10,09
- Deposito	5,49	14,15	-8,31	-11,54	-7,66	-21,01	19,00	-9,71
- Giro	7,33	9,39	8,89	6,12	7,18	4,49	5,90	4,42

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Secara keseluruhan tahun 2020, kinerja konsumsi swasta menurun akibat pandemi COVID-19.** Konsumsi rumah tangga di Sulampua sepanjang tahun 2020 berkontraksi 1,93% dibandingkan tahun 2019. Upaya memitigasi penyebaran COVID-19 melalui pembatasan aktivitas masyarakat sejak awal triwulan II 2020 mengakibatkan turunnya permintaan masyarakat sehingga memengaruhi operasional kegiatan usaha. Kondisi tersebut memaksa pelaku usaha untuk mengambil kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan *unpaid leave* bagi tenaga kerja, sehingga mengakibatkan turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Kebijakan pembatasan aktivitas tersebut juga menyebabkan konsumsi pada saat HBKN Idul Fitri dan Natal tidak setinggi pola historisnya sehingga memengaruhi kinerja konsumsi swasta pada keseluruhan 2020. Meski demikian, proses perbaikan ekonomi yang terus berlangsung sepanjang paruh kedua 2020, serta dukungan stimulus fiskal terutama untuk bantuan sosial, mampu menahan kontraksi konsumsi masyarakat yang lebih dalam.

### Konsumsi Pemerintah

**Konsumsi Pemerintah kembali mengalami kontraksi pertumbuhan pada triwulan IV 2020.** Kontraksi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh upaya percepatan realisasi penanganan COVID-19 terutama telah dilakukan pada triwulan sebelumnya. Secara spasial, hampir seluruh daerah

di wilayah Sulampua mencatat kontraksi pertumbuhan konsumsi pemerintah, kecuali Papua. Selain itu, penurunan konsumsi Pemerintah juga diakibatkan menurunnya sumber penerimaan fiskal daerah karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, peran konsumsi Pemerintah di Sulampua secara kumulatif pada tahun 2020 menjadi lebih terbatas, terutama karena sumber penerimaan fiskal daerah yang menurun baik transfer dari Pemerintah Pusat maupun pendapatan daerah. Menyesuaikan dengan turunnya pendapatan tersebut maka pagu belanja daerah pada tahun 2020 menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

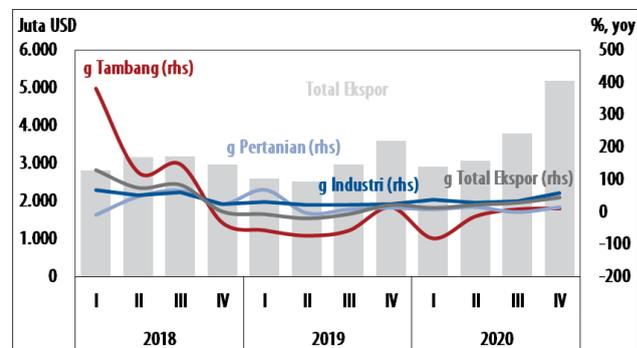
### Investasi

**Kinerja investasi pada triwulan IV 2020 masih mengalami tekanan.** Kinerja investasi Sulampua pada triwulan IV 2020 berkontraksi 4,54% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2,68% (yoy). Dorongan dari investasi masih minimal pascaberoperasinya sejumlah smelter baru di Sulawesi Tengah, selain juga pengaruh faktor *base effect* realisasi investasi smelter di Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2019. Kinerja investasi wilayah ini ditopang pembangunan investasi industri baja yang tengah berlangsung di Maluku Utara dan berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah di beberapa daerah di Sulampua. Dengan perkembangan tersebut, kinerja investasi selama tahun 2020 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Tertundanya rencana investasi pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas dan diversifikasi produk akibat tingginya ketidakpastian pada masa pandemi COVID-19. Terbatasnya mobilitas tenaga kerja ahli dari luar negeri, terutama pada awal masa pandemi, turut memengaruhi realisasi investasi hilirisasi industri nikel di Sulawesi Tengah. Selain itu, pandemi juga berdampak pada pembatasan jumlah tenaga kerja pada proyek yang tengah berlangsung sehingga memengaruhi waktu penyelesaian proyek investasi, sebagaimana terjadi pada proyek investasi di industri migas di Papua Barat. Di sisi lain, kinerja investasi Pemerintah juga tertahan dengan *refocusing* dan realokasi anggaran pembangunan infrastruktur untuk penanganan COVID-19.

### Kinerja Ekspor-Impor

**Kontribusi positif net ekspor pada triwulan IV 2020 terus membaik didukung peningkatan ekspor luar negeri.** Ekspor Sulampua pada triwulan IV 2020 tumbuh 35,18% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 23,33% (yoy). Peningkatan ekspor didorong oleh meningkatnya permintaan negara mitra dagang terhadap komoditas bijih tembaga dan besi baja terutama dari Tiongkok, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan (Grafik VI.1). Permintaan eksternal yang menguat tersebut diimbangi

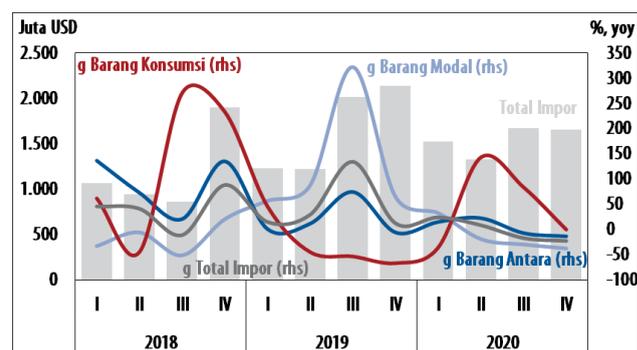
dengan optimalisasi produksi bijih tembaga pada *underground mining* Papua, serta peningkatan kapasitas produksi smelter nikel di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Di samping itu, membaiknya kinerja ekspor juga didukung oleh tren peningkatan harga komoditas emas, tembaga, dan nikel.



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik VI.1. Nilai Ekspor Sulampua

**Secara kumulatif, kinerja ekspor Sulampua sepanjang tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019.** Ekspor Sulampua tahun 2020 tumbuh meningkat dibandingkan tahun 2019 yang justru mengalami kontraksi pertumbuhan. Meningkatnya kinerja ekspor terutama didorong oleh ekspor produk besi baja (pangsa 68% terhadap nilai ekspor nonmigas Sulampua) yang tumbuh hingga mencapai 60% dari tahun 2019. Hal ini juga ditopang oleh peningkatan kapasitas produksi seiring beroperasinya tiga smelter baru di Sulawesi Tengah dan satu pabrik baru di Sulawesi Tenggara. Selain itu, ekspor bijih tembaga (pangsa 12%) juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi, sebesar 68% (yoy), didorong oleh optimalisasi kapasitas produksi tambang bawah tanah setelah berakhirnya operasi tambang terbuka pada akhir 2019.



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik VI.2. Impor Menurut Kategori Barang

**Sementara itu, kinerja impor pada triwulan IV 2020 berkontraksi lebih dalam.** Impor Sulampua pada triwulan IV 2020 berkontraksi 22,09% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 4,32% (yoy). Kontraksi impor terutama terjadi pada komponen barang modal sejalan dengan penurunan realisasi investasi.

Dengan perkembangan tersebut, kinerja impor Sulampua untuk keseluruhan tahun 2020 mengalami penurunan. Menurunnya impor terutama disebabkan penurunan impor barang modal dan bahan baku industri sejalan dengan penurunan kinerja investasi dan pengurangan serta penghentian sementara operasional industri akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, impor barang konsumsi masih tumbuh positif ditopang impor alat kesehatan seperti alat pelindung diri.

## Kinerja Lapangan Usaha

### Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

**Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan IV 2020 masih mengalami kontraksi pertumbuhan.** Menurunnya kinerja LU ini terutama dipengaruhi oleh kendala curah hujan yang lebih tinggi yang disertai angin kencang, sehingga meningkatkan risiko gagal panen petani serta menghambat penangkapan dan budidaya ikan. Penurunan kinerja LU Pertanian ini juga dipengaruhi oleh kinerja ekspor beberapa komoditas utama pertanian yang menurun, antara lain kakao, ikan, dan udang akibat berkurangnya permintaan dari negara mitra khususnya Amerika Serikat (Grafik VI.3). Hal ini juga tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Perikanan dan Ternak Sulampua yang juga mengalami penurunan pada Desember 2020. Secara spasial, kontraksi pertumbuhan LU ini terutama terjadi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua. Dengan perkembangan tersebut, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada keseluruhan tahun 2020 menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya.



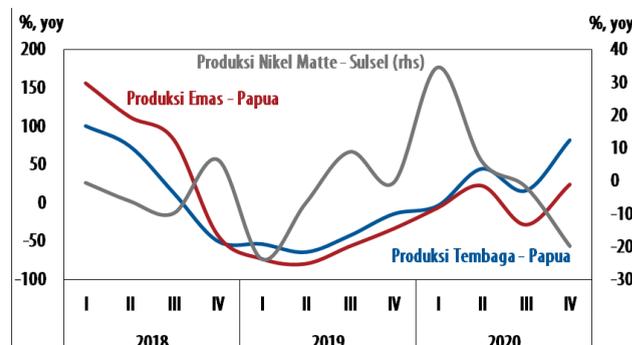
Sumber: Bea Cukai, diolah

**Grafik VI.3.** Ekspor Komoditas Perikanan dan Perkebunan

### Pertambangan

**Kinerja LU Pertambangan tumbuh meningkat setelah terkontraksi pada triwulan sebelumnya.** Kinerja LU Pertambangan pada triwulan IV 2020 tercatat tumbuh 13,27% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 0,71% (yoy). Peningkatan kinerja lapangan usaha ini didorong oleh kinerja produksi tambang Papua yang meningkat seiring optimalisasi kapasitas tambang

bawah tanah, serta pengaruh *base effect* berakhirnya produksi tambang terbuka pada akhir 2019. Selain itu, peningkatan kinerja juga dipengaruhi oleh meningkatnya produksi bijih nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Peningkatan kinerja LU Pertambangan yang lebih tinggi tertahan oleh kontraksi produksi nikel di Sulawesi Selatan akibat adanya pemeliharaan berkala (Grafik VI.4).



Sumber: Produsen, diolah

**Grafik VI.4.** Pertumbuhan Produksi Mineral di Sulampua

### Perbaikan kinerja LU Pertambangan menopang pertumbuhan ekonomi Sulampua pada tahun 2020.

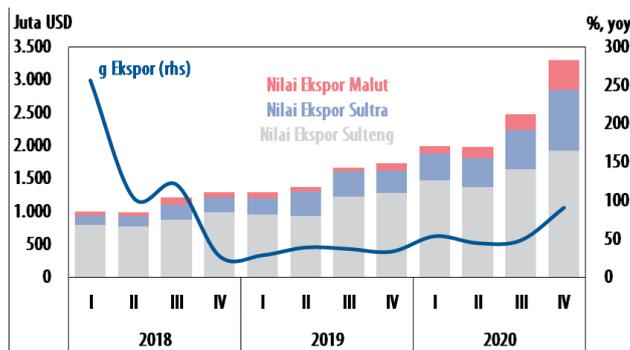
Kinerja LU Pertambangan tumbuh meningkat pada 2020, setelah pada tahun sebelumnya mencatat kontraksi pertumbuhan. Meningkatnya kinerja LU Pertambangan ini didorong oleh perbaikan kinerja komoditas tembaga dan nikel. Sepanjang tahun 2020, volume produksi tambang tembaga di Papua serta nikel *matte* di Sulawesi Selatan tumbuh masing-masing 33% dan 1,7%. Dorongan permintaan eksternal terhadap komoditas tembaga dan nikel *matte* yang tetap kuat di tengah pandemi COVID-19 mendorong pelaku usaha tetap mengoptimalkan kapasitas produksi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

### Industri Pengolahan

**Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2020 tumbuh relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.** Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2020 tumbuh 5,99% (yoy), relatif sama dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Perkembangan positif kinerja LU ini terutama ditopang mulai beroperasinya *smelter* NPI baru di tengah permintaan eksternal yang meningkat, terutama dari Tiongkok (Grafik VI.5). Optimalisasi kapasitas produksi pada industri baja karbon di Sulawesi Tengah dan industri *stainless steel* di Sulawesi Tenggara turut mendorong kinerja LU Industri Pengolahan. Lebih lanjut, kinerja LU ini juga didukung stabilnya produksi LNG di Papua Barat.

**Sepanjang tahun 2020, kinerja LU Industri Pengolahan tetap tumbuh solid meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.** Kinerja LU Industri Pengolahan di Sulampua yang tetap tumbuh positif terutama dipengaruhi

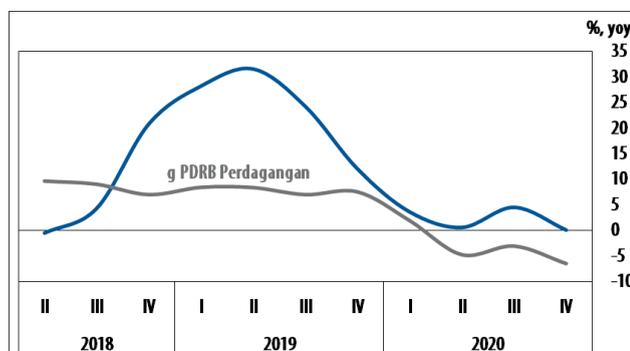
oleh meningkatnya kapasitas produksi industri baja di tengah permintaan eksternal yang juga menguat. Di samping itu, adanya kenaikan produksi LNG di Papua Barat turut menopang tetap kuatnya pertumbuhan LU Industri Pengolahan di wilayah ini. Meski demikian, dampak pandemi COVID-19 yang menekan permintaan, baik domestik maupun eksternal, serta tertundanya investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi secara keseluruhan menahan kinerja LU Industri Pengolahan tumbuh lebih tinggi pada 2020.



Sumber: Bea Cukai, diolah  
**Grafik VI.5.** Ekspor Besi Baja Sulampua

## Perdagangan

**Sejalan dengan masih terbatasnya perbaikan konsumsi swasta, kinerja LU Perdagangan pada triwulan IV 2020 asih cenderung menurun.** LU Perdagangan pada triwulan IV 2020 terkontraksi sebesar 6,46% (yoy), turun lebih dalam dari periode sebelumnya yang terkontraksi 3,03% (yoy). Berlanjutnya pembatasan mobilitas untuk menekan penambahan kasus positif COVID-19, terutama menjelang perayaan HBKN dan libur akhir tahun menekan kinerja LU Perdagangan. Perkembangan ini juga tercermin pada Indeks Penjualan Riil pada Survei Penjualan Eceran di Kota Makassar dan Kota Manado yang melambat pada triwulan IV 2020 (Grafik VI.6). Dengan perkembangan tersebut, kinerja LU Perdagangan untuk keseluruhan tahun 2020 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.



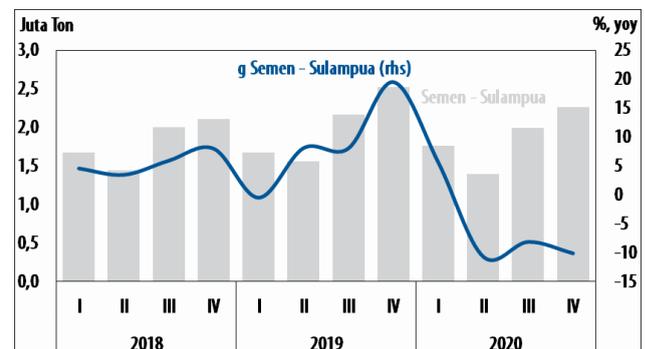
Sumber: Survei Penjualan Eceran, BI, diolah  
 Ket.: Indeks Penjualan Riil untuk 2 Kota di Sulampua: Kota Makassar dan Kota Manado

**Grafik VI.6.** Pertumbuhan Indeks Penjualan Riil

Terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19, termasuk operasional usaha perdagangan berdampak pada tertahannya kinerja LU Perdagangan di Sulampua, termasuk dampak konsumsi domestik pada periode HBKN Idul Fitri dan akhir tahun yang menjadi tidak sebagaimana pola historisnya. Selain itu, terbatasnya permintaan masyarakat akibat menurunnya daya beli turut menekan kinerja LU Perdagangan selama tahun 2020.

## Konstruksi

**Kinerja LU Konstruksi pada triwulan IV 2020 membaik, meski masih dalam fase kontraksi.** Kinerja LU Konstruksi pada triwulan IV 2020 terkontraksi 3,10% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi pada triwulan III 2020 sebesar 3,21% (yoy). Perbaikan kinerja LU ini ditopang oleh berlanjutnya kembali beberapa pembangunan proyek infrastruktur pemerintah, seperti trans Maluku, perluasan bandara di Sulut dan Maluku, akses KEK Likupang. Perbaikan kinerja LU ini juga tercermin dari data konsumsi semen di Sulampua yang membaik, meski masih mengalami kontraksi (Grafik VI.7). Meski demikian, penyelesaian proyek infrastruktur yang cenderung lebih lambat terkait pandemi COVID-19, termasuk penundaan PON XX di Papua dan mundurnya pembangunan KEK Likupang menahan perbaikan kinerja LU Konstruksi lebih lanjut.



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah  
**Grafik VI.7.** Pertumbuhan Realisasi Pengadaan Semen Sulampua

**Untuk keseluruhan tahun 2020, kinerja LU Konstruksi turun dibandingkan periode tahun sebelumnya.** LU Konstruksi di Sulampua terkontraksi 1,86%, setelah pada tahun 2019 tumbuh cukup kuat yakni 8,70%. Penurunan kinerja dipengaruhi oleh sempat tertundanya pembangunan proyek swasta akibat kendala mobilitas tenaga ahli ke dalam negeri serta adanya kecenderungan *wait and see* pelaku usaha selama pandemi. Penundaan juga terjadi pada proyek Pemerintah sejalan dengan realokasi anggaran pembangunan untuk penanganan COVID-19. Salah satu PSN Destinasi Prioritas Pemerintah, yakni KEK Likupang, juga mengalami penundaan konstruksi amenities disebabkan oleh terhambatnya uji material di negara pemasok sebagai dampak pandemi.

## Fiskal Daerah

**Peran fiskal daerah pada triwulan IV 2020 terbatas sejalan dengan menurunnya sumber penerimaan daerah.** Realisasi pendapatan APBD Provinsi di Sulampua pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar Rp49,3 triliun, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp58,2 triliun (Tabel VI.4). Secara umum, penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya dana transfer daerah dari APBN terkait dengan *refocusing* dan realokasi anggaran penanganan COVID-19. Rendahnya aktivitas perekonomian selama pandemi COVID-19 juga berdampak pada turunnya pendapatan asli daerah.

**Sejalan dengan penurunan pendapatan tersebut berdampak pada realisasi belanja pemda pada triwulan yang juga terbatas.** Hingga akhir triwulan IV 2020, realisasi belanja tercatat sebesar Rp46,6 triliun (78,7% dari pagu), lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp54,1 triliun (93,4% dari pagu). Penurunan realisasi belanja pemda yang lebih dalam tertahan oleh realisasi belanja untuk Pilkada. Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah daerah mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Perkembangan tersebut juga disebabkan pembatasan aktivitas yang berdampak pada menurunnya realisasi belanja operasional dan belanja modal daerah.

**Tabel VI.4.** Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi di Sulampua

Komponen APBD	Tw IV 2019			Tw IV 2020		
	Pagu (Triliun Rp)	Realisasi (Triliun Rp)	Realisasi (%)	Pagu (Triliun Rp)	Realisasi (Triliun Rp)	Realisasi (%)
Pendapatan APBD Provinsi	55,5	58,2	104,8	54,8	49,3	90,0
- Pendapatan Asli Daerah	10,7	11,9	110,8	10,7	9,9	92,5
- Dana Perimbangan	40,5	46,3	114,3	30,7	27,1	88,2
- Lain-lain Pendapatan yang Sah	4,3	0,0	0,0	13,4	12,4	92,3
Belanja APBD Provinsi	58,0	54,1	93,4	59,3	46,6	78,7
- Belanja Operasional + Transfer	46,4	44,4	95,6	47,6	39,2	82,3
- Belanja Modal	11,5	9,8	84,8	10,5	6,5	61,9
- Belanja Tidak Terduga	0,1	0,0	26,6	1,2	1,0	82,0

Sumber: BPKAD Provinsi Wilayah Sulampua, diolah

## Perkembangan Inflasi

**Realisasi inflasi Sulampua pada triwulan IV 2020 meningkat terutama didorong oleh kenaikan beberapa komoditas pangan.** Laju inflasi Sulampua pada akhir triwulan IV 2020 tercatat 1,47% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,29% (yoy) (Grafik VI.5). Meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan IV 2020, terutama bersumber dari inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok pakaian dan alas kaki seiring meningkatnya permintaan menjelang HBKN Natal dan tahun baru. Di sisi

lain, terkendalanya pasokan bahan makanan akibat curah hujan yang tinggi pada periode La Nina mendorong naiknya tekanan inflasi pada periode ini. Inflasi juga turut dipengaruhi oleh rencana kenaikan cukai rokok pada tahun 2021 yang direspons pelaku usaha dengan menaikkan harga jual eceran secara bertahap sejak akhir tahun 2020. Kenaikan inflasi IHK lebih lanjut tertahan oleh deflasi pada kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi dan keuangan dan kelompok perumahan & bahan bakar rumah tangga.

**Tabel VI.5.** Inflasi Berdasarkan Kelompok (%. yoy)

Komponen	2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Inflasi Umum	3,21	3,02	3,70	2,29	2,19	1,46	1,29	1,47
Mamin dan Tembakau	0,78	2,85	5,11	3,57	5,38	2,50	1,87	3,18
Pakaian dan Alas Kaki	3,63	3,41	3,93	2,83	2,89	1,55	1,41	1,66
Perumahan dan Bb RT	1,10	0,98	0,85	0,47	0,14	0,23	0,18	-0,04
Perlengkapan, Peralatan RT	2,57	2,26	1,90	1,67	1,52	1,25	1,37	1,48
Kesehatan	2,67	2,34	3,23	3,22	3,34	4,01	3,18	3,09
Transportasi	11,44	7,59	6,93	0,82	-4,46	-3,50	-2,05	-2,72
Infokom dan Keuangan	4,11	2,04	-1,15	-1,57	-1,56	-0,64	-0,97	-1,08
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,62	2,17	2,20	2,01	1,39	1,19	0,94	0,77
Pendidikan	1,46	1,41	4,21	4,44	4,42	4,46	1,89	1,69
Penyediaan Mamin/Restoran	2,87	2,92	4,17	3,49	4,99	4,46	2,93	2,72
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,73	3,17	4,58	4,17	5,07	5,74	6,91	5,58

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

**Meski meningkat pada triwulan IV 2020, secara keseluruhan tahun inflasi Sulampua tercatat rendah.** Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja ekonomi domestik akibat permintaan yang menurun selama pandemi COVID-19. Di sisi lain, pasokan pangan sepanjang tahun 2020 relatif terjaga. Lebih lanjut, penurunan inflasi pada 2020 juga dipengaruhi kebijakan penyesuaian tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat dan penurunan harga tiket pesawat. Secara spasial, beberapa daerah di wilayah ini bahkan mencatat inflasi IHK dibawah 1% seperti Maluku, Sulut, Papua Barat, dan Gorontalo. Hanya Sulawesi Selatan dan Maluku Utara yang mencatat inflasi IHK sedikit di atas 2%.

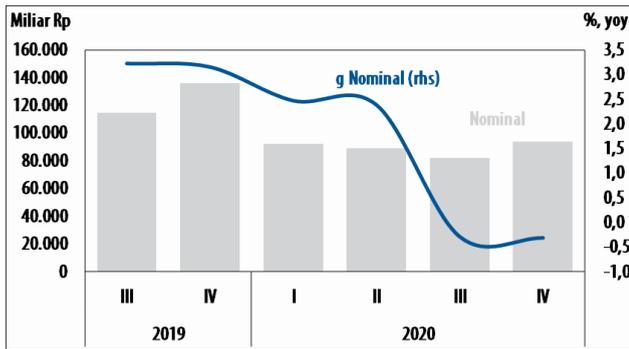
## Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

### Sistem Pembayaran Nontunai

**Transaksi sistem pembayaran nontunai melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) secara nominal mengalami penurunan.** Pada triwulan IV 2020 transaksi nominal melalui RTGS di wilayah Sulampua tercatat Rp93,8 triliun atau berkontraksi 30,98% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp48,3 triliun atau berkontraksi 28,56% (yoy) - (Grafik VI.8)<sup>15</sup>. Meski demikian, volume transaksi RTGS pada triwulan IV 2020 tercatat sebanyak 55.962 transaksi atau tumbuh 26,8% (yoy),

<sup>15</sup> Terdapat penyesuaian dalam proses pemetaan data transaksi regional (spasial) RTGS sejak triwulan III 2019, sehingga data tidak dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 48.354 transaksi atau tumbuh 24,6% (yoy).

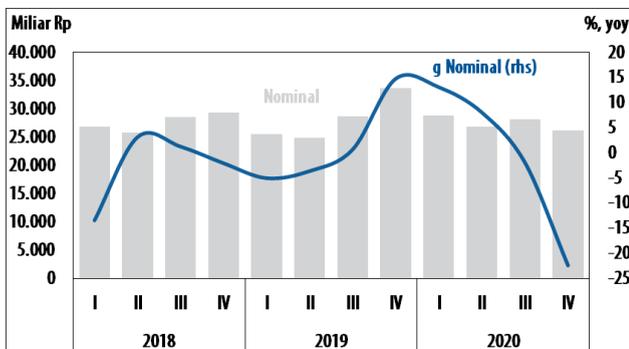


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik VI.8. Nominal Transaksi RTGS

**Transaksi sistem pembayaran non tunai melalui kliring mengalami penurunan pada triwulan IV 2020 mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya.**

Pertumbuhan volume transaksi melalui sistem kliring di wilayah Sulampua terkontraksi 31,9% (yoy) atau menjadi 492.347 lembar, turun lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 28,9% (yoy) atau 611.647 lembar. Sejalan dengan kondisi tersebut, pertumbuhan nominal transaksi kliring pada triwulan IV 2020 juga terkontraksi 22,4% (yoy) atau menjadi Rp26.147 miliar, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2020 yang terkontraksi 1,9% (yoy) atau sebesar Rp33.713 miliar (Grafik VI.9).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik VI.9. Nominal Transaksi Kliring

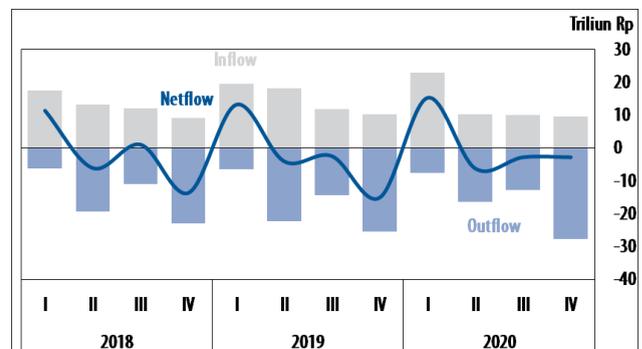
**Perkembangan aktivitas transaksi nontunai masyarakat tercermin dari transaksi melalui kartu ATM/Debet dan kartu kredit.** Nilai transaksi ATM/D pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar Rp139,1 triliun atau tumbuh 9,45% (yoy), atau meningkat dibandingkan periode triwulan sebelumnya yang tercatat Rp125,04 triliun atau tumbuh negatif 8,6% (yoy). Meskipun demikian, transaksi ATM/D untuk belanja dan transaksi *online* di wilayah ini masih cenderung terbatas. Di sisi lain, transaksi kartu kredit tercatat Rp1,17 triliun, atau terkontraksi 33,5% (yoy), meski tidak sedalam kontraksi pada periode sebelumnya yang mencapai 39,0% (yoy), dengan kualitas kredit yang tetap terjaga. Perkembangan

tersebut mengindikasikan perilaku masyarakat yang cenderung masih berhati-hati dalam melakukan konsumsi.

**Penyaluran Bantuan Sosial terealisasi secara optimal pada triwulan IV 2020.** Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Sulampua hingga triwulan IV 2020 terealisasi 100%. PKH disalurkan kepada 1,070 juta KPM dengan total nominal mencapai Rp909,5 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat disalurkan kepada 1,077 juta KPM dengan total nominal sebesar Rp915,8 miliar. Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan IV 2020 disalurkan kepada 1,67 juta KPM dengan nominal Rp335,3 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2020 dengan total KPM sebanyak 1,81 juta KPM dan nominal bantuan sebesar Rp362,4 miliar. Dengan perkembangan tersebut, realisasi penyerapan BPNT Sulampua hingga triwulan IV 2020 tercatat sebesar 87,9%, lebih rendah dibanding nasional yang mencapai 90,7%. Salah satu tantangan yang mengemuka dalam penyaluran program bantuan sosial adalah upaya perolehan data calon penerima manfaat baru untuk memperluas cakupan, mempertimbangkan kondisi geografis Sulampua yang masih terdapat banyak *remote area*.

*Pengelolaan Uang Rupiah*

**Sesuai pola historisnya, kebutuhan uang kartal di Sulampua pada triwulan IV 2020 mengalami peningkatan.** Posisi *net outflow* tercatat Rp17,9 triliun, lebih besar dibandingkan dengan posisi *net outflow* triwulan sebelumnya sebesar Rp2,7 triliun (Grafik VI.10). *Net outflow* yang terjadi pada triwulan IV 2020 mengikuti pola tahunannya yang cenderung meningkat pada akhir tahun seiring dengan peningkatan kebutuhan uang masyarakat pada saat Natal dan Tahun baru. Selain itu, peningkatan pada triwulan IV 2020 juga sejalan dengan perbaikan kinerja ekonomi daerah. Secara spasial, *net outflow* terjadi di seluruh Provinsi di Sulampua, dengan yang tertinggi terjadi di Papua dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar Rp4,9 triliun dan Rp2,2 triliun.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik VI.10. Aliran Uang Kartal

## *Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)*

**Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) berizin di wilayah Sulampua mulai meningkat pada triwulan IV 2020 meski masih terbatas.** Transaksi jual valas pada triwulan IV 2020 mencapai Rp499,8 miliar, atau turun 23,9% (yoy). Sementara itu transaksi beli valas mencapai Rp510,0 miliar, atau turun 39,6% (yoy). Namun, nilai transaksi pada triwulan IV 2020 lebih tinggi dibanding transaksi pada triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar Rp442,1 miliar untuk penjualan dan Rp416,6 miliar untuk pembelian. Peningkatan tersebut sejalan dengan adanya relaksasi larangan masuk bagi warga negara asing (WNA) ke Indonesia, khususnya untuk tenaga kerja asing dan perjalanan tujuan khusus. Hal ini tercermin dari meningkatnya penerimaan devisa udara Sulampua pada triwulan IV 2020 yang sebesar USD8,1 juta, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2020 yang sebesar USD3,1 juta.

## Prospek Perekonomian

### *Prospek Pertumbuhan Ekonomi*

**Perbaikan ekonomi Sulampua diperkirakan berlanjut pada 2021, terutama ditopang permintaan domestik.**

Konsumsi swasta diperkirakan membaik seiring perbaikan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Penyaluran berbagai program stimulus pemerintah dan pelaksanaan program vaksinasi yang mulai dilakukan pada awal triwulan I 2021 menjadi faktor pendorong perbaikan konsumsi rumah tangga pada 2021. Dorongan konsumsi rumah tangga diperkirakan menguat terutama pada paruh kedua 2021 seiring mulai pulihnya keyakinan konsumen pasca vaksinasi dilakukan secara luas kepada masyarakat umum. Demikian halnya dengan peran konsumsi pemerintah yang diperkirakan membaik didukung meningkatnya TKDD dan alokasi belanja APBD pada 2021. Perbaikan konsumsi pada 2021 juga akan mendorong perbaikan aktivitas pariwisata domestik di Sulampua, khususnya dari wisatawan nusantara (Lihat Boks: Optimalisasi Potensi Wisatawan Nusantara dalam Mendukung Perbaikan Kinerja Pariwisata Sulampua).

**Kinerja investasi pada tahun 2021 diperkirakan juga meningkat sehingga mendukung perbaikan kinerja ekonomi Sulampua.** Perbaikan kinerja investasi didukung oleh proyek hilirisasi nikel lanjutan di beberapa daerah di Sulampua. Proses pembangunan smelter tahap II pengolahan feronikel dan *nickel matte* di Maluku Utara direncanakan dimulai pada triwulan I 2021, termasuk pembangunan *rotary kiln-electric furnace* (RKEF) tahap II di Maluku Utara. Demikian halnya dengan investasi smelter *nickel pig iron* (NPI) di Sultra yang juga diperkirakan berlanjut pada 2021. Proses pengembangan tambang

bawah tanah di Papua yang masih berjalan juga akan turut mendukung kinerja investasi pada tahun 2021. Selain itu, berlanjutnya pelaksanaan proyek infrastruktur yang sempat tertunda di 2020 akan menopang kinerja investasi di Sulampua.

**Kinerja sektor eksternal diperkirakan tetap kuat dan akan menopang perbaikan kinerja ekonomi Sulampua.**

Kinerja ekspor besi baja diperkirakan tetap solid sepanjang 2021, meskipun sedikit melambat karena *base effect* tingginya tambahan kapasitas produksi baru pada 2020. Perbaikan produksi konsentrat tembaga sejak 2020 juga diperkirakan mendukung tetap kuatnya ekspor pada 2021. Sementara itu, impor juga diperkirakan meningkat terutama untuk mendukung investasi.

**Dari sisi LU, perbaikan ekonomi Sulampua pada 2021 terutama didorong LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan.**

Kinerja LU Pertambangan diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek tetap kuatnya kinerja ekspor besi baja terutama dari Tiongkok. Lebih lanjut, perbaikan produksi dan pengembangan tambang bawah tanah konsentrat tembaga turut mendorong kinerja LU Pertambangan. Sementara itu, peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan akan ditopang berlanjutnya penambahan kapasitas produksi *existing* seperti smelter pirometalurgi dan HPAL di Maluku Utara, serta adanya rencana penambahan smelter yang akan beroperasi di beberapa daerah di Sulampua. Prospek perbaikan LU juga diperkirakan terjadi pada LU Konstruksi didukung berlanjutnya sejumlah proyek swasta maupun pemerintah, serta LU Pertanian yang diperkirakan didorong kenaikan luas panen tabama, dan LU Perdagangan seiring dengan perbaikan permintaan domestik.

### *Prospek Inflasi*

**Inflasi IHK Sulampua pada tahun 2021 diperkirakan kembali meningkat ke dalam rentang sasaran inflasi seiring perbaikan ekonomi.**

Permintaan domestik diperkirakan membaik secara gradual seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Meningkatnya permintaan rumah tangga dan pelaku usaha diperkirakan mendorong naiknya tekanan harga berbagai komoditas pangan. Demikian halnya permintaan pada barang dan jasa lainnya termasuk pakaian, alas kaki, kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, mobilitas masyarakat yang meningkat diperkirakan diikuti penyesuaian tarif angkutan, terutama angkutan udara. Kenaikan cukai rokok juga diperkirakan turut mendorong inflasi Sulampua pada 2021. Dengan perkembangan tersebut, inflasi Sulampua pada tahun 2021 diperkirakan meningkat, namun masih berada dalam kisaran sasaran nasional.

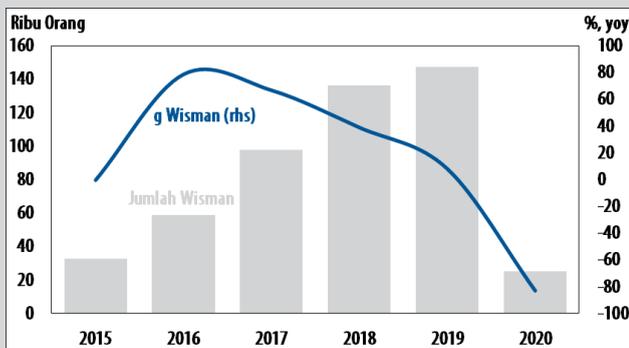
**Mengantisipasi tekanan inflasi tersebut, koordinasi**

**pengendalian inflasi akan terus diperkuat.** Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sulampua secara konsisten menempuh strategi 4K untuk memastikan inflasi terjaga (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif). Untuk menjaga ketersediaan pasokan, upaya peningkatan produksi pertanian dilakukan melalui gerakan tanam, pengaturan pola tanam, penentuan daerah penyangga, mendorong desa mandiri benih, dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). Dari sisi keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi, upaya pengawasan senantiasa dilakukan oleh TPID bersinergi dengan berbagai pihak. Selain itu, komunikasi yang efektif dilakukan secara konsisten melalui diseminasi informasi mengenai kondisi pasokan dan faktor yang mempengaruhinya kepada masyarakat.

## Optimalisasi Potensi Wisatawan Nusantara dalam Mendukung Perbaikan Kinerja Pariwisata Sulampua

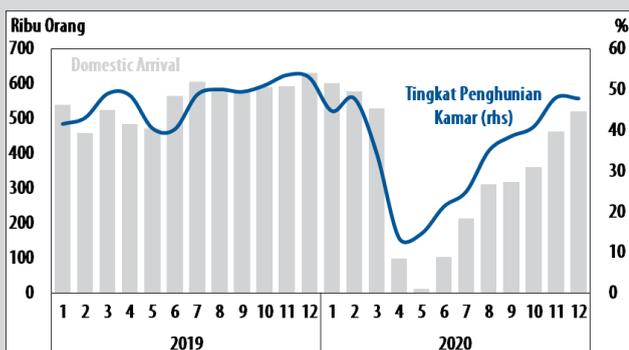
### Kondisi Pariwisata Sulampua

**Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kinerja sektor pariwisata di Sulampua seiring pembatasan aktivitas masyarakat dan penutupan akses antara daerah dan negara.** Selama tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) berdasarkan pintu kedatangan di Sulampua tercatat hanya sebesar 25,135 orang, turun dalam sebesar 82,95% (yoy). Kondisi tersebut menyebabkan penurunan penerimaan devisa pariwisata di Sulampua pada tahun 2020 mencapai 80,07% (yoy) atau senilai USD37,55 juta.



Sumber: BPS, diolah

**Grafik VI.11.** Kedatangan Wisman Berdasar Pintu Masuk Sulampua



Sumber: BPS, diolah

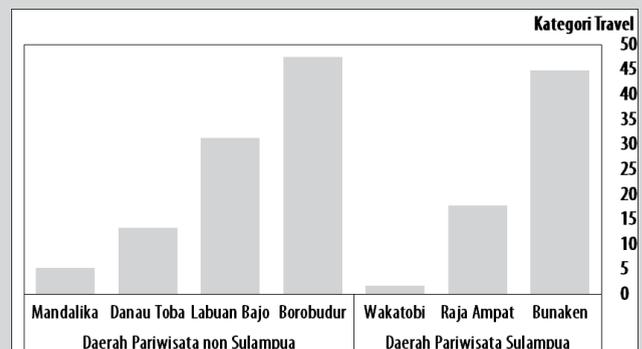
**Grafik VI.12.** Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Kedatangan Penumpang Domestik di Bandara Sulampua

**Penurunan aktivitas wisata juga tercermin oleh tingkat okupansi hotel di tiga daerah tujuan wisata utama Sulampua.** Tingkat okupansi hotel mengalami penurunan signifikan pada triwulan II 2020, ketika pandemi meluas dan mengalami perbaikan secara bertahap sejak Juli hingga akhir 2020, meskipun masih lebih rendah dibanding kondisi sebelum terjadinya pandemi. Perbaikan okupansi hotel

tersebut sejalan dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) di Sulampua yang cenderung mengalami perbaikan sejak Juli 2020, sebagaimana tercermin oleh kenaikan jumlah penumpang penerbangan domestik secara bulanan, hingga mencapai lebih dari 500 ribu penumpang pada akhir 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan kinerja pariwisata di Sulampua berpotensi didukung oleh optimalisasi kinerja wisnus.

### Low Hanging Fruit Pariwisata Domestik Sulampua

**Sulampua memiliki potensi pariwisata yang besar meliputi alam, budaya, dan kuliner, namun hanya terdapat beberapa destinasi wisata yang relatif siap.** Mengacu pada data *google trend* dalam kurun waktu dua tahun terakhir untuk kategori *travel*, dapat diketahui bahwa terdapat tiga daerah wisata yang berpotensi menjadi *low hanging fruit* pemulihan pariwisata di Sulampua, yaitu Raja Ampat, Bunaken, dan Wakatobi. Ketiga daerah ini telah relatif populer dengan keindahan panorama alamnya dan dapat bersaing dengan destinasi wisata lainnya.



Sumber: Google Trend

**Grafik VI.13.** Rata-rata Pencarian Lokasi Wisata Berdasar Kategori Travel per Minggu Selama Tahun 2019-2020

**Sejalan dengan potensi kesiapan destinasi wisata tersebut dalam menarik minat wisnus, terdapat tiga aktivitas utama yang menjadi motor aktivitas wisata, yaitu *something to see, something to do, dan something to buy and wear.*** Potensi alam dan budaya yang dikemas dalam berbagai kegiatan (*event*), menjadi magnet bagi wisatawan untuk dapat melihat secara langsung (*something to see*). Dalam mendorong ketertarikan minat wisatawan tersebut, pelaku pariwisata mengembangkan beberapa destinasi wisata unggulan seperti *marine geopark* dan *bird*

*watching* di Raja Ampat dan *New Bunaken*, termasuk juga melakukan beberapa kegiatan tahunan yang dilakukan secara *virtual*, seperti *Wakatobi Wave*. Kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan utama dalam eksplorasi wisata alam, melalui berbagai kegiatan (*something to do*), seperti *tracking*, *snorkling* dan *diving*. Kemudian untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, setiap destinasi wisata telah memiliki souvenir khas, misalnya noken dan kerajinan anyaman di Raja Ampat, cinderamata berbahan dasar kelapa di Bunaken, dan kain tenun di Wakatobi. Secara umum, berbagai aktivitas tersebut telah selaras dengan gerakan kampanye Bangsa Berwisata di Indonesia dan Bangsa Buatan Indonesia.

## Tantangan dan Upaya Mendorong Minat Wisnus ke Sulampua

**Destinasi wisata di Sulampua dihadapkan dengan berbagai tantangan yang dapat menghambat upaya perbaikan kinerja pariwisata. Tantangan pertama** adalah keterbatasan infrastruktur yang masih dihadapi hingga saat ini, seperti kapasitas bandara yang terbatas, kualitas jalan yang kurang baik, hingga belum optimalnya jaringan internet mempengaruhi minat wisatawan dalam memilih Sulampua sebagai destinasi wisata. **Tantangan kedua** adalah biaya akomodasi dan transportasi yang relatif tinggi di beberapa daerah. Jarak destinasi wisata yang relatif jauh dari pusat perekonomian (berbeda dengan Jawa Jawa maupun ibukota provinsi), menjadi pertimbangan terhadap mahalannya biaya transportasi, Mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No, KM 88 tahun 2020, tarif batas atas dan bawah pesawat rute Jakarta ke kota destinasi wisata di Sulampua relatif tinggi dibandingkan dengan daerah destinasi wisata lainnya, Kondisi ini tentunya mempengaruhi daya saing pariwisata Sulampua,

**Tabel VI.6.** Tarif Penerbangan Batas Atas-Bawah (dari Jakarta)

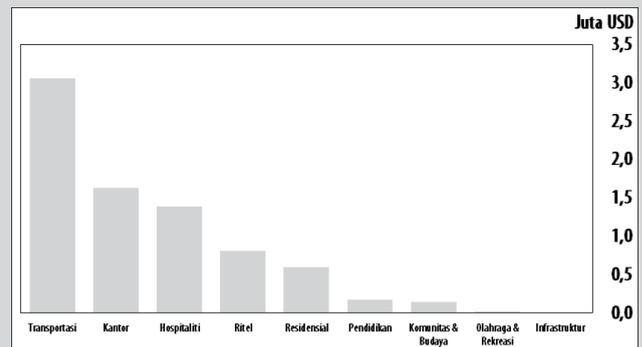
	Rute	Batas Atas (Rp)	Batas Bawah (Rp)
Jakarta	Manado	5.210.000	2.605.000
	Sorong	6.664.000	3.332.000
	Kendari	4.270.000	2.135.000
	Medan	3.598.000	1.799.000
	Yogyakarta	1.720.000	860.000
	Solo	1.812.000	906.000
	Bali	2.862.000	1.431.000

Sumber: Kementerian Perhubungan RI

**Tantangan ketiga** adalah penerapan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) pada pelaku usaha pariwisata masih relatif belum optimal, Sampai dengan akhir 2020, tercatat baru sekitar 16% usaha hotel di Sulampua yang telah tersertifikasi CHSE, Setidaknya terdapat dua kendala utama penerapan CHSE tersebut, yaitu persepsi pelaku usaha terhadap manfaat CHSE yang

kurang dirasakan langsung dan sosialisasi yang tidak optimal, **Tantangan keempat** adalah proses pembangunan konstruksi di destinasi wisata yang tertunda akibat pandemi, sebagaimana yang terjadi di destinasi Likupang (Sulawesi Utara), Hingga akhir 2020, pembangunan fase 1 destinasi Likupang, berupa pembangunan gerbang utama baru mencapai 70%, mundur dari rencana sebelumnya, dengan target penyelesaian pada triwulan IV 2020,

**Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Sulampua,** Selama 2020, pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata masih terus berjalan dengan nilai proyek terbesar adalah pembangunan sarana transportasi.



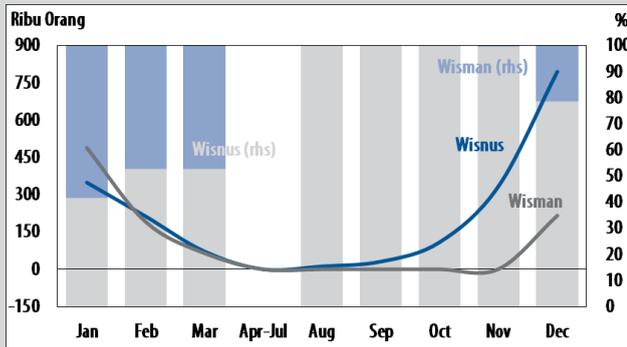
Sumber: BCI Asia, diolah

**Grafik VI.14.** Nilai Pembangunan Proyek Sarana Wisata Sulampua 2020

Selain itu, **penerapan adaptasi kebiasaan baru dalam berwisata sudah mulai dilakukan,** Raja Ampat menjadi salah satu destinasi yang dipandang berhasil dalam menerapkan pariwisata di era adaptasi kebiasaan baru, melalui sistem Registrasi *Online* (Regol), Sistem ini diterapkan sejak Agustus 2020 dan secara signifikan mampu mendorong wisnus untuk berkunjung ke Raja Ampat, karena sistem ini berupaya mengurangi risiko penularan Covid-19 di destinasi, sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan, Sistem ini berupaya memastikan kondisi kesehatan wisatawan dan menyampaikan *itinerary* sejak kedatangan hingga kepulangan, yang dilengkapi dengan informasi pemandu wisata selama berada di Raja Ampat.

Potensi perbaikan kinerja pariwisata juga didukung oleh kinerja perbankan, **Ditengah penurunan aktivitas wisata, kondisi kredit pariwisata masih terjaga dengan baik,** Penyaluran kredit pariwisata di Sulampua pada triwulan IV 2020 tercatat tumbuh 4,77% (yoy) dengan tingkat kualitas kredit yang terjaga baik ( $\leq 5\%$ ), Sejalan dengan kondisi tersebut, upaya pemerintah terkait pemulihan ekonomi di sektor pariwisata, melalui program restrukturisasi kredit menunjukkan kenaikan, Secara nominal, restrukturisasi kredit sektor pariwisata terbesar diberikan untuk Lapangan Usaha (LU) akomodasi dan makan minum, mencapai

Rp24,69 miliar, Berdasarkan destinasi wisata utama di Sulampua, nominal restrukturisasi kredit sektor pariwisata terutama diberikan di Destinasi Likupang, yaitu sebesar Rp22,11 miliar.



Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Raja Ampat, diolah  
Ket.: April-Juli 2020 penutupan akses ke Raja Ampat

Grafik VI.15. Kunjungan Wisatawan ke Raja Ampat 2020

Tabel VI.7. Restrukturisasi Kredit Pariwisata Sulampua berdasar Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Restrukturisasi Kredit 2020							
	Nominal (Miliar Rp)				Jumlah Rekening			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Pariwisata	7,12	31,86	32,26	33,61	112	526	547	524
Akmamin	4,41	22,14	22,37	24,69	47	242	261	262
Transportasi & Komunikasi	2,70	9,72	9,90	8,93	65	284	286	262

Sumber: Bank Indonesia

Tabel VI.8. Restrukturisasi Kredit Pariwisata Sulampua berdasar Destinasi Wisata

Destinasi	Restrukturisasi Kredit 2020							
	Nominal (Miliar Rp)				Jumlah Rekening			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Sulampua	7,12	31,86	32,26	33,61	112	526	547	524
Likupang	6,39	23,47	23,35	22,11	100	320	329	294
Wakatobi	0,15	5,12	5,40	5,19	2	147	150	142
Raja Ampat	0,57	3,27	3,51	6,31	10	59	68	88

Sumber: Bank Indonesia

## Strategi Peningkatan Kinerja Pariwisata Sulampua

Pada era adaptasi kebiasaan baru ini, perbaikan kinerja pariwisata Sulampua diawali dengan upaya mendorong wisnus. Salah satu strategi jangka pendek yang dapat ditempuh adalah melalui peningkatan promosi, sementara itu dalam jangka panjang, peningkatan kondisi sarana dan infrastruktur diharapkan dapat terus dilanjutkan. Secara umum, perbaikan kondisi pariwisata sangat bergantung pada keyakinan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas wisata, Terkait hal tersebut, maka kelancaran dan percepatan program vaksinasi Covid-19 menjadi faktor penentu yang krusial dalam mendorong akselerasi perbaikan kinerja pariwisata, Selain itu, strategi untuk mempersiapkan dan menarik minat wisatawan perlu

disiapkan, Dalam jangka pendek, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, baik oleh stakeholders pariwisata di pusat maupun di daerah, diantaranya (1) promosi yang lebih tepat sasaran dengan mengembangkan dan menggunakan *big data analytics*, (2) inovasi *bundling* wisata dengan layanan kesehatan, misalnya paket wisata dilengkapi *Rapid Test Antigen-Swab*, (3) mendorong pelaksanaan MICE dengan protokol kesehatan di lokasi yang sudah tersertifikasi CHSE, dan (4) pemberian subsidi tarif pesawat ke destinasi wisata, Sementara strategi jangka panjang dapat difokuskan pada pembangunan dan peningkatan aspek 3A (Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas) dan 2P (Promosi dan Pelaku) yang meliputi *soft* dan *hard infrastructure*, Upaya peningkatan *soft infrastructure* fokus pada penyesuaian regulasi, kemudahan administrasi, dukungan promosi dan kemudahan pembiayaan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata, Sementara itu, perbaikan *hard infrastructure* fokus pada peningkatan aksesibilitas, atraksi dan amenitas di destinasi wisata, khususnya di KEK Likupang sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang ada di wilayah Sulampua, Upaya peningkatan aksesibilitas, atraksi dan amenitas tersebut dilakukan melalui percepatan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, peningkatkan kualitas atraksi yang terintegrasi dan dukungan stakeholders di pusat dan daerah untuk mendorong investasi di sektor pariwisata Sulampua,

## BAGIAN 7

# Isu Strategis Perbaikan Kinerja Pariwisata: Mendorong Aktivitas Wisatawan Nusantara dengan Tetap Mempersiapkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara

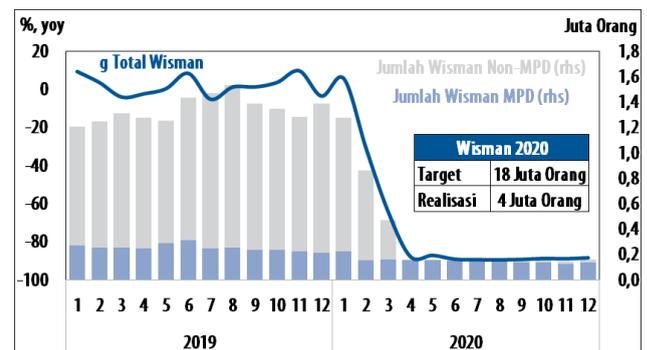
*Perkembangan pariwisata pada tahun 2020 menunjukkan penurunan tajam sebagai dampak restriksi perjalanan wisata yang diterapkan oleh hampir seluruh negara karena pandemi Covid-19. Kinerja pariwisata yang turun secara signifikan tersebut, menyebabkan target jumlah wisman sebanyak 18 juta orang dan target devisa pariwisata senilai USD 21 miliar tidak dapat tercapai. Untuk menahan penurunan pariwisata lebih dalam, Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan berupa sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, & Environment Sustainability (CHSE), travel corridor arrangement, dan kebijakan stimulus melalui hibah pariwisata dan subsidi airport tax. Dalam rangka mendukung perbaikan kinerja pariwisata pada 2021, strategi perlu difokuskan pada perbaikan aktivitas wisatawan nusantara yang dilakukan melalui program Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja, dengan tetap mempersiapkan kedatangan wisatawan mancanegara. Upaya pemulihan wisatawan nusantara dilakukan melalui penguatan implementasi sertifikasi CHSE, kelanjutan stimulus perbaikan kinerja pariwisata, peningkatan kegiatan MICE hybrid dan penguatan dukungan program Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja. Dari sisi wisatawan mancanegara, upaya pemulihan dapat dilakukan melalui penguatan travel corridor arrangement dan travel bubbles. Keberlanjutan pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) perlu terus dilakukan ke arah peningkatan kualitas. Seluruh strategi tersebut akan berjalan baik, apabila ditopang oleh percepatan program vaksinasi yang menjadi kunci perbaikan kinerja pariwisata.*

### Kinerja Pariwisata 2020

**Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kinerja pariwisata global pada tahun 2020 secara signifikan.** Hal ini disebabkan oleh penerapan restriksi perjalanan di hampir seluruh negara di dunia dan penurunan minat berpergian yang drastis, seiring kekhawatiran terhadap penyebaran virus COVID-19. Dalam perkembangannya, sejumlah negara telah melakukan relaksasi atas kebijakan restriksi perjalanannya. Namun, akibat minat berpergian dalam rangka wisata yang secara persisten masih rendah, jumlah kedatangan wisatawan internasional secara global turun sebesar 74% (yoy), dengan estimasi kerugian ekonomi sebesar USD 1,3 triliun pendapatan ekspor, atau sekitar 11 kali lebih tinggi dari kerugian ekonomi pada *global financial crisis* tahun 2009<sup>16</sup>. Secara kawasan, Asia Pasifik termasuk wilayah yang kinerja pariwisatanya paling terdampak dengan penurunan kedatangan internasional sebesar 84% (yoy).

**Penurunan kinerja pariwisata Indonesia pada tahun 2020 yang cukup dalam, menyebabkan capaiannya jauh dibawah target.** Penerapan kebijakan pelarangan sementara orang asing masuk ke wilayah Indonesia sejak April 2020, ikut menyebabkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang sepanjang tahun 2020 tercatat hanya sebanyak 4,0 juta atau turun sebesar -75,0%

(yoy) dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 16,2 juta (Grafik VII.1). Lebih rendahnya angka wisman tersebut, disebabkan oleh turunnya jumlah kunjungan dari hampir seluruh asal wisman utama, dengan penurunan terdalam dari wisman asal Singapura dan Tiongkok. Kedatangan wisman selama 2020 yang turun tajam terpantau pada seluruh pintu masuk, terutama pintu masuk udara dan laut. Kinerja jumlah wisman tahun 2020 tersebut jauh dibawah target awal pemerintah sebesar 18 juta wisman.



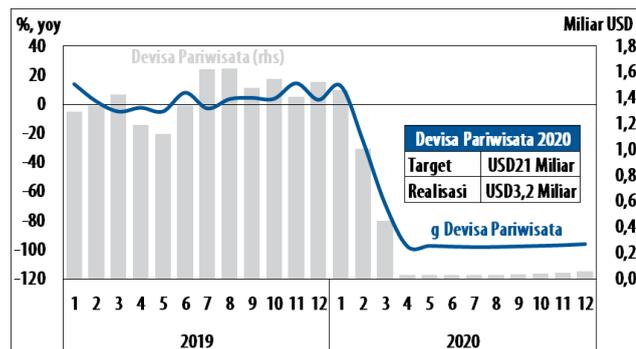
Sumber: BPS, diolah

Grafik VII.1. Perkembangan Jumlah Wisman

**Rendahnya kedatangan wisman menyebabkan target penerimaan devisa pariwisata pada tahun 2020 tidak tercapai.** Penerimaan devisa ekspor jasa perjalanan tahun

<sup>16</sup> UNWTO, World Tourism Barometer Vol. 19 - Issue 1 - January 2021.

2020 tercatat hanya sebesar USD 3,2 miliar atau turun sebesar -80,8% (yoy) dari sebesar USD 16,9 miliar (Grafik VII.2). Perolehan devisa pada periode 2020 mayoritas disumbang oleh capaian devisa pada triwulan I 2020 yang sebesar USD 2,9 miliar (sekitar 89,7% dari total tahun 2020). Besarnya devisa pada triwulan I 2020, diakibatkan pada periode tersebut belum terdapat kebijakan pelarangan orang asing masuk ke Indonesia dan berbagai restriksi perjalanan yang diterapkan oleh negara asal wisman utama masih sedikit. Keseluruhan capaian devisa pariwisata tahun 2020 masih jauh dibawah target awal devisa yang ditetapkan Pemerintah, yaitu sebesar USD 21,0 miliar.

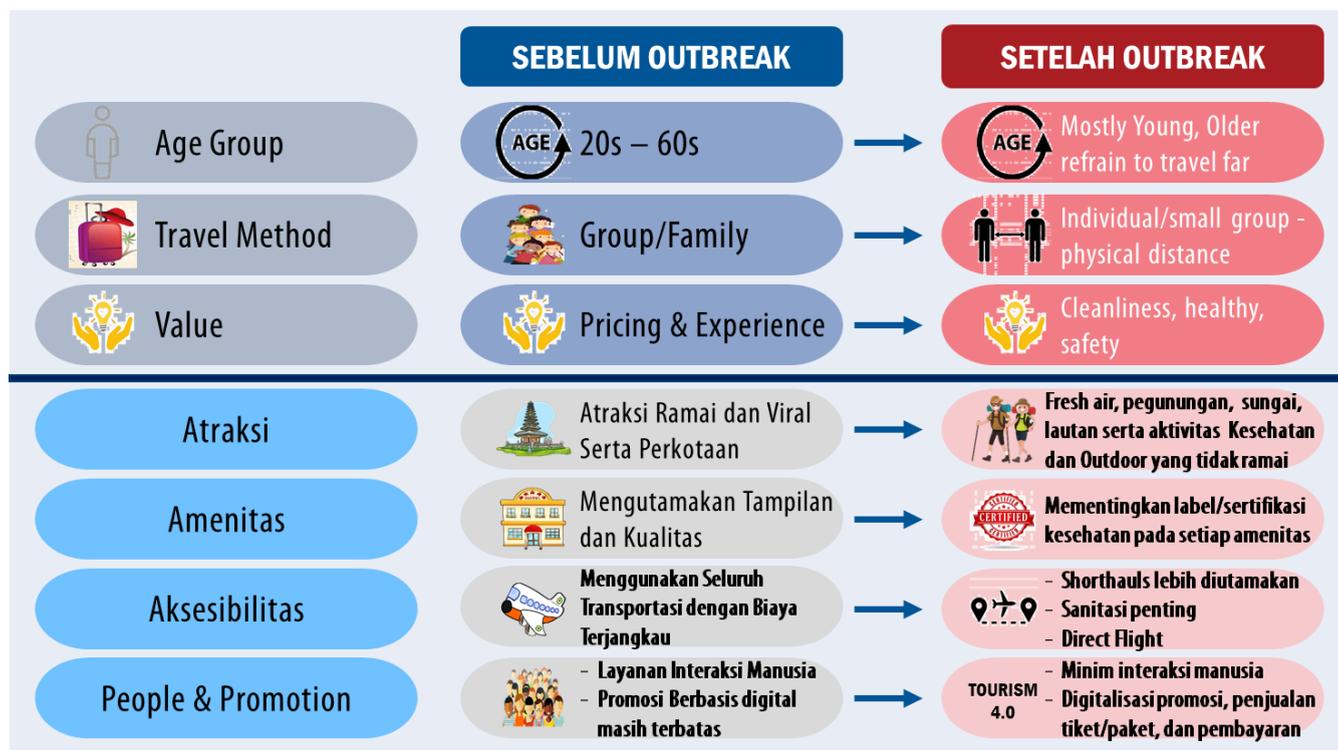


Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah

Grafik VII.2. Perkembangan Penerimaan Devisa Pariwisata

## Perubahan Perilaku Wisatawan

**Pandemi COVID-19 menyebabkan pergeseran kecenderungan pariwisata, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.** Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, krisis kesehatan yang dipicu oleh pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya pergeseran profil wisatawan dan preferensi terhadap destinasi wisata. Aktivitas pariwisata oleh kelompok berusia muda, diperkirakan akan lebih dahulu menunjukkan peningkatan aktivitas dibanding kelompok lanjut usia yang cenderung memiliki kekhawatiran terhadap risiko kesehatan yang lebih tinggi. Selain itu, kegiatan bepergian juga akan cenderung dilakukan secara individu atau dalam kelompok yang lebih kecil, dibandingkan dengan sebelumnya yang berwisata dalam kelompok yang besar. Dari sisi destinasi, kegiatan wisata selama masa pandemi COVID-19 cenderung dilakukan dalam jarak yang dekat, untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 akibat waktu perjalanan yang panjang. Selain itu, wisata alam terbuka (*outdoor*), cenderung tidak ramai dan dilengkapi dengan protokol kesehatan, dan keamanan yang baik pada setiap aspeknya menjadi pilihan destinasi utama dalam berwisata<sup>17</sup>. Lebih lanjut, kebutuhan akan layanan wisata yang terdigitalisasi juga meningkat untuk meminimalisasi kontak fisik (Gambar VII.1).



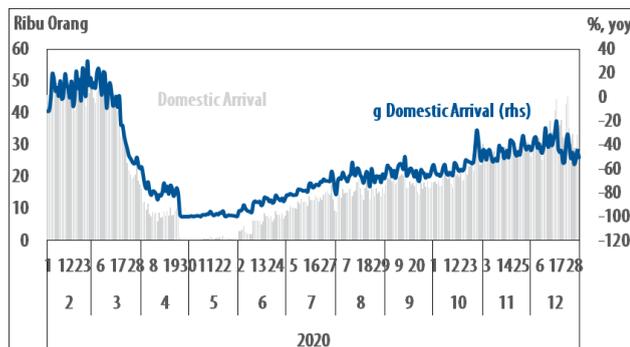
Sumber: Hotelworks, PATA, UNWTO, IATA, Kemenparekraf

Gambar VII.1. Perubahan Profil dan Preferensi Pariwisata

<sup>17</sup> UNWTO, COVID-19 in Tourism – 2020: A Year in Review

## Peluang Wisatawan Nusantara Dalam Perbaikan Kinerja Pariwisata

Di tengah kinerja wisman yang rendah sepanjang tahun 2020, terdapat peluang pemulihan pariwisata yang bersumber dari wisatawan nusantara (wisnus). Kinerja wisnus secara gradual menunjukkan pemulihan. Aktivitas kedatangan domestik di beberapa bandara utama menunjukkan peningkatan, sejak bulan Juli pasca dilakukan relaksasi pembatasan sosial skala besar (PSBB). Namun demikian, peningkatan jumlah aktivitas wisnus hingga akhir tahun tertahan di Desember 2020, akibat adanya kebijakan pembatasan aktivitas wisata oleh Pemerintah melalui persyaratan menyampaikan hasil tes *swab* antigen atau *polymerase chain reaction* (PCR) untuk mencegah kenaikan kasus baru COVID-19. Di sisi lain, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel juga secara perlahan membaik, meski belum kembali ke level sebelum Covid-19. Perbaikan kinerja ini terlihat pada seluruh wilayah, sejalan dengan aktivitas wisata dan bisnis yang mulai meningkat. Sementara itu, Bali mengalami perbaikan dengan level yang lebih rendah dibanding wilayah lainnya, akibat kapasitas akomodasi yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lainnya (Grafik VII.3 dan VII.4).



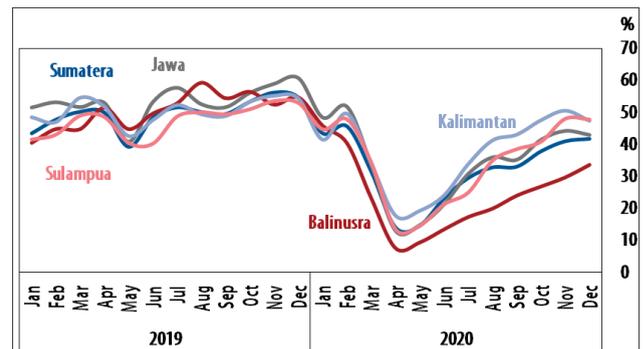
Sumber: PT Angkasa Pura I & II

Grafik VII.3. Kedatangan Domestik di 5 Bandara Destinasi Wisata

Wisatawan nusantara masih menunjukkan minat berwisata yang masih tinggi. Pasca peningkatan aktivitas wisnus pada akhir 2020, hasil Survei Preferensi Wisata<sup>18</sup> mengindikasikan bahwa hampir setengah dari responden sudah memiliki rencana wisata pada 2021. Rencana wisata tersebut memuncak pada triwulan II dan III 2021, dengan lokasi destinasi yang sudah akan meluas ke luar provinsi (Grafik VII.5). Adapun destinasi favorit untuk rencana wisata tersebut berada di kawasan Jawa dan Bali, dengan jenis wisata yang diminati berupa wisata alam serta wisata belanja atau kuliner. Moda transportasi pilihan wisatawan lebih mengutamakan menggunakan kendaraan pribadi (Grafik VII.6). Perilaku tersebut masih sejalan dengan

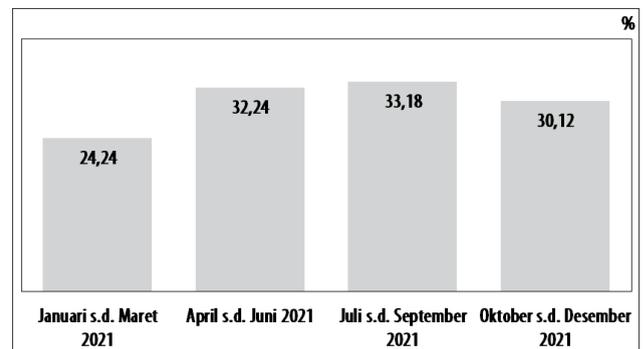
<sup>18</sup> Survei dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap 800 responden di 8 kota besar Indonesia, yang merupakan originasi wisnus terbesar.

pergeseran perilaku wisata sebagai adaptasi di era kebiasaan baru.



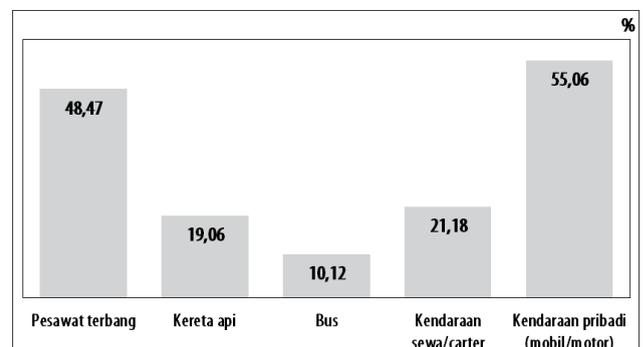
Sumber: BPS, diolah

Grafik VII.4. Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Per Kawasan



Sumber: Survei Bank Indonesia

Grafik VII.5 Rencana Kegiatan Wisata

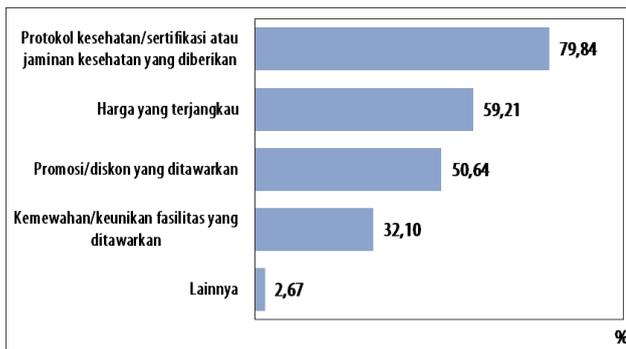


Sumber: Survei Bank Indonesia

Grafik VII.6 Preferensi Moda Transportasi

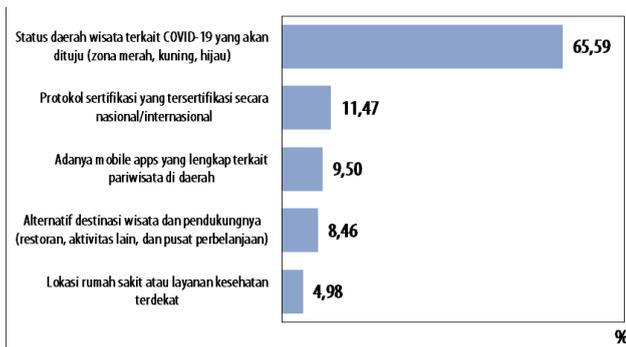
Momentum tingginya minat wisatawan nusantara perlu didukung melalui pemberian insentif. Berdasarkan Survei Preferensi Wisata, faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam berwisata adalah ketatnya protokol kesehatan yang diterapkan di destinasi dan harga yang terjangkau serta promo/diskon yang ditawarkan (Grafik VII.7). Responden juga mengharapkan ketersediaan beberapa informasi yang dinilai dapat mendukung keyakinan berwisata, seperti status daerah wisata yang akan dituju terkait Covid-19, sertifikasi kesehatan, lokasi layanan kesehatan, ketersediaan *mobile application* yang menginformasikan berbagai hal terkait

destinasi pariwisata, alternatif atraksi, dan fasilitas pendukung lainnya (Grafik VII.8).



Sumber: Survei Bank Indonesia

**Grafik VII.7** Faktor Pertimbangan Berwisata



Sumber: Survei Bank Indonesia

**Grafik VII.8** Informasi Penting Dibutuhkan Dalam Melakukan Kegiatan Wisata

## Strategi Peningkatan Aktivitas Wisnus

**Upaya terintegrasi untuk meningkatkan aktivitas wisata nusantara ditempuh melalui program Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja (BBWI).** Program BBWI tersebut merupakan kolaborasi antar K/L, untuk mengawal perbaikan pariwisata dengan mengandalkan potensi wisnus dalam berwisata di wilayah Indonesia. Hal ini didasari pada kunjungan wisman pada 2021 yang diprediksi masih terbatas, sehingga untuk menghidupkan usaha pariwisata diperlukan dukungan dari wisnus. Beberapa destinasi ditetapkan sebagai destinasi BBWI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang merupakan 5 destinasi super prioritas (DSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, dan destinasi lainnya relatif siap seperti Kepulauan Riau, Belitung, DKI Jakarta, Bandung, Banyuwangi, Bali, Tanjung Puting, Derawan, dan Raja Ampat.

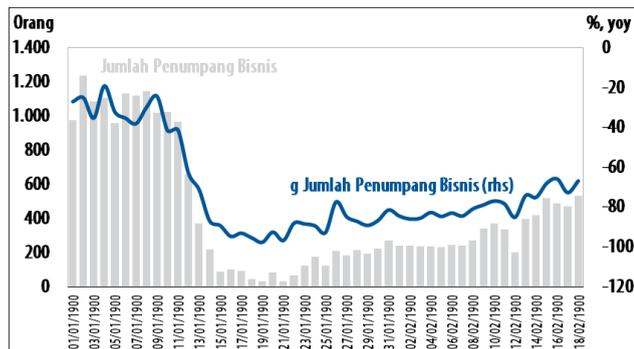
**Implementasi sertifikasi kesehatan menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan keyakinan berwisata.** Ditengah pandemi dimana wisatawan masih khawatir untuk berwisata secara aman dari COVID-19, Pemerintah menerapkan program sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety*

*and Environment Sustainability (CHSE)* pada Agustus 2020. Sertifikasi CHSE ditujukan pada beberapa usaha pariwisata seperti usaha jasa transportasi, usaha hotel, *homestay*/pondok wisata, usaha restoran, rumah makan, MICE dan usaha pariwisata lainnya sesuai perkembangan dan perundangan yang berlaku<sup>19</sup>. Dalam perkembangannya, realisasi jumlah sertifikasi sudah cukup tinggi yakni mencapai 89% dari target, meski masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali serta baru mencakup sebagian usaha pariwisata. Kendati realisasi sertifikasi cukup tinggi, terdapat tantangan dimana peningkatan aktivitas liburan di destinasi wisata cenderung diikuti oleh kenaikan kasus Covid-19. Berkaca pada pengalaman Singapura dan Thailand, sertifikasi protokol kesehatan yang disebut Singapore SG Clean dan Amazing Thailand SHA memiliki cakupan sektor lebih luas dan didukung keterlibatan serta sosialisasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang intensif. Upaya tersebut mendukung efektivitas pengendalian Covid-19 ditengah pembukaan pariwisata domestik. Melihat kondisi tersebut, ruang perbaikan ke depan yang dapat dilakukan berupa perluasan sertifikasi CHSE ke usaha pariwisata dan destinasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata yang aman serta peningkatan *awareness* masyarakat terkait sertifikasi CHSE.

**Penyaluran stimulus diharapkan mampu membantu kondisi usaha pariwisata dan meningkatkan permintaan guna menopang perbaikan sektor pariwisata.** Stimulus pariwisata melalui dana PEN berupa hibah dan subsidi *airport tax* pada tahun 2020, terealisasi dengan baik dan memberi dampak positif bagi kegiatan pariwisata. Hibah pariwisata dalam waktu relatif singkat telah tersalurkan Rp2,3 triliun atau 69,5% dari alokasi senilai Rp3,3 triliun. Penyaluran tersebut dilakukan terhadap hotel dan restoran yang memenuhi persyaratan di 101 Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi antara Pemda dengan dunia usaha memegang peranan penting dalam realisasi dana hibah tersebut. Survei terhadap pelaku usaha pariwisata juga menunjukkan, bahwa hibah tersebut cukup membantu biaya operasional hotel dan restoran rata-rata selama 1-3 bulan. Untuk stimulus sektor pariwisata lainnya, yaitu berupa subsidi *airport tax* mencatat realisasi sebesar Rp 278 miliar atau 108,9% dari targetnya. Ke depan, bantuan pemerintah tersebut perlu penguatan berupa waktu pelaksanaan yang tepat, jumlah yang optimal bagi dunia usaha, dan digabungkan dengan paket kebijakan lainnya

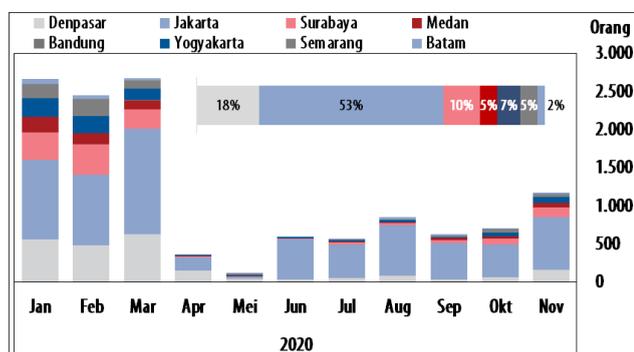
<sup>19</sup> [www.kememparekraf.go.id/bantuan/#topikumm](http://www.kememparekraf.go.id/bantuan/#topikumm)

(*bundling package*<sup>20</sup>), sehingga dapat mempunyai daya dorong terhadap perbaikan pariwisata dan ekonomi yang lebih besar dibandingkan pelaksanaan pada 2020.



Sumber: Forward Keys

Grafik VII.9 Jumlah Penumpang Tujuan Bisnis



Sumber: Forward Keys

Grafik VII.10 Perkembangan Jumlah Penumpang Bisnis Berdasarkan Destinasi

**Penguatan kesiapan aktivitas MICE domestik melalui kegiatan yang bersifat *hybrid*.** Aktivitas MICE domestik yang menunjukkan tren meningkat selama pandemi perlu dijaga dan ditingkatkan. Minat aktivitas MICE domestik terlihat pada jumlah penumpang bisnis penerbangan yang dalam tren meningkat sampai dengan akhir 2020, dengan destinasi favorit Jakarta, Bali, dan Surabaya (Grafik VII.9 dan VII.10). Aktivitas MICE domestik terutama bersumber dari pemerintah dengan pangsa terbesar (68%), seiring dengan komitmen pemerintah untuk mendukung pemulihan pariwisata yang aman. Meskipun demikian, menurut hasil survei McKinsey pada November 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat kekhawatiran dari masyarakat untuk menghadiri *event* besar termasuk MICE. Untuk itu konsep MICE *Hybrid* (*offline* dan *online*) yang sudah diterapkan di beberapa kota besar, perlu terus ditingkatkan dan diperluas ke daerah yang relatif siap. Untuk tetap menjaga keamanan, kegiatan MICE *Hybrid* tersebut didukung oleh penerapan

protokol CHSE secara ketat untuk aktivitas *offline* dan penggunaan teknologi yang mumpuni untuk aktivitas *online*. Mengacu pada model penyelenggaraan MICE *Hybrid* di Singapura yang disebut dengan *Travel Revive*, beberapa penguatan yang perlu dilakukan yakni penerapan protokol kesehatan yang ketat secara *end-to-end*, pemanfaatan berbagai teknologi seperti *touchless* dan *tracing apps*, dan pengintegrasian dengan aktivitas wisata *leisure* melalui persiapan *itinerary* perjalanan wisata yang aman untuk meningkatkan *length of stay* peserta *offline*.

**Dukungan digitalisasi dilakukan melalui perluasan penggunaan transaksi nontunai di sektor pariwisata secara *end-to-end*.** Transaksi pembayaran nontunai merupakan transaksi pembayaran yang dinilai paling aman dilakukan di saat pandemi, dibandingkan media fisik yang memiliki risiko perantara penyebaran COVID-19 lebih tinggi<sup>21</sup>. World Health Organization (WHO) juga sudah mengeluarkan pedoman bahwa *contact-less electronic* atau *mobile payments*, dapat digunakan untuk mengurangi risiko transmisi virus COVID-19. Di sektor pariwisata, penyediaan media yang aman termasuk untuk sistem pembayaran sangat penting dilakukan, untuk membangun *confidence* masyarakat dalam berwisata yang aman. Saat ini, jumlah usaha/*merchant* yang menyediakan sistem pembayaran nontunai (termasuk QRIS) di destinasi wisata terus ditingkatkan. Hingga Februari 2021, jumlah *merchant* QRIS terkait pariwisata tercatat sebanyak 59.741 *merchant*. Dengan target perluasan QRIS secara total pada 2021 sebanyak 12 juta *merchant* di akhir 2021, diharapkan *merchant* QRIS terkait pariwisata akan meningkat pesat dan semakin mendukung upaya digitalisasi sistem pembayaran di sektor pariwisata secara *end-to-end*. Terkait hal tersebut, perluasan penggunaan transaksi nontunai di destinasi wisata tidak hanya dilakukan pada *merchant* terkait pariwisata (a.l hotel, *travel agent*, objek wisata), namun akan diterapkan pada seluruh aktivitas pariwisata, baik transportasi, akomodasi, tiket destinasi, tiket pertunjukan, maupun kuliner/souvenir. Selain itu, perluasan penggunaan QRIS juga dilakukan melalui integrasi dengan layanan *online travel agent* (OTA), mencakup aktivitas pariwisata dengan ekosistem ekonomi keuangan digital (*digital banking*, *digital payment*, dan *fintech*). Perluasan penggunaan QRIS direncanakan dilakukan di seluruh daerah wisata dengan fokus pada 5 destinasi pariwisata super prioritas (DSP) (Gambar VII.2).

<sup>20</sup> Stimulus dalam bentuk *bundling package* berupa subsidi penerbangan, *free entry pass*, *voucher* belanja, dan diskon hotel terbukti efektif dilakukan oleh otoritas pariwisata di Tiongkok, Thailand, dan Vietnam

<sup>21</sup> Thomas et. Al (2008); Van Doremalen et.al (2020)



Sumber: Kemenko Marves, Kemenparekraf, dan Bank Indonesia

**Gambar VII.2.** Dukungan Bank Indonesia Dalam Program Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja yang Disinergikan Dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

**Pengembangan UMKM pendukung pariwisata terus dilakukan untuk meningkatkan spending wisatawan.**

UMKM merupakan salah satu kegiatan usaha yang terdampak paling besar akibat pandemi. Penurunan omzet yang cukup besar dirasakan oleh UMKM yang bergerak di seluruh sektor, termasuk UMKM di bidang ekonomi kreatif dan pendukung pariwisata. Lebih dari 70% UMKM pendukung pariwisata di daerah merasakan dampak dari COVID-19, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja sektor pariwisata secara keseluruhan. Strategi pengembangan UMKM pariwisata dilakukan melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas agar UMKM dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan terkurasi, dan pembiayaan agar relatif mudah mendapatkan akses finansial.

**Beberapa daerah mengimplementasikan strategi yang inovatif untuk dapat mendorong wisnus.**

Beberapa strategi yang dilakukan antara lain berupa strategi integrasi yang berfokus pada pembukaan wisata outdoor, dengan penerapan CHSE berbasis aplikasi yang dilakukan di Banyuwangi dan penguatan kampanye membangun branding wisata premium yang dilakukan di Labuan Bajo. Implementasi sertifikasi kesehatan di Banyuwangi dilakukan dengan mendorong sertifikasi CHSE pada seluruh usaha pendukung pariwisata dan pemandu wisata. Banyuwangi juga mengembangkan aplikasi Banyuwangi tourism apps, yang menyediakan konten antara lain mengenai informasi zonasi COVID-19, destinasi wisata, pemesanan tiket,

pemesanan makanan, informasi usaha tersertifikasi, dan nomor darurat yang dapat dihubungi. Banyuwangi juga mengembangkan new normal outdoor tourism dengan carrying capacity melalui aplikasi. Keseluruhan kebijakan tersebut didukung oleh perangkat daerah yang membuat aturan dan secara konsisten melakukan penegakan disiplin. Di Labuan Bajo, penguatan kampanye membangun branding wisata dengan tagline REBOUND #RINDULABUAN BAJO yang dipromosikan secara intensif melalui website dan sosial media. Penguatan atraksi juga dilakukan di Labuan Bajo, dengan melakukan branding cagar biosfer komodo serta integrasi paket wisata Bima, Flores, Alor, dan Lembata, disamping upaya penguatan implementasi CHSE pada atraksi diving, trekking, dan liveboard, serta gerakan bersih sehat dan aman di 11 kabupaten.

**Kunci penting efektivitas dari semua strategi peningkatan aktivitas wisnus di atas adalah upaya percepatan dan perluasan vaksinasi.**

Kesuksesan program BBWI perlu didukung oleh penanganan kesehatan melalui percepatan dan perluasan vaksinasi. Memperhatikan masih adanya kekhawatiran masyarakat untuk bepergian dapat dijawab melalui kegiatan vaksinasi. Di sisi lain, daerah destinasi pariwisata utama dan originasi wisnus terbesar dapat dipertimbangkan sebagai daerah prioritas dalam percepatan dan perluasan vaksinasi. Hal ini diperlukan sebuah kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, agar aktivitas pariwisata oleh wisnus yang sehat dapat tercipta.

## Outlook Pariwisata 2021

**Kinerja pariwisata global pada tahun 2021 diperkirakan belum pulih ke level tahun 2019.** Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan pemulihan pariwisata global berjalan dengan lambat, yaitu laju perbaikan ekonomi global yang masih terbatas, pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, dan kebijakan restriksi perjalanan yang masih berlaku di sebagian besar negara di dunia. Kasus COVID-19 yang masih meningkat hingga awal 2021 dan adanya varian baru menyebabkan restriksi perjalanan kembali diperketat, sehingga keyakinan untuk berwisata kembali tertahan. Berdasarkan perkembangan terkini, pariwisata global diperkirakan baru pulih ke level 2019 pada tahun 2023-2024<sup>22</sup>. Sementara kawasan Asia Pasifik, pembalikan kinerja pariwisata internasional diperkirakan baru akan terjadi pada tahun 2022 dan mencapai ke level 2019 pada tahun 2024<sup>23</sup>.

## Mempersiapkan Kedatangan Wisman

**Strategi mendukung peningkatan kunjungan wisman bisnis ditempuh melalui kebijakan *Travel Corridor Arrangement (TCA)*.** TCA merupakan kesepakatan dua atau lebih negara, untuk memberikan kemudahan aktivitas perjalanan masyarakat antar negara. TCA masih diutamakan untuk perjalanan bisnis, diplomatik dan dalam kaitan kesehatan serta kemanusiaan. Implementasi TCA baru mencakup 4 negara mitra, yakni Tiongkok, Korea Selatan, Singapura dan UEA. Hingga akhir 2020, dampak implementasi TCA masih terbatas terhadap kedatangan wisman bisnis, akibat relatif tingginya kasus Covid-19 di Indonesia sehingga Indonesia masuk dalam kategori *very high risk*<sup>24</sup>. Kondisi ini ditengarai ikut mempengaruhi belum berjalannya rencana TCA dengan Jepang. Kedepan, TCA dengan Malaysia dan negara anggota ASEAN lainnya diperkirakan dapat mendukung peningkatan kunjungan wisman bisnis ke Indonesia.

**Di tengah perkiraan kunjungan wisman yang masih minim, rencana *travel bubble* tetap dipersiapkan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisman *leisure*.** *Travel bubble* merupakan strategi *travel corridor* dengan melakukan pembatasan wilayah kunjungan. Strategi ini telah dipersiapkan oleh Pemda dan pelaku usaha di Bintan – Kepulauan Riau dan Nusa Dua – Bali, dengan menyiapkan kawasan khusus untuk aktivitas wisman dan terisolasi dari

kegiatan normal masyarakat. *Travel bubble* di Bintan dan Nusa Dua ditargetkan dari wisman asal negara utama dengan jarak tempuh yang relatif dekat atau memiliki akses/penerbangan langsung. Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, dibutuhkan dukungan pemerintah, baik pusat dan daerah, dalam menjalin kerja sama dengan negara target wisman utama. Jaminnan implementasi protokol kesehatan yang ketat dan disepakati kedua belah pihak diharapkan dapat meningkatkan keyakinan wisman untuk datang. Keberhasilan rencana *travel bubble* nantinya berpotensi untuk direplikasi di destinasi lain atau dengan perluasan cakupan negara yang terlibat.

**Strategi *virtual tourism* sebagai upaya menjaga minat wisman, menanti aktivitas wisata secara langsung.** Beberapa daerah telah melakukan strategi *virtual tourism* antara lain Jakarta, Banyuwangi, Bintan, Bandung, Yogyakarta dan Bali. Pada *virtual tourism* ini, wisman dapat menikmati wisata secara virtual menggunakan *augmented reality* dan *interactive virtual tourism*. Lebih jauh lagi, aktivitas *virtual tourism* dapat dilengkapi dengan *guide* yang interaktif, mengedukasi wisman terkait destinasi wisata. Kedepan aktivitas *virtual tourism* dapat diperluas dan diperkuat. Destinasi lain khususnya 5 DSP, dapat menjadi bagian *virtual tourism* yang sekaligus sebagai sarana promosi destinasi seiring pembukaan pariwisata internasional. *Virtual tourism* juga perlu diperluas ke negara-negara asal wisman utama untuk menjaga minat yang masih tinggi. Kemudian, perlu diperkuat dengan memberikan tautan untuk pembelian produk pariwisata, sehingga secara terintegrasi dapat mendukung peningkatan penjualan produk pariwisata Indonesia.

## Strategi Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

**Analisa *big data*<sup>25</sup> dan studi *Quality Tourism (QT)*<sup>26</sup> menunjukkan perlunya pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DSP) yang fokus pada peningkatan kualitas destinasi wisata.** Berdasarkan hasil analisa *big data*, dari kelima aspek yang terdiri dari aksesibilitas, atraksi, amenitas, promosi, dan pelaku, tantangan terbesar yang masih dihadapi pada keseluruhan DSP adalah aspek (*point of interest*) (Tabel VII.1).

<sup>22</sup> Tourism Economics

<sup>23</sup> UNWTO, World Tourism Barometer Vol. 19 - Issue 1 - January 2021.

<sup>24</sup> Kategori ditetapkan oleh CDC, USA per Desember 2020.

<sup>25</sup> Hasil pengolahan *big data* menghasilkan beberapa *output* yaitu (i) jumlah sentimen positif di masing-masing aspek; (ii) jumlah sentimen negatif di masing-masing aspek; (iii) Jumlah wisatawan; (iv) Waktu kedatangan wisatawan; serta (v) Ranking review

<sup>26</sup> Bank Indonesia juga telah melakukan kajian QT yang menghasilkan indikator QT dan indeks QT di 5 DSP yang dihasilkan dari studi literatur dan *Executive Opinion Survey* yang diolah dengan menggunakan metode *Factor Analysis*. Parameter QT di destinasi wisata mencakup aspek daya saing, pariwisata berkelanjutan, pengalaman unik dan *high value*. Indeks QT di 5 DSP dan Nusa Dua disusun berbasis indikator QT tersebut dan merupakan hasil survei kepuasan *stakeholders* terhadap pemenuhan indikator QT di destinasi.

Selanjutnya, pada destinasi Borobudur, kriteria sentimen negatif tertinggi yang perlu diperhatikan ada pada aspek *point of interest* (atraksi), diikuti oleh aspek *price* (promosi), dan *cleanliness* (amenitas). Sementara, pada destinasi di Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang beberapa hal yang memiliki ruang perbaikan yang penting dilakukan adalah

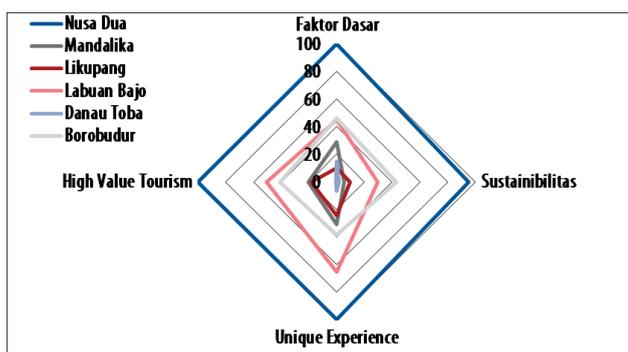
aspek *point of interest* (atraksi), aspek *facilities* (amenitas), dan *cleanliness* (amenitas). Berbeda dengan keempat destinasi lainnya, Danau Toba memiliki sentimen negatif tertinggi pada aspek *cleanliness* (amenitas), yang kemudian diikuti oleh aspek *point of interest* (atraksi).

**Tabel VII.1.** Analisa Big Data Terhadap Performa 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DSP)

Aspek 3A-2P	Parameter Trip Advisor	% Sentimen negatif terhadap sejumlah ulasan tahun 2019-2020				
		Borobudur	Mandalika	Labuan Bajo	Danau Toba	Likupang
Aksesibilitas	Infrastructure	2,15	3,27	1,79	1,43	7,14
	Transportation	1,61	1,31	1,60	0,00	0,00
	Accommodation	0,90	1,96	1,23	0,00	7,14
Amenitas	Facilities	3,76	5,88	4,72	1,43	21,43
	Cleanliness	3,94	3,92	4,43	5,71	14,29
Atraksi	Point of Interest	7,35	11,11	6,79	2,86	50,00
Promosi	Price	4,30	1,96	1,42	0,00	7,14
Pelaku	Hospitality	2,51	3,27	1,51	1,43	7,14

Sumber: Trip Advisor

Berdasarkan hasil *gap frontier* indeks QT pada 5 DSP, mayoritas indeks QT yang dihasilkan masih sangat lebar dari indeks QT pada Nusa Dua – Bali<sup>27</sup>, sehingga dapat menjadi ruang perbaikan (Gambar VII.4). Destinasi yang memiliki *gap* performa indeks QT yang paling lebar adalah Danau Toba dan Likupang. Pada destinasi Danau Toba, performa indeks QT secara umum masih sangat rendah, terutama pada aspek *sustainability*, *high value tourism*, dan *unique experience*. Sementara, untuk Likupang indeks QT perlu menjadi perhatian serius adalah aspek faktor dasar dan *sustainability*. Selanjutnya, indeks QT Borobudur yang perlu ditingkatkan adalah aspek *unique experience*. Pada destinasi Labuan Bajo dan Mandalika, performa indeks QT dengan gap tertinggi adalah aspek *sustainability* (Tabel VII.2).



Sumber: Bank Indonesia

**Gambar VII.4.** Gap Frontier Indeks QT di 5 DSP dibandingkan dengan Nusa Dua

Mengacu pada analisa big data dan hasil studi *Quality Tourism* diatas, dapat diusulkan prioritas pengembangan 5 DSP pada Danau Toba dan Likupang, terutama pada aspek

amenitas dan atraksi yang merupakan aspek yang mendapatkan penilaian paling rendah. Namun, pengembangan pada 5 DSP lainnya tetap perlu dilanjutkan, agar tujuan peningkatan kualitas destinasi pariwisata Indonesia tercapai.

**Tabel VII.2.** Rekomendasi Pengembangan 5 DSP berdasarkan hasil kajian QT & Gap Frontier

Destinasi	Faktor Dasar	Sustainability	Unique Experience	High Value
Danau Toba	Peningkatan kualitas Infrastruktur darat.	Perlu manajemen destinasi wisata berkelanjutan dan pemanfaatan ekonomi lokal.	Isu keramahan penduduk lokal dan pelaku usaha pariwisata.	Ketersediaan layanan dan akomodasi yang premium.
Borobudur - Joglosemar	Perlu adanya kebijakan pendukung dari Pemda.	Isu kepuasan masyarakat lokal dan perlunya unit tugas sadar wisata.	Peningkatan kualitas pelayanan usaha pendukung pariwisata.	Fasilitas convention center skala internasional.
Mandalika dan sekitarnya	Isu kriminalitas, kebersihan, dan kualitas SDM	Kurang berdampak pada ekonomi lokal, termasuk penggunaan produk lokal.	Isu keramahan penduduk lokal (kriminalitas).	Perlu pengembangan knowledge based tourism.
Labuan Bojo	Isu iklim usaha, kebersihan, dan kualitas SDM	Ketersediaan air bersih.	Isu keramahan penduduk lokal.	Ketersediaan layanan dan akomodasi yang premium, termasuk convention center skala internasional dan knowledge based tourism.
Manado - Likupang dan sekitarnya	Peningkatan akses transportasi udara, dan layanan pariwisata yang berkualitas	Pelestarian budaya termasuk sistem, hukum, panduan, dan informasi.	Tampilan estetik unik dan dimensi budaya.	Ketersediaan layanan dan akomodasi yang premium, termasuk convention center skala internasional dan knowledge based tourism.

Sumber: Bank Indonesia

<sup>27</sup> Kawasan Nusa Dua – Bali dijadikan *benchmark*, karena dalam kajian QT memiliki indeks yang tertinggi diantara destinasi lainnya.

## LAMPIRAN

Tabel Indikator Ekonomi Makro – PDRB

Indikator Makroekonomi Daerah	2018	2019				2019	2020				2020
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
<b>PDRB (% yoy)</b>											
<b>Sumatera</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>3,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,2</b>
Provinsi Aceh	4,6	3,8	3,7	3,7	5,3	4,1	3,4	-1,6	-0,1	-3,0	-0,4
Provinsi Sumatera Utara	5,2	5,3	5,3	5,1	5,2	5,2	4,2	-2,8	-2,6	-2,9	-1,1
Provinsi Sumatera Barat	5,1	4,8	5,0	5,1	5,1	5,0	3,9	-4,9	-2,9	-2,2	-1,6
Provinsi Riau	2,4	3,0	2,8	2,8	2,7	2,8	2,1	-3,3	-1,7	-1,5	-1,1
Provinsi Kepulauan Riau	4,5	4,8	4,6	4,9	5,0	4,8	2,0	-6,8	-5,8	-4,5	-3,8
Provinsi Bengkulu	5,0	5,0	5,0	5,0	4,7	4,9	3,6	-0,7	-0,5	-2,4	0,0
Provinsi Jambi	4,7	4,6	5,1	4,5	3,4	4,4	2,0	-1,9	-0,9	-1,0	-0,5
Provinsi Sumatera Selatan	6,0	5,7	5,8	5,7	5,7	5,7	4,0	-1,6	-1,4	-1,2	-0,1
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4,4	2,8	3,4	3,0	4,0	3,3	1,4	-5,0	-4,4	-1,0	-2,3
Provinsi Lampung	5,2	5,2	5,6	5,1	5,1	5,3	1,7	-3,6	-2,4	-2,3	-1,7
<b>Jawa</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>3,4</b>	<b>-6,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,5</b>
Provinsi DKI Jakarta	6,2	6,2	5,5	5,9	6,0	5,9	5,1	-8,2	-3,8	-2,1	-2,4
Provinsi Jawa Barat	5,7	5,4	5,7	5,1	4,1	5,1	2,7	-6,0	-4,1	-2,4	-2,4
Provinsi Banten	5,8	5,4	5,4	5,4	5,9	5,5	3,2	-7,4	-5,8	-3,9	-3,4
Provinsi Jawa Tengah	5,3	5,1	5,5	5,6	5,3	5,4	2,6	-5,9	-3,9	-3,3	-2,6
Provinsi DI Yogyakarta	6,2	7,5	6,8	6,0	6,2	6,6	-0,2	-6,7	-2,8	-0,7	-2,7
Provinsi Jawa Timur	5,5	5,5	5,7	5,3	5,5	5,5	3,0	-5,9	-3,7	-2,6	-2,4
<b>Kalimantan</b>	<b>3,9</b>	<b>5,2</b>	<b>5,4</b>	<b>5,7</b>	<b>3,7</b>	<b>5,0</b>	<b>2,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,2</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,3</b>
Provinsi Kalimantan Barat	5,1	5,2	5,1	5,1	4,7	5,0	2,8	-3,5	-4,3	-2,2	-1,8
Provinsi Kalimantan Tengah	5,6	6,0	7,5	5,2	6,0	6,2	2,9	-3,2	-3,1	-2,1	-1,4
Provinsi Kalimantan Selatan	5,1	4,3	4,2	4,0	3,9	4,1	4,1	-2,9	-4,9	-2,9	-1,8
Provinsi Kalimantan Timur	2,7	5,1	5,1	6,3	2,7	4,8	1,4	-5,4	-4,5	-2,8	-2,8
Provinsi Kalimantan Utara	6,1	7,2	7,9	6,6	6,0	6,9	4,6	-2,6	-1,4	-4,8	-1,1
<b>Balinasra</b>	<b>2,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>	<b>0,9</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,8</b>	<b>-7,4</b>	<b>-5,0</b>
Provinsi Bali	6,3	6,0	5,7	5,3	5,5	5,6	-1,2	-11,1	-12,3	-12,2	-9,3
Provinsi Nusa Tenggara Barat	-4,5	1,7	2,1	6,5	5,7	4,0	3,0	-1,3	-1,0	-3,0	-0,6
Provinsi Nusa Tenggara Timur	5,1	5,3	6,4	3,9	5,3	5,2	3,0	-2,0	-1,8	-2,3	-0,8
<b>Sulampua</b>	<b>6,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>2,8</b>	<b>5,4</b>	<b>2,7</b>	<b>4,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>
Provinsi Sulawesi Selatan	7,1	6,6	7,4	7,2	6,5	6,9	3,0	-3,9	-1,1	-0,6	-0,7
Provinsi Sulawesi Barat	6,2	6,0	5,2	5,2	6,4	5,7	4,9	-0,8	-5,3	-7,5	-2,4
Provinsi Sulawesi Tenggara	6,4	6,4	6,3	6,4	6,9	6,5	4,5	-2,6	-1,9	-2,2	-0,6
Provinsi Sulawesi Tengah	6,3	7,3	6,9	10,0	10,9	8,8	7,9	4,5	2,8	4,4	4,9
Provinsi Gorontalo	6,5	6,7	6,7	5,7	6,5	6,4	4,0	-0,3	-0,1	-3,6	0,0
Provinsi Sulawesi Utara	6,0	6,6	5,5	5,1	5,5	5,6	4,4	-3,8	-1,8	-2,2	-1,0
Provinsi Maluku	5,9	6,0	5,9	5,2	4,6	5,4	3,7	-1,1	-2,6	-3,4	-0,9
Provinsi Maluku Utara	7,9	7,6	7,5	4,1	5,4	6,1	3,5	-0,2	6,7	9,5	4,9
Provinsi Papua	7,4	-18,7	-23,9	-15,1	-3,8	-15,7	1,4	4,1	-2,8	6,9	2,3
Provinsi Papua Barat	6,2	-0,2	-0,5	2,9	8,3	2,7	5,3	0,7	-3,2	-5,2	-0,8

Tabel Indikator Ekonomi Makro – Inflasi

Indikator Makroekonomi Daerah	2018	2019				2019	2020				2020
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
<b>Inflasi (% yoy)</b>											
<b>Sumatera</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
Provinsi Aceh	1,8	1,8	2,7	2,5	1,7	1,7	3,9	1,4	1,9	3,6	3,6
Provinsi Sumatera Utara	1,2	1,1	5,9	4,5	2,3	2,3	1,8	-0,1	0,3	2,0	2,0
Provinsi Sumatera Barat	2,6	1,9	3,6	3,5	1,7	1,7	2,1	0,2	0,2	2,1	2,1
Provinsi Riau	2,4	1,3	3,4	4,0	2,4	2,4	2,0	1,1	1,1	2,4	2,4
Provinsi Kepulauan Riau	3,5	2,7	3,2	2,8	2,0	2,0	1,1	0,2	0,1	1,2	1,2
Provinsi Bengkulu	2,4	1,6	2,7	3,4	2,9	2,9	2,4	0,9	0,4	0,9	0,9
Provinsi Jambi	3,0	1,9	2,6	3,1	1,4	1,4	2,6	0,5	1,0	3,0	3,0
Provinsi Sumatera Selatan	2,7	1,7	2,1	2,7	2,1	2,1	3,2	1,7	1,0	1,5	1,5
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,2	2,7	3,7	4,3	2,6	2,6	1,8	0,2	-0,4	1,1	1,1
Provinsi Lampung	2,7	1,5	2,8	3,6	3,4	3,4	3,2	1,4	1,4	2,0	2,0
<b>Jawa</b>	<b>3,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
Provinsi DKI Jakarta	3,3	3,0	3,5	3,7	3,2	3,2	1,3	2,1	2,5	1,6	1,6
Provinsi Jawa Barat	3,5	2,4	3,5	3,9	3,2	3,2	1,7	2,1	2,7	2,2	2,2
Provinsi Banten	3,4	3,0	3,7	3,6	3,3	3,3	1,3	1,5	2,0	1,4	1,4
Provinsi Jawa Tengah	2,8	1,8	2,5	3,1	2,8	2,8	1,5	2,5	3,3	1,6	1,6
Provinsi DI Yogyakarta	2,7	2,6	3,1	3,0	2,8	2,8	1,6	2,5	2,8	1,4	1,4
Provinsi Jawa Timur	2,9	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	1,7	2,6	3,7	1,4	1,4
<b>Kalimantan</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
Provinsi Kalimantan Barat	3,8	3,5	3,0	3,1	2,4	2,4	2,2	1,9	1,7	2,5	2,5
Provinsi Kalimantan Tengah	4,5	3,8	2,9	2,3	2,5	2,5	3,2	2,1	1,4	1,0	1,0
Provinsi Kalimantan Selatan	2,6	3,1	4,0	4,1	4,0	4,0	2,8	1,0	1,0	1,7	1,7
Provinsi Kalimantan Timur	3,2	3,0	2,7	1,7	1,7	1,7	2,2	1,5	0,6	0,8	0,8
Provinsi Kalimantan Utara	5,0	4,7	3,1	2,5	1,5	1,5	0,2	-0,3	2,1	1,3	1,3
<b>Balinasra</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
Provinsi Bali	3,1	1,9	2,1	2,5	2,4	2,4	3,0	2,2	0,9	0,8	0,8
Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,2	2,4	3,4	2,2	1,9	1,9	1,6	-0,2	0,8	0,6	0,6
Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,1	2,1	1,4	2,1	0,7	0,7	1,7	1,6	1,1	0,6	0,6
<b>Sulampua</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Provinsi Sulawesi Selatan	3,5	3,1	3,0	3,6	2,4	2,4	2,5	2,3	1,6	2,0	2,0
Provinsi Sulawesi Barat	1,8	1,0	0,5	0,8	1,4	1,4	3,6	3,0	2,8	1,8	1,8
Provinsi Sulawesi Tenggara	2,7	2,6	3,5	3,7	2,7	2,7	1,0	-0,2	1,4	1,3	1,3
Provinsi Sulawesi Tengah	6,5	5,6	5,3	5,7	2,3	2,3	2,8	1,1	1,7	1,6	1,6
Provinsi Gorontalo	2,1	1,6	3,1	3,4	2,9	2,9	2,7	0,6	0,2	0,8	0,8
Provinsi Sulawesi Utara	3,8	2,5	5,1	3,6	3,5	3,5	3,0	1,4	-0,5	0,3	0,3
Provinsi Maluku	3,3	3,7	4,1	5,5	2,1	2,1	1,5	0,6	1,4	0,2	0,2
Provinsi Maluku Utara	4,1	2,9	1,6	2,6	2,0	2,0	2,1	1,1	0,8	2,1	2,1
Provinsi Papua	6,4	4,2	2,9	1,9	0,3	0,3	1,2	1,0	1,9	1,6	1,6
Provinsi Papua Barat	5,2	3,5	2,7	2,7	1,9	1,9	2,4	1,5	0,3	0,7	0,7

*"Halaman ini sengaja dikosongkan"*

# TIM PENYUSUN

## **Penanggung Jawab dan Editor**

Aida S. Budiman

## **Koordinator Penyusun**

IGP Wira Kusuma

Widi Agustin S.

## **Tim Penulis**

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter  
Grup Sektorial dan Regional

Handri Adiwilaga

Tiar Triyana

Maximilian T. Tutuarima

Bambang Satya Permana

Agung Budilaksono

Umran Usman

Nurul Pratiwi A.P.

Evy Maria Deswita Siburian

DAK Bintari Dewi Darmaputri

Ide Mahendra

Irham Ilmanel Abdinni

Benjamin P. Sitanggang

Faris Maulana

Muhammad Arifian Adin

Kantor Perwakilan BI Prov. Bali

Rahmad Hadi Nugroho

Christina Irawadi

Teressa Maria G. Hutabarat

Kantor Perwakilan BI Prov. Sulawesi Selatan

Arya Jodilistyo

Erdi Fiat Gumilang

Grace Angelia C. Simorangkir

Kantor Perwakilan BI Prov. Sumatera Utara

Dythia Sendrata

Andree Breitner Makahinda

Kantor Perwakilan BI Prov. Jawa Timur

Hayatullah Khumeini

Ramdha Dien Azka

Kantor Perwakilan BI Prov. Kalimantan Selatan

Tri Setyoningsih

Annisa Elma Nabila



Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

**BANK INDONESIA**

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter  
Grup Sektorial dan Regional

Ph. 021-2981 8119, 2981 8868

Fax. 021-3452 489, 231 0553







BANK INDONESIA

Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350 - Indonesia | [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)